

Sustainability Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan bersama Negara-negaradidunia yang mentransformasikan tujuan-tujuan yang mengatur tata cara dan prosedur pembangunan masyarakat yang damai tanpa kekerasan, nondiskriminasi, partisipasi, tatapemerintahan yang terbuka serta kerjasama kemitraan multi-pihak. Masing-masig Negara mempunyaicaraataumetodedalampencapaian SDGs yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat serta budaya yang berkembang. Buku ini menawarkan alternative dalam percepatan pencapain SDGs bagi Negara Indonesia yang didasarkan pada penelitian disatu wilayah. Diharapkan generalisasi hasil penelitian ini bisa diterapkan diwilayah lain yang mempunyaikarakteristik yang relative homogeny dengan tempat penelitian yang dilangsungkan di Bukuini.

Salah satu hal penting dalam percepatan pencapaian SDGs yang ditawarkan dalam buku ini adalah dengan Pemberdayaan sumber daya manusia dari komunitas masyarakat. Pemberdayaan ini harus disesuaikan dengan kondisi karakteristik budaya masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses memampukan sumber daya manusia dengan melakukan transformasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Dalam proses percepatan pencapaian SDGs, pemberdayaan diikuti oleh metode yang tepat yaitu dengan menerapkan Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode ini sangatt erkenal dan sudah diterapkan di berbagai belahan dunia khususnya dinegara-negara ketiga atau Negara berkembang. Partisipasi masyarakat dengan memperlakukan masyarakat sebagai subyek pada pemberdayaan merupakan inti darip enerapan PRA ini.

MENGGAGAS PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOAL'S (SDG's)



Penerbit Selaras
 Anggota IKAPI Jatim no. 165/JTI/2015
 Perum. Pesona Griya Asri A 11
 Malang 65154



**MENGGAGAS PERCEPATAN PENCAPAIAN
SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOAL'S (SDG'S)**
(dengan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia)

Boge Triatmanto

Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goal's (SDG's)

Penulis :
Boge Triatmanto

Layout Isi dan Sampul : Tim Penerbit Selaras
Copyright 2020, Penerbit Selaras

Diterbitkan oleh :
Penerbit Selaras Media Kreasindo
Perum. Pesona Griya Asri A-11
Malang 65154
E-mail : selaras_mediakreasindo@yahoo.co.id
Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi undang - undang

Jumlah : viii + 239 Halaman
Ukuran 15,5 x 23

ISBN : 978-602-6228-78-9
Cetakan 1, Mei 2021

**Sanksi Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

RINGKASAN

Penelitian ini didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Unmer Malang dibidang Pemberdayaan pada topik pemberdayaan sumber daya manusia pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat. Sustainability Development Goal's (SDG's) telah diberlakukan dengan menggunakan 17 indikator, semua Negara yang tergabung dalam deklarasi MDG's telah ikut serta dalam deklarasi SDG's termasuk Indonesia. Dalam implementasi pencapaian MDG's masih ada program yang belum tuntas terselesaikan, terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat paling bawah. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh implementasi pelaksanaan SDG's dengan penerapan pemberdayaan sumber daya manusia pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang sudah digagas oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Model penerapan pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah dengan *Participatory Rural Appraisals* (PRA). Secara khusus penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam implementasi SDG's untuk penyesuaian peraturan dan program pemerintah dengan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji studi kasus penghapusan kemiskinan di Kota Batu. Tahun pertama Penelitian dilakukan dengan observasi pada SKPD terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan serta kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan SDG's. Pada tahun kedua penelitian ditujukan pada obyek penelitian di 24 Desa/Kelurahan di Kota Batu yang diintervensi program penanggulangan kemiskinan dengan melakukan wawancara dan FGD pelaku program pada Lembaga

Keswadayaan Masyarakat.FGD juga dilakukan di Tingkat Kota dengan melibatkan semua SKPD, untuk *cross check* hasil penelitian di tahun pertama.FGD dilakukan bekerjasama dengan Bappeda Kota Batu.Pada Tahun ketiga penelitian ini merupakan uji coba dalam bentuk rekayasa sosial dalam penanggulangan kemiskinan.Luaran penelitian tahun ketiga ini adalah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Luaran yang lain adalah Jurnal Internasional bereputasi. Diharapkan hasil penelitian ini bisa diseminarkan di tingkat internasional untuk mengenalkan model penanggulangan kemiskinan dengan mengutamakan kebijakan lokal.

Analisis dilakukan dengan deskriptif kualitatif dengan mengkombinasikan analisis statistik untuk memperkuat hasil analisis deskriptif, yaitu dengan menggunakan analisis frekuensi untuk mengetahui tanggapan responden atas kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, beberapa tujuan yang tercantum dalam dokumen SDG's sudah berhasil namun masih belum optimal terutama dalam hal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini mendorong pemerintah daerah agar lebih ekstra dalam hal capaian pemerataan ekonomi hingga ke masyarakat bawah.

Key word: Pemberdayaan Masyarakat, SDG's, Penanggulangan kemiskinan, Participatory Rural Appraisal

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kami bisa dan mampu melaksanakan penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi untuk tahun anggaran 2018. Terimakasih kami sampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Sesuai dengan kontrak penelitian Tahun Anggaran 2017, Nomor 016/Kontrak/PTS.030.7/PN/III/2018 tanggal 3 April 2018.

Terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini, Rektor Universitas Merdeka Malang, LPPM, Fakultas Ekonomi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Bappeda Kota Batu, dan berbagai pihak yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Sustainability Development Goal's (SDG's) telah diberlakukan dengan menggunakan 17 indikator, semua Negara yang tergabung dalam deklarasi MDG's telah ikut serta dalam deklarasi SDG's termasuk Indonesia. Dalam implementasi pencapaian MDG's masih ada program yang belum tuntas terselesaikan, terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat paling bawah. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh implementasi pelaksanaan SDG's dengan penerapan pemberdayaan sumber daya manusia pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang sudah digagas oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Model penerapan pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah dengan *Participatory Rural Appraisals* (PRA). Secara khusus penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam implementasi SDG's untuk

penyelarasan peraturan dan program pemerintah dengan pemberdayaan masyarakat.

Kami menyadari, adanya kelemahan yang mungkin terjadi pada penelitian ini kami, kami berharap adanya masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, untuk memberikan kontribusi positif dan membangun Negara yang lebih kuat.

Malang, Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	ii
Ringkasan	iv
Prakata	v
Daftar Isi	vii
BABI Pendahuluan	1
A Latar Belakang	1
B Keutamaan Peneliti.....	21
BAB II Sustainability Development Goals (SDG's)	28
A Kerangka Konsep SDG's	29
BAB III Konsep Pemberdayaan SDM & Pemberdayaan Masyarakat	31
A Konsep Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	28
B Pandangan Tentang Konsep Pemberdayaan dan Kemiskinan	43
C Kurang Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat	44
BAB IV Konsep Participatory Rural Appraisal (PRA)	46
A. Tujuan	48
.	
BAB V Hasil Penelitian Empiris	59
BAB VI Rekomendasi Penelitian	104
BAB VII Penutup	107
Daftar Pustaka	110

BAB I

PENDAHULUAN

Sustainability Development Goal's merupakan Upaya percepatan pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan baik secara nasional maupun daerah, untuk itu diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ditingkat daerah, target-target SDGs harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dalam bentuk program, indikator maupun target yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Dalam implementasi target SDGs, perlu dirumuskan peta jalan (*road map*) daerah. Selanjutnya *road map* tersebut perlu dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi SDG's sesuai dengan kondisi dan permasalahan di daerah. Rencana aksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk implementasi target SDGs.

Program penanggulangan kemiskinan, telah banyak dilakukan baik program yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kota/Kabupaten. Namun dalam kenyataannya belum mampu secara sinergis mengoptimalkan target pencapaian SDG's.

Program pengentasan kemiskinan tetap relevan sepanjang waktu. Pemerintah daerah menekankan upaya program pengentasan kemiskinan dengan berbagai langkah yang kreatif, guna memperkecil kemiskinan dan kesenjangan sosial termasuk upaya membuka lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi upaya pengentasan kemiskinan ini akan terus dilakukan secara berkala. Di antara

program yang rutin dilaksanakan terkait dengan hal ini adalah program Raskin. Pemerintah Kota menyalurkan Program Raskin.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk "Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana". Tujuh goal's yang telah dicanangkan sebelumnya bertujuan, antara lain, untuk memberantas kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana pun, mengurangi setidaknya setengah dari penduduk dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan. Penerapan sistem dan langkah-langkah perlindungan sosial yang sesuai secara massal bagi semua, termasuk masyarakat kelas bawah, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial dari orang miskin dan rentan.

kemiskinan adalah masalah multidimensi yang kompleks dengan asal-usul di ranah nasional dan internasional. Tidak ada solusi seragam yang dapat ditemukan untuk aplikasi global. Sebaliknya, program khusus negara untuk mengatasi kemiskinan dan upaya internasional yang mendukung upaya nasional, serta proses paralel untuk menciptakan lingkungan internasional yang mendukung, sangat penting untuk solusi masalah ini.

Keutamaan penelitian ini, adalah melakukan rekonstruksi berupa pengembangan model program pemberdayaan masyarakat berbasis pada *Partisipatory Rural Appraisal*, dalam rangka mewujudkan model yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat dan budaya lokal, dan direncanakan secara terintegrasi dengan memperhatikan potensi sumberdaya lokal, mulai dari struktur kelembagaan yang mampu mensinergikan antara kelembagaan yang dibangun dalam program Penanggulangan kemiskinan secara umum yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dengan unsur pemerintah lokal (kelurahan/desa), untuk melakukan jejaring dengan *stake holder*, dan kelompok peduli lainnya(perusahaan

bisnis swasta maupun BUMN/D, lembaga swadaya masyarakat dan Perguruan Tinggi).

Dari program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan selama ini, baik program yang didanai dari APBD seperti Program ADD dan *pilot project*, dari APBD Provinsi (Raskin, Gerdu taskin) maupun dari APBN (PNPM Mandiri) dan program-program lainnya secara relatif masih terdapat kelemahan dalam hal perencanaan sampai dengan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi sampai pertanggungjawaban pelaporan, pada intinya jika dicermati secara seksama belum secara penuh mendasarkan pada prinsip *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, dikelola secara terintegrasi dengan program-program pembangunan lainnya, serta belum secara optimal untuk melakukan sinergi atau aliansi dengan semua pihak yang relevan atau kelompok peduli lainnya.

A. Tujuan

Pembahasan dalam buku ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi berupa pengembangan model program pemberdayaan masyarakat berbasis pada *Participatory Rural Appraisal*. Pembahasan ini diharapkan dalam rangka mewujudkan model yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat dan budaya lokal, dan direncanakan secara terintegrasi dengan memperhatikan potensi sumberdaya lokal, mulai dari struktur kelembagaan yang mampu mensinergikan antara kelembagaan yang dibangun dalam program Penanggulangan kemiskinan secara umum yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dengan unsur pemerintah lokal (kelurahan/desa), untuk melakukan jejaring dengan *stake holder*, dan kelompok peduli lainnya (perusahaan bisnis swasta maupun BUMN/D, lembaga swadaya masyarakat dan Perguruan Tinggi).

Dari program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan selama ini, baik program yang didanai dari APBD seperti Program ADD dan *pilot project*, dari APBD Provinsi (Raskin, Gerdu taskin) maupun dari APBN (PNPM Mandiri) dan program-program lainnya secara relatif masih terdapat kelemahan dalam hal perencanaan sampai dengan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi sampai pertanggungjawaban pelaporan, pada intinya jika dicermati secara seksama belum secara penuh mendasarkan pada prinsip *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, dikelola secara terintegrasi dengan program-program pembangunan lainnya, serta belum secara optimal untuk melakukan sinergi atau aliansi dengan semua pihak yang relevan atau kelompok peduli lainnya.

Agar gagasan keutamaan pembahasan dalam buku ini dapat dijawab dan dijabarkan secara kronologis dan lebih jelas serta bisa dipertanggungjawabkan maka, dapat diarahkan melalui rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mengeksplorasi faktor-faktor penting yang sesuai dengan karakteristik organisasi keswadayaan masyarakat dan budaya masyarakat sebagai dasar pengembangan/reformulasi model Program Pemberdayaan Sumber daya manusia pada lembaga keswadayaan masyarakat dengan konsep *Participatory rural Appraisal* yang diselaraskan dengan tujuan *SDG's*.
2. Bagaimana menentukan program-program pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor produktif yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan memperhatikan potensi kearifan lokal menuju program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, sesuai dengan tujuan *SDG's* ?
3. Bagaimana menentukan strategi kompromi antara pemerintah, lembaga Keswadayaan Masyarakat, pihak swasta, Perguruan

Tinggi, dan kelompok peduli dalam Program penghapusan kemiskinan untuk menghasilkan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan SDG's.

Bagaimana menyempurnakan dan menentukan kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik demografi masyarakat dalam menghasilkan program pemberdayaan sumber daya manusia partisipatif yang sesuai dengan tujuan-tujuan SDG's.

BAB 2

Sustainability Development Goals (SDG's)

A. Konsep SDG's

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDG's berisi 17 Tujuan. Salah satu Tujuan adalah Tujuan yang mengatur tata cara dan prosedur yaitu masyarakat yang damai tanpa kekerasan, nondiskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi-pihak. Proses perumusan SDGs berbeda sekali dengan MDG's. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif, salah satunya melalui survei Myworld. Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip "tidak ada seorang pun yang ditinggalkan". SDG's juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antar-negara dan antar-warga negara. SDG's berlaku untuk semua (universal) negara-negara anggota PBB, baik negara maju, miskin, dan negara berkembang (Hoelman et. Al., 2015)

Tujuan Pertama SDG's : Pengentasan kemiskinan

Agenda 2030 mengakui bahwa memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk kemiskinan ekstrem, adalah tantangan global terbesar dan persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pertama bertujuan untuk "Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-

mana". Tujuh target yang terkait bertujuan, antara lain, untuk memberantas kemiskinan ekstrem untuk semua orang di mana pun, mengurangi setidaknya setengah dari proporsi pria, wanita dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan, dan menerapkan sistem dan langkah-langkah perlindungan sosial yang sesuai secara nasional untuk semua, termasuk lantai, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial dari orang miskin dan rentan

Sebagai yang diingat oleh pengantar Laporan Tujuan Pembangunan Milenium 2015, pada KTT Milenium pada September 2000, 189 negara dengan suara bulat mengadopsi Deklarasi Milenium, berjanji untuk "tidak menyayangkan upaya untuk membebaskan sesama pria, wanita dan anak-anak kita dari kondisi yang menghina dan tidak manusiawi kemiskinan ekstrim". Komitmen ini diterjemahkan ke dalam kerangka inspirasi delapan tujuan dan, kemudian, menjadi langkah-langkah praktis luas yang memungkinkan orang di seluruh dunia untuk meningkatkan kehidupan mereka dan prospek masa depan mereka. MDG membantu mengangkat lebih dari satu miliar orang keluar dari kemiskinan ekstrim, membuat terobosan terhadap kelaparan, untuk memungkinkan lebih banyak anak perempuan bersekolah daripada sebelumnya dan untuk melindungi planet kita.

Namun demikian, terlepas dari semua keuntungan luar biasa, ketidaksetaraan telah bertahan dan kemajuan tidak merata. Oleh karena itu, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan serangkaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutannya telah dilakukan, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Agenda, "untuk membangun pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium dan berupaya menangani bisnis mereka yang belum selesai".

Tema Forum Politik Tingkat Tinggi 2017 adalah "Memberantas kemiskinan dan mempromosikan kemakmuran di dunia yang berubah", dan itu termasuk SDG 1 sebagai salah satu fokus SDGs

Dari Agenda 21 ke Masa Depan yang Kita Inginkan dalam "The Future We Want", dokumen hasil dari Rio + 20, Negara-negara Anggota menekankan perlunya memberikan prioritas tertinggi pada pengentasan kemiskinan dalam agenda pembangunan PBB, mengatasi akar penyebab dan tantangan kemiskinan melalui integrasi, terkoordinasi dan koheren strategi di semua level.

Dalam konteks program kerja multi-tahun yang diadopsi oleh Komisi Pembangunan Berkelanjutan (CSD) setelah KTT Dunia 2002 tentang Pembangunan Berkelanjutan (WSSD), pengentasan kemiskinan muncul sebagai "masalah utama" dalam agenda CSD setiap tahun .

Pengentasan kemiskinan dibahas dalam Bab II dari Rencana Implementasi Johannesburg (2002), yang menekankan bahwa pengentasan kemiskinan adalah tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini dan persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, terutama untuk negara-negara berkembang.

Tindakan-tindakan prioritas dalam pengentasan kemiskinan meliputi:

meningkatkan akses ke mata pencaharian berkelanjutan, peluang wirausaha dan sumber daya produktif; menyediakan akses universal ke layanan sosial dasar; secara progresif mengembangkan sistem perlindungan sosial untuk mendukung mereka yang tidak dapat mendukung diri mereka sendiri; memberdayakan orang yang hidup dalam kemiskinan dan

organisasi mereka; mengatasi dampak kemiskinan yang tidak proporsional terhadap perempuan; bekerja dengan donor dan penerima yang berminat untuk mengalokasikan peningkatan porsi ODA untuk pengentasan kemiskinan; dan mengintensifkan kerja sama internasional untuk pengentasan kemiskinan.

Majelis Umum, dalam Program 1997 untuk Implementasi Lebih Lanjut Agenda 21 (paragraf 27) memutuskan bahwa pengentasan kemiskinan harus menjadi tema utama pembangunan berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang. Ini adalah salah satu tujuan mendasar dari komunitas internasional dan seluruh sistem PBB.

"Memerangi kemiskinan" adalah topik Bab 3 Agenda 21. Ini juga dalam komitmen 2 Deklarasi Kopenhagen tentang Pembangunan Sosial.

Agenda 21 menekankan bahwa kemiskinan adalah masalah multidimensi yang kompleks dengan asal-usul di ranah nasional dan internasional. Tidak ada solusi seragam yang dapat ditemukan untuk aplikasi global. Sebaliknya, program khusus negara untuk mengatasi kemiskinan dan upaya internasional yang mendukung upaya nasional, serta proses paralel untuk menciptakan lingkungan internasional yang mendukung, sangat penting untuk solusi masalah ini.

Tahun-tahun setelah Konferensi Rio 1992 telah menyaksikan peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan absolut, terutama di negara-negara berkembang. Besarnya dan rumitnya masalah kemiskinan dapat membahayakan tatanan sosial, merusak pembangunan ekonomi dan lingkungan, dan mengancam stabilitas politik di banyak negara.

Tujuan kedua : Keamanan pangan dan nutrisi dan pertanian berkelanjutan

Ketika populasi dunia terus tumbuh, lebih banyak upaya dan inovasi akan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan, meningkatkan rantai pasokan global, mengurangi kehilangan dan limbah pangan, dan memastikan bahwa semua yang menderita kelaparan dan kekurangan gizi memiliki akses untuk makanan bergizi. Banyak komunitas internasional percaya bahwa adalah mungkin untuk menghilangkan kelaparan di dalam generasi berikutnya, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan ini.

Para pemimpin dunia pada Konferensi 2012 tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio + 20) menegaskan kembali hak setiap orang untuk memiliki akses ke makanan yang aman dan bergizi, konsisten dengan hak atas makanan yang memadai dan hak mendasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan. Zero Hunger Challenge dari Sekretaris Jenderal PBB yang diluncurkan di Rio + 20 meminta pemerintah, masyarakat sipil, komunitas agama, sektor swasta, dan lembaga penelitian untuk bersatu untuk mengakhiri kelaparan dan menghilangkan bentuk-bentuk malnutrisi terburuk.

Tantangan Nol Kelaparan sejak itu telah mengumpulkan dukungan luas dari banyak Negara anggota dan entitas lainnya. Itu panggilan untuk:

- Nol anak kerdil di bawah usia dua tahun
- Akses 100% ke makanan yang memadai sepanjang tahun
- Semua sistem pangan berkelanjutan
- 100% peningkatan produktivitas dan pendapatan petani kecil
- Tanpa kehilangan atau pemborosan makanan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk “Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan” (SDG2) mengakui keterkaitan antara mendukung pertanian berkelanjutan, memberdayakan petani kecil, mempromosikan kesetaraan gender, mengakhiri kemiskinan pedesaan, memastikan gaya hidup sehat, mengatasi iklim perubahan, dan masalah-masalah lain yang dibahas dalam rangkaian 17 Sasaran Pembangunan Berkelanjutan dalam Agenda Pembangunan Pasca-2015.

Selain asupan kalori yang cukup, nutrisi yang tepat memiliki dimensi lain yang patut diperhatikan, termasuk ketersediaan mikronutrien dan diet sehat. Asupan mikronutrien yang tidak memadai dari ibu dan bayi dapat memiliki dampak perkembangan jangka panjang. Pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat terkait erat dengan meningkatnya insiden penyakit tidak menular di negara maju dan berkembang.

Nutrisi yang mencukupi selama 1.000 hari sejak awal kehamilan hingga ulang tahun kedua seorang anak layak mendapat fokus khusus. Gerakan Scaling-Up Nutrition (SUN) telah membuat kemajuan besar sejak pembentukannya lima tahun lalu dalam menggabungkan strategi yang menghubungkan nutrisi dengan pertanian, air bersih, sanitasi, pendidikan, pekerjaan, perlindungan sosial, perawatan kesehatan dan dukungan untuk ketahanan.

Kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem terutama terjadi di pedesaan, dengan petani kecil dan keluarga mereka merupakan bagian yang sangat signifikan dari orang miskin dan kelaparan. Dengan demikian, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan secara integral terkait dengan meningkatkan produksi pangan, produktivitas pertanian, dan pendapatan pedesaan.

Sistem pertanian di seluruh dunia harus menjadi lebih produktif dan tidak boros. Praktik pertanian berkelanjutan dan sistem pangan, termasuk produksi dan konsumsi, harus dikejar dari perspektif holistik dan terintegrasi.

Tanah, tanah yang sehat, sumber daya genetik air dan tanaman adalah input utama dalam produksi pangan, dan kelangkaannya yang terus meningkat di banyak bagian dunia membuatnya penting untuk menggunakan dan mengelolanya secara berkelanjutan. Meningkatkan hasil pada lahan pertanian yang ada, termasuk restorasi lahan terdegradasi, melalui praktik pertanian berkelanjutan juga akan mengurangi tekanan untuk menebangi hutan untuk produksi pertanian. Pengelolaan air langka yang bijak melalui peningkatan teknologi irigasi dan penyimpanan, dikombinasikan dengan pengembangan varietas tanaman baru yang tahan kekeringan, dapat berkontribusi untuk mempertahankan produktivitas lahan kering.

Menghentikan dan membalikkan degradasi lahan juga penting untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa depan. Dokumen hasil Rio + 20 menyerukan untuk mencapai dunia netral degradasi lahan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Mengingat tingkat degradasi lahan saat ini secara global, manfaat potensial dari restorasi lahan untuk ketahanan pangan dan untuk mitigasi perubahan iklim sangat besar. Namun, ada juga pengakuan bahwa pemahaman ilmiah tentang penyebab desertifikasi, degradasi lahan dan kekeringan masih berkembang.

Ada banyak elemen pengetahuan petani tradisional yang, diperkaya oleh pengetahuan ilmiah terbaru, dapat mendukung sistem pangan produktif melalui tanah, pengelolaan air, nutrisi dan hama yang berkelanjutan, dan penggunaan pupuk organik yang lebih luas.

Peningkatan proses pengambilan keputusan terpadu di tingkat nasional dan regional diperlukan untuk mencapai sinergi dan secara memadai mengatasi pertukaran antara pertanian, air, energi, tanah, dan perubahan iklim.

Mengingat perubahan yang diharapkan dalam suhu, curah hujan, dan hama yang terkait dengan perubahan iklim, komunitas global diminta untuk meningkatkan investasi dalam penelitian, pengembangan, dan demonstrasi teknologi.

Pembangunan Pedesaan

Sebagaimana Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bapak Ban Ki - Moon mencatat dalam Millenium Development Goals Report 2015, "kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan tetap jelas" dan kesenjangan besar masih ada di berbagai sektor:

Diperkirakan pada 2015 masih sekitar 2,8 miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki akses ke layanan energi modern dan lebih dari 1 miliar tidak memiliki akses ke listrik. Sebagian besar beban pembangunan yang serius ini jatuh ke daerah pedesaan, di mana kurangnya akses ke layanan energi modern secara negatif memengaruhi produktivitas, pencapaian pendidikan, dan bahkan kesehatan, dan pada akhirnya memperburuk jebakan kemiskinan. Di daerah pedesaan, hanya 56 persen kelahiran yang dilayani oleh tenaga kesehatan terlatih, dibandingkan dengan 87 persen di daerah perkotaan.

Sekitar 16 persen populasi pedesaan tidak menggunakan sumber air minum yang lebih baik, dibandingkan dengan 4 persen populasi perkotaan.

Sekitar 50 persen orang yang tinggal di daerah pedesaan kekurangan fasilitas sanitasi yang baik, dibandingkan dengan hanya 18 persen orang di daerah perkotaan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2 dari Agenda Pembangunan Pasca-2015 panggilan untuk "mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan". Secara khusus, target 2.a mencurahkan perhatian khusus untuk "Meningkatkan investasi, termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional, dalam infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian dan layanan penyuluhan, pengembangan teknologi dan bank gen tanaman dan ternak untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara-negara berkembang , di negara - negara yang paling tidak berkembang ".

Informasi latar belakang

Mempromosikan pertanian berkelanjutan dan pembangunan pedesaan (SARD) Tujuan utama SARD adalah untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan pangan. Ini akan melibatkan inisiatif pendidikan, pemanfaatan insentif ekonomi dan pengembangan teknologi baru dan tepat guna, sehingga memastikan pasokan makanan bergizi yang stabil, akses ke pasokan tersebut oleh kelompok rentan, dan produksi untuk pasar; penciptaan lapangan kerja dan pendapatan untuk mengurangi kemiskinan; dan manajemen sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Komisi Pembangunan Berkelanjutan (CSD) pertama kali meninjau Pembangunan Pedesaan pada sesi ketiga pada tahun 1995, ketika mencatat dengan keprihatinan bahwa, meskipun beberapa kemajuan telah dilaporkan, kekecewaan secara luas diungkapkan pada lambatnya kemajuan dalam bergerak menuju pertanian berkelanjutan dan pembangunan pedesaan di banyak negara.

Pertanian berkelanjutan juga dipertimbangkan pada review lima tahun implementasi Agenda 21 pada tahun 1997, di mana pemerintah didesak untuk melampirkan prioritas tinggi untuk mengimplementasikan komitmen yang disepakati pada KTT Pangan Dunia, terutama seruan untuk setidaknya mengurangi separuh jumlah orang-orang yang kekurangan gizi di dunia pada tahun 2015. Tujuan ini diperkuat oleh Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh para Kepala Negara dan Pemerintahan pada bulan September 2000, yang memutuskan untuk membagi dua pada tahun 2015 proporsi penduduk dunia yang menderita kelaparan.

Sesuai dengan program kerja multi-tahun, pertanian dengan perspektif pembangunan pedesaan adalah fokus utama CSD-8 pada tahun 2000, bersama dengan perencanaan dan pengelolaan sumber daya lahan yang terintegrasi sebagai tema sektoral. Dokumentasi pendukung dan diskusi menyoroti hubungan antara tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan pertanian berkelanjutan. Komisi mengadopsi keputusan 8/4 yang mengidentifikasi 12 prioritas tindakan. Ini menegaskan kembali bahwa tujuan utama SARD adalah untuk meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan dengan cara yang ramah lingkungan sehingga dapat berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ia mencatat bahwa ketahanan pangan - meskipun prioritas kebijakan untuk semua negara - tetap menjadi tujuan yang tidak terpenuhi. Ia juga mencatat bahwa pertanian memiliki tempat khusus dan penting dalam masyarakat dan membantu mempertahankan kehidupan dan tanah pedesaan.

Pembangunan Pedesaan dimasukkan sebagai salah satu area tematis bersama dengan Pertanian, Tanah, Kekeringan, Penggurunan dan Afrika dalam siklus implementasi ketiga CSD-16 / CSD-17.

Penekanan tumbuh sedang ditempatkan pada pendekatan Nexus untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, berusaha untuk mewujudkan sinergi dari hubungan antara faktor-faktor pembangunan seperti energi, kesehatan, pendidikan, air, makanan, gender, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini dan sebagai bagian dari tindak lanjut Konferensi 2012 tentang Pembangunan Berkelanjutan atau Rio + 20, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN-DESA), bekerja sama dengan SE4All, UN-Energy dan Komisi Ekonomi untuk Afrika (ECA), menyelenggarakan Konferensi Global tentang Akses Energi Pedesaan: Pendekatan Nexus untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberantasan Kemiskinan, di Addis Ababa, Ethiopia, 4 - 6 Desember 2013.

Tujuan Ketiga : Health and population

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3 dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan adalah untuk "memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia". Target terkait bertujuan untuk mengurangi rasio kematian ibu secara global; mengakhiri kematian bayi baru lahir dan anak-anak yang dapat dicegah; mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit menular lainnya; mengurangi kematian akibat penyakit tidak menular; memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat; mengurangi separuh jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas jalan; memastikan akses universal ke layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi; mencapai cakupan kesehatan universal; dan mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan polusi.

Era MDG dan sebelumnya

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai MDGs kesehatan ibu dan anak, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon meluncurkan inisiatif Every Woman Every Child pada United Nations Millennium Development Goals Summit pada September 2010. Every Woman Every Child adalah global yang belum pernah terjadi sebelumnya gerakan yang memobilisasi dan mengintensifkan aksi internasional dan nasional oleh pemerintah, multilateral, sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mengatasi tantangan kesehatan utama yang dihadapi perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Gerakan ini menerapkan Strategi Global untuk Kesehatan Wanita dan Anak, yang menyajikan peta jalan tentang cara meningkatkan pembiayaan, memperkuat kebijakan, dan meningkatkan layanan di lapangan untuk wanita dan anak yang paling rentan.

Komisi Pembangunan Berkelanjutan menganggap Kesehatan dan pembangunan berkelanjutan sebagai masalah lintas sektor selama siklus dua tahun dari program kerja tahun jamaknya. Kesehatan dan Pembangunan Berkelanjutan juga merupakan bagian integral dari KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan, yang diadakan di Johannesburg pada tahun 2002. Dokumen hasil KTT, Rencana Implementasi Johannesburg, membahas Bab 6 tentang Kesehatan dan Pembangunan Berkelanjutan, mengingatkan bahwa manusia adalah berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif, selaras dengan alam dan lebih jauh mengakui bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai tanpa adanya prevalensi penyakit yang melemahkan yang tinggi, sedangkan untuk memperoleh kesehatan bagi seluruh penduduk membutuhkan pengentasan kemiskinan.

Hasil Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan, Agenda 21, membahas Bab 6 tentang

"Melindungi dan Memajukan Kesehatan Manusia". Agenda ini mengakui bahwa kesehatan dan pembangunan saling terkait erat, dan menyebut bahwa item tindakan di bawah Agenda 21 harus memenuhi kebutuhan kesehatan primer penduduk dunia, karena mereka merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan perawatan lingkungan primer.

Tujuan Keempat : Pendidikan

Pendidikan untuk semua selalu menjadi bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan. KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (WSSD) pada tahun 2002 mengadopsi Rencana Implementasi Johannesburg (JPOI) yang dalam Bagian X, menegaskan kembali Tujuan Pembangunan Milenium 2 dalam mencapai pendidikan dasar universal pada tahun 2015 dan tujuan Kerangka Aksi Dakar pada Pendidikan untuk Semua untuk menghapus disparitas gender di pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan di semua tingkat pendidikan pada tahun 2015. JPOI menjawab kebutuhan untuk mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam pendidikan formal di semua tingkatan, serta melalui peluang pendidikan informal dan non-formal.

Ada pengakuan internasional yang berkembang atas Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD) sebagai elemen integral dari pendidikan berkualitas dan pendorong utama untuk pembangunan berkelanjutan. Baik Perjanjian Muscat yang diadopsi pada Global Education For All Meeting (GEM) pada tahun 2014 dan proposal untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dikembangkan oleh Open Working Group of the UN General Assembly on SDGs (OWG) memasukkan ESD dalam target yang diusulkan untuk agenda pasca-2015. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 yang diusulkan berbunyi

"Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil dan mempromosikan peluang belajar seumur hidup untuk semua" dan mencakup serangkaian target terkait.

ESD terkait erat dengan diskusi internasional tentang pembangunan berkelanjutan, yang telah tumbuh dalam skala dan pentingnya sejak, Our Common Future muncul pada tahun 1987, memberikan definisi pembangunan berkelanjutan yang pertama kali digunakan secara luas sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri."

Peran penting pendidikan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan juga dicatat pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan, yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, melalui Bab 36 dari dokumen hasil - Agenda 21.

Pentingnya mempromosikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan secara aktif ke dalam pendidikan juga ditekankan dalam paragraf 233 dari Future We Want, hasil Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan, Rio + 20, pada tahun 2012.

Pada tahun 2005, UNESCO meluncurkan Dekade Pendidikan PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan yang menegaskan kembali peran kunci pendidikan dalam membentuk nilai-nilai yang mendukung pembangunan berkelanjutan, dan dalam mengkonsolidasikan masyarakat yang berkelanjutan. Laporan akhir Dekade Pendidikan PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan, Membentuk Masa Depan yang Kita Inginkan, diluncurkan pada Konferensi Dunia UNESCO tentang Pendidikan

untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diadakan pada November 2014, Nagoya, Jepang.

Pada kesempatan yang sama, sebagai tindak lanjut United Nations Decade of ESD (2005-2014), UNESCO meluncurkan Global Action Program (GAP) tentang ESD. Tujuan keseluruhan dari GAP adalah untuk menghasilkan dan meningkatkan tindakan di semua tingkat dan bidang pendidikan dan pembelajaran untuk mempercepat kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan. GAP telah mengidentifikasi lima bidang prioritas untuk maju ke agenda ESD: dukungan kebijakan, pendekatan seluruh lembaga, pendidik, pemuda, dan komunitas lokal. UNESCO telah membentuk lima Jaringan Mitra, masing-masing sesuai dengan lima bidang prioritas, sebagai salah satu mekanisme implementasi GAP utamanya. Jaringan Mitra akan menciptakan sinergi untuk aktivitas anggotanya dan mengkatalisasi tindakan oleh pemangku kepentingan lainnya.

Menjelang United Nations Conference on Sustainable Development, Rio + 20, Higher Education Sustainability Initiative (HESI) dibentuk sebagai kemitraan beberapa entitas PBB sponsor (UNESCO, UN-DESA, UNEP, Global Compact, dan UNU) bertujuan untuk menggalang komitmen dari lembaga pendidikan tinggi untuk mengajar dan mendorong penelitian tentang pembangunan berkelanjutan, menghijaukan kampus, dan mendukung upaya keberlanjutan lokal. Dengan keanggotaan hampir 300 universitas di seluruh dunia, HESI menyumbang lebih dari sepertiga dari semua komitmen sukarela yang dihasilkan dari Konferensi Rio +20, memberikan institusi pendidikan tinggi antarmuka unik antara pembuatan kebijakan dan akademisi. Pada tahun 2015, kemitraan HESI secara resmi menjadi anggota di area prioritas 2 Jaringan Mitra GAP: "Transformasi lingkungan pembelajaran dan pelatihan".

Melalui asosiasinya dengan GAP, HESI bertujuan membantu institusi untuk mengembangkan rencana keberlanjutan dalam kemitraan dengan komunitas yang lebih luas, dan membantu universitas dalam memasukkan keberlanjutan ke dalam operasi, tata kelola, kebijakan, dan administrasi kampus.

Tujuan Kelima : Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Sejak pembentukannya 70 tahun yang lalu, PBB telah mencapai hasil penting dalam memajukan kesetaraan gender, dari pembentukan Komisi Status Wanita - badan antar pemerintah global utama yang secara eksklusif didedikasikan untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita - melalui adopsi berbagai perjanjian penting seperti Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan Deklarasi Beijing dan Platform Aksi.

Pada kesempatan Debat Umum Sidang Umum Sidang ke-66 pada September 2011, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa BAN KI-MOON menyoroti dalam Lapornya "We the Peoples", peran krusial kesetaraan gender sebagai pendorong kemajuan pembangunan. , menyadari bahwa potensi perempuan belum sepenuhnya terwujud, antara lain karena ketidaksetaraan sosial, ekonomi dan politik yang terus berlanjut.

Ketidaksetaraan gender masih mengakar di setiap masyarakat. Perempuan menderita karena kurangnya akses ke pekerjaan yang layak dan menghadapi segregasi pekerjaan dan kesenjangan upah gender. Dalam banyak situasi, mereka tidak diberi akses ke pendidikan dasar dan perawatan kesehatan serta menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Mereka kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi.

Dengan tujuan mengatasi tantangan ini dengan lebih baik dan untuk mengidentifikasi satu pendorong yang diakui untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan PBB tentang masalah kesetaraan gender, UN Women didirikan pada tahun 2010.

UN Women bekerja untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, pemberdayaan perempuan, dan pencapaian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra dan penerima manfaat pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, dan perdamaian dan keamanan. Peran vital perempuan dan kebutuhan akan partisipasi penuh dan setara serta kepemimpinan mereka di semua bidang pembangunan berkelanjutan ditegaskan kembali di Masa Depan yang Kita Inginkan (paragraf 236-244), serta dalam Proposal Kelompok Kerja Terbuka untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Proposal Kelompok Kerja Terbuka untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 yang diusulkan membahas hal ini dan berbunyi "Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan".

Tujuan Keenam : Air dan sanitasi

Air dan sanitasi merupakan inti dari pembangunan berkelanjutan, dan berbagai layanan yang disediakan mendukung pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, eksploitasi berlebihan, polusi, dan perubahan iklim telah menyebabkan tekanan air yang parah di berbagai lokasi di seluruh dunia.

Saat ini, 2,2 miliar orang tidak memiliki akses ke air minum yang dikelola dengan aman, dan lebih dari 4,2 miliar orang tidak

memiliki sanitasi yang dikelola dengan aman. Perubahan iklim memperburuk situasi, dengan meningkatnya bencana seperti banjir dan kekeringan. 80 persen air limbah di dunia mengalir kembali ke ekosistem tanpa diolah atau digunakan kembali, dan 70 persen dari luas lahan basah alami dunia telah hilang, termasuk hilangnya spesies air tawar secara signifikan.

Pandemi COVID-19 menimbulkan hambatan tambahan, mengganggu akses miliaran orang ke layanan air minum, sanitasi, dan kebersihan yang dikelola dengan aman - layanan yang sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran virus.

Sekarang, lebih dari sebelumnya dunia perlu mengubah cara pengelolaan sumber daya airnya dan memberikan layanan air dan sanitasi bagi miliaran orang. Tindakan mendesak diperlukan untuk mengatasi krisis global ini, karena berdampak pada semua negara di dunia, baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6 (SDG 6) tentang air dan sanitasi, yang diadopsi oleh Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada KTT PBB 2015 sebagai bagian dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, memberikan cetak biru untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Sebagai tanggapan langsung terhadap Dekade Aksi dan Pengiriman untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diminta oleh Kepala Negara dan Pemerintah pada KTT SDG pada 2019, sistem PBB meluncurkan Kerangka Akselerasi Global SDG 6 pada Juli 2020, untuk meningkatkan kemajuan menuju Keberlanjutan. Tujuan Pembangunan dan menempatkan dunia di jalur yang tepat untuk merealisasikan target mereka pada tahun 2030. Kami menyerukan kepada semua pemangku kepentingan untuk mendorong tindakan di sekitar kerangka kerja guna

mempercepat pencapaian tujuan dan target terkait air serta mengatasi krisis global.

Meskipun SDG 6 adalah pengulangan terbaru dari tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan air, topik tersebut telah lama menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada tahun 1977 konferensi Mar del Plata di Argentina membuat Rencana Aksi tentang "Pasokan Air Masyarakat", yang menyatakan bahwa semua orang berhak atas akses air minum dalam jumlah dan kualitas yang sama dengan kebutuhan dasar mereka. Pentingnya air kemudian diangkat oleh Dekade Pasokan Air Minum dan Sanitasi Internasional dari tahun 1981 hingga 1990 dan pada tahun 1992 pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro (Agenda 21, Bab 18), serta pada Konferensi Internasional tentang Air dan Lingkungan (ICWE) di Dublin.

Pada 1993, Hari Air Sedunia ditetapkan pada 22 Maret oleh Sidang Umum PBB, dan pada Hari Toilet Sedunia 2013 pada 19 November.

Pada tahun 2000, Deklarasi Pembangunan Milenium menyerukan kepada dunia untuk mengurangi separuh pada tahun 2015 proporsi orang tanpa akses ke air minum yang aman serta proporsi orang yang tidak memiliki akses ke sanitasi dasar dan pada tahun 2003, Tahun Air Tawar Internasional dideklarasikan oleh Sidang Umum, diikuti oleh Dekade "Air untuk Kehidupan" dari tahun 2005 hingga 2015.

Untuk mengkoordinasikan upaya entitas PBB dan organisasi internasional yang menangani masalah air dan sanitasi, Chief Executives Board (CEB) Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tahun 2003 UN-Water - mekanisme koordinasi

antar-badan PBB untuk semua air tawar dan sanitasi yang terkait. masalah.

Pada 2008, Tahun Sanitasi Internasional dideklarasikan dan pada 28 Juli 2010 hak asasi manusia atas air dan sanitasi secara eksplisit diakui oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 64/292.

Pada Desember 2016, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan suara bulat mengadopsi resolusi "Dekade Aksi Internasional - Air untuk Pembangunan Berkelanjutan" (2018-2028) untuk mendukung pencapaian SDG 6 dan target terkait air lainnya, dan pada 21 Desember 2020, resolusi pada "Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tinjauan Komprehensif Jangka Menengah tentang Pelaksanaan Tujuan Dekade Aksi Internasional," Air untuk Pembangunan Berkelanjutan ", 2018-2028", Konferensi PBB pertama tentang air sejak 1977. Air juga ada di inti dari perjanjian penting seperti Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Perjanjian Paris 2015.

Oleh karena itu, memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua telah lama menjadi topik di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prioritasnya sekarang adalah mengubah visi baru SDG terkait air dari Agenda 2030 menjadi kenyataan, melalui kepemimpinan nasional dan kemitraan global. .

Tujuan Ketujuh ENERGI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pada 2015, Majelis Umum PBB mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mencakup tujuan yang berdedikasi dan berdiri sendiri di bidang energi, SDG 7, menyerukan untuk "memastikan akses ke terjangkau, andal, berkelanjutan dan energi

modern untuk semua ". Energi terletak di jantung Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua akan membuka dunia baru peluang bagi milyaran orang melalui peluang ekonomi dan pekerjaan baru, pemberdayaan perempuan, anak-anak dan pemuda, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, masyarakat yang lebih berkelanjutan, adil dan inklusif, dan perlindungan yang lebih besar dari, dan ketahanan terhadap, perubahan iklim.

Pada Forum Politik Tingkat Tinggi 2018, SDG 7 ditinjau secara mendalam dengan tema keseluruhan "Transformasi menuju masyarakat yang berkelanjutan dan tangguh". Acara sampingan terkait energi diadakan di pinggiran HLPF dan disponsori oleh Negara-negara Anggota, sistem PBB dan organisasi antar pemerintah lainnya, Kelompok Utama dan pemangku kepentingan terakreditasi lainnya.

Hingga saat ini Indonesia telah memiliki prioritas pembangunan, sesuai dengan program dan prioritas dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019. Terdapat konvergensi dan divergensi antara SDGs dan Nawacita. Dalam penelitian ini SDG's disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang telah tertuang dalam rencana aksi pembangunan yang terdiri atas :

1. Keberlanjutan agenda **pembangunan manusia** seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis.
2. Peningkatan **kesejahteraan dan pendidikan** sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan

serta reformasi agraria.

3. Pembangunan **ekonomi berkelanjutan** merupakan isu baru yang akandifokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
4. Akses **energi** yang terjangkau, sebagai fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan.
5. **Perubahan iklim**, di mana Indonesia telah secara sukarela menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

BAB 3

Konsep Pemberdayaan SDM & Pemberdayaan Masyarakat

Konsep Pemberdayaan Sumberdaya Manusia

Wing (1996) menggunakan istilah pemberdayaan pribadi yang berhubungan dengan konsultan bisnis dan melihatnya sebagai alat analitis sendiri yang kuat sehingga mereka bisa memahami dan mengarahkan kecondongan pribadi mereka, perbedaan opini, dan pengalaman dengan para klien agar berhasil dalam mengubah upaya mereka. Apapun definisi yang dipakai untuk kata pemberdayaan ini, tujuan akhirnya adalah mengembangkan kinerja dan potensi individu serta organisasi (Long, 1996).

Masalah pokok di bidang pemberdayaan sumber daya manusia ini adalah karena istilah pemberdayaan yang dihubungkan dengan penyerahan kembali kekuasaan/wewenang, tapi dalam prakteknya pemberdayaan biasanya dilihat sebagai bentuk keterlibatan sumber daya manusia yang direncanakan oleh manajemen dengan tujuan membangkitkan komitmen dan meningkatkan kontribusi sumber daya manusia pada organisasi. Orientasinya mengarah pada *individualist* dan bukan *collectivist*, contohnya pemberdayaan didasarkan pada tiap pekerja atau kelompok kerja dan bukan pada kelompok kerja yang lebih besar seperti serikat kerja. Ini mencakup keterlibatan dalam praktek kerja secara langsung. Partisipasi finansial dan partisipasi representatif bukan bagian dari agenda, dengan mengubah perbedaan bentuknya menjadi bentuk lain yang terkait dengan keterlibatan sumber daya manusia, partisipasi sumber daya manusia dan demokrasi di sektor industri. Karena itu, harus ada perbedaan antara inisiatif pemberdayaan seperti yang

didefinisikan di atas dan inisiatif yang mengarah pada upaya pemberdayaan.

Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat menentukan kinerja suatu organisasi dan individu, untuk itu diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menciptakan kultur pemberdayaan. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan atau disebut pula pembinaan sumber daya manusia. Sedangkan menciptakan kultur pemberdayaan adalah dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi upaya pemberdayaan (Erstad, 1997). Selanjutnya Erstad (1997) menjelaskan organisasi yang ingin membangkitkan kultur pemberdayaan harus mencari cara pembentukan sistem dan proses yang tidak membatasi sumber daya manusia. Dengan berkonsentrasi pada perilaku apa yang dianggap optimal bagi sumber daya manusia dan apa yang sudah mereka kerjakan dengan baik, manajemen dapat beradaptasi, mengembangkan dan mengubah struktur organisasi untuk menghasilkan perilaku yang lebih baik: sumber daya manusia mulai mencurahkan perhatiannya untuk belajar, tumbuh, dan berkembang; sumber daya manusia dapat mengurus dirinya sendiri; kepemimpinan tidak hanya ada di tingkat atas; tingkat kepercayaan yang tinggi antara manajemen dan sumber daya manusia serta antar sumber daya manusia; partisipasi sumber daya manusia dalam pembuatan keputusan; komunikasi yang terjalin dengan baik secara vertikal maupun horizontal; dan sumber daya manusia dapat mengatasi konflik dengan pihak manajemen dan mendapatkan resolusi yang efektif dan efisien.

Dalam model dari Denison (Mobley et al. 2005), pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu

indikator dalam model budaya organisasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Stewart (1998) bahwa memberdayakan orang lain pada hakekatnya merupakan perubahan budaya. Pemberdayaan tidak akan jalan jika seluruh budaya organisasi tidak berubah secara mendasar (Stewart, 1998).

Pemberdayaan membantu menghilangkan kondisi yang menyebabkan ketidak berdayaan sambil meningkatkan *self-efficacy*, yaitu perasaan dalam diri seseorang bahwa dia mampu menyelesaikan pekerjaan apa saja yang diberikan kepadanya (Newstrom & Davis, 1997). Jadi pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab (Wibowo, 2007).

Pemberdayaan Masyarakat dan Teknisnya

Secara umum pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia & warga negara. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (independent) dan mandiri (Oakley, 1991; dan Fatterman, 1996). Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pandangan UNICEF (1997) pendekatannya bertumpu pada risiko di keluarga, kebutuhan dan hak-haknya dalam rangka menentukan prioritas dan strategi pembangunan.

Memberdayakan masyarakat bukan sekedar “memobilisasi masyarakat untuk ambil bagian”; melainkan untuk “mengejar jaringan kemitraan”. Fokus pemberdayaan masyarakat berorientasi pada keluarga. Pemberdayaan ini berisikan: (1) membangun kapasitas internal keluarga (pengetahuan, keterampilan, sikap, dan sebagainya); (2) mengubah kepercayaan dan perilaku yang menghambat kemajuan (perkawinan usia dini, pelanggaran disiplin, dan kriminalitas); dan (3) memperkuat nilai-nilai tradisional yang kondusif untuk pembangunan (gootong royong, rasa hormat), dan penyaringan nilai-nilai baru.

Strategi pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta membangun kemitraan perlu didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Analisis yang jelas tentang situasi masyarakat (yang sangat heterogen) yang akan diberdayakan.
2. Pemilihan kelompok sasaran yang seksama; dengan mereka akan dikembangkan kemitraan untuk menjamin tidak memilih mereka yang telah diberdayakan.
3. Mekanisme dibentuk untuk menjamin keterlibatan anggota masyarakat yang terisih (kelompok marjinal), misalnya kuota keanggotaan wanita dalam lembaga pembangunan setempat.
4. Unit-unit organisasi lokal yang ada disesuaikan untuk memudahhi agar ikut dalam proses penciptaan struktur-struktur baru.

Kegiatan pembangunan yang bersifat multidimensional yang mengakibatkan adanya interdependensi antar aktor kunci menuntut adanya kemitraan yang kuat dan harus didasari rasa saling percaya dan saling menguatkan. Pola kemitraan hanya bisa diraih dengan berdayanya elemen dasar individu, keluarga, dan masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan upaya membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Proses pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan kewenangan (power), aksesibilitas terhadap sumberdaya dan lingkungan yang akomodatif (Zimmerman, 1996:18, Ressa, 1991:42).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan secara partisipatif kiranya sangat sesuai dan dapat dipakai untuk mengantisipasi timbulnya perubahan-perubahan dalam masyarakat beserta lingkungan strategisnya. Sebagai konsep dasar pembangunan partisipatif adalah melakukan upaya pembangunan atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat mampu untuk berkembang dan mengatasi permasalahannya sendiri secara mandiri, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Menurut Kumar (2002) bahwa keberdayaan adalah kondisi dinamik yang merefleksikan kemampuan suatu sistem sosial dalam mewujudkan tujuan atau nilai-nilai yang diacunya (diidamkannya) (Kumar S., 2002:21). Sehubungan dengan itu maka pemberdayaan berarti usaha (program, proses) untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuan secara mandiri. Sebagai suatu kondisi, keberdayaan adalah kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya secara efektif dan efisien dalam koridor norma-norma (etik, sosial, politik, hukum, agama) yang menjadi acuannya.

Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan & Teknisnya

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai penggerak modal sosial untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah kelurahan/desa sasaran, mempunyai tugas – tugas pokok merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada di wilayahnya, memfasilitasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan demokratis. Tujuan besar dari seluruh upaya ini adalah penurunan angka kemiskinan di kelurahan/desa.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam pelaksanaan tugasnya BKM dibantu oleh perangkat organisasi yang berupa unit – unit pengelola. Oleh karena itu fungsi pelaksanaan kegiatan akan dilakukan oleh Unit – unit pengelola; UPK (Unit Pengelola Keuangan) sebagai unit pengelola kegiatan lingkungan; UPS sebagai unit pengelola kegiatan sosial dan UPK sebagai pengelola unit kegiatan ekonomi.

BKM bukanlah sebagai pelaksana program, akan tetapi berfungsi sebagai penggerak dan pengendali agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan. Dengan demikian tugas pokok BKM dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal – hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan*
- 2. Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan Pronangkis*
- 3. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan – keputusan yang diambil*
- 4. Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP UP*
- 5. Mengawal terlembaganya nilai – nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan*

6. *Mewakili masyarakat untuk memberikan kontrol dan masukan terhadap kebijakan pemerintah*
7. *Membangun kerjasama dengan pihak luar*

Aturan apa yang harus dikembangkan?

Aturan yang dikembangkan oleh BKM tentu saja yang berhubungan dengan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. Di bawah ini disarankan beberapa aturan yang sebaiknya disusun dan dikembangkan yaitu :

- Mekanisme penentuan penerima manfaat langsung termasuk keseimbangan penerima manfaat antara laki – laki dan perempuan. Aturan ini penting dikembangkan agar tidak terjadi salah sasaran, dan tidak ada rebutan kepentingan di antara warga masyarakat, sehingga penerima manfaat dapat dijamin benar – benar warga miskin yang paling membutuhkan.
- Merumuskan mekanisme pengajuan usulan kegiatan dari KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Aturan ini diperlukan agar KSM dalam menyusun usulan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan dana, akan tetapi benar – benar untuk menanggulangi permasalahan kemiskinannya secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat menjadi dasar untuk pertimbangan KSM yang menjadi prioritas, sehingga tidak ada ‘hak – hak istimewa’ bagi KSM tertentu yang tidak diperlukan.
- Merumuskan mekanisme kontrol sosial (monitoring evaluasi partisipatif termasuk PPM). Kontrol sosial diperlukan karena penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan merupakan milik masyarakat, dimana BKM dan UP sebagai penggerak yang menjalankan amanah masyarakat. Artinya masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui semua kegiatan yang

dilakukan oleh BKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada BKM. Kontrol sosial dari masyarakat juga merupakan wujud kepedulian warga untuk mengingatkan BKM dan menjaga proses penanggulangan kemiskinan di wilayahnya berjalan seperti yang diharapkan. Dalam hal ini aturan menyangkut siapa yang melaksanakan monitoring, bagaimana caranya termasuk media yang digunakan, kepada siapa harus dilaporkan, alat bantu (instrumen) yang digunakan, bagaimana tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi dan sebagainya.

- Merumuskan mekanisme perencanaan partisipatif (termasuk di dalamnya peningkatan partisipasi perempuan). Mekanisme perencanaan partisipatif harus menjamin keterlibatan warga masyarakat termasuk kaum perempuan, mulai dari proses identifikasi kebutuhan (refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya); perencanaan (penyusunan PJM pronangkis), pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Tahapan – tahapan kegiatan dalam keseluruhan proses ini perlu diatur secara tegas dan menjadi kesepakatan warga, agar proses ini berjalan secara berkelanjutan.
- Merumuskan mekanisme pinjaman bergulir. Dalam hal pinjaman bergulir, harus dijamin bahwa yang mendapatkan pinjaman adalah warga miskin yang ada dalam PS 2. Aturan lain yang perlu disepakati juga mengenai besarnya pinjaman maksimal dari setiap kelompok, besarnya bunga pinjaman, waktu pengembalian, sistem sanksi dan lainnya. Waktu pengembalian harus mempertimbangkan jenis usaha yang dilakukan, misalnya usaha pertanian waktu pengembalian harus disesuaikan dengan masa tanam, untuk kasus nelayan

atau pedagang bisa berbeda. Dalam menerapkan sanksi juga harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, bagaimana untuk kasus usaha yang bangkrut, untuk kasus usaha yang macet harus dibedakan dengan kasus dimana anggota KSM yang 'nakal' dan tidak mau mengembalikan uang pinjaman.

- Merumuskan mekanisme pertanggungjawaban KSM, UP – UP dan BKM. Semua pelaku yang terlibat dalam proses penanggulangan kemiskinan di kelurahan/desa, baik itu panitia, KSM, UP dan BKM mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan pengelolaan keuangannya. Aturan pertanggungjawaban harus dibuat agar dapat dijamin semua pihak mempunyai komitmen untuk melaksanakan proses ini dan mendorong penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang benar. Hal – hal yang perlu diatur menyangkut kapan harus dilakukan, bagaimana caranya, apa saja yang harus dipertanggungjawabkan dan sebagainya.
- Merumuskan aturan keuangan internal BKM. Biaya operasional BKM harus diatur peruntukannya secara tertulis, agar masyarakat mengetahui dan menjadi dasar pengeluaran dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh BKM. Aturan keuangan internal BKM juga untuk meminimalkan konflik di antara anggota BKM dalam penggunaan keuangan sehingga tidak ada yang menjadi istimewa dan sewenang – wenang dalam menggunakan dana yang ada.

Dalam pelaksanaannya pengembangan aturan ini melibatkan masyarakat, walaupun keputusan akhir tetap diambil oleh BKM.

8. Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan Pronangkis

Masyarakat harus diajak untuk menggagas cita – cita mengenai kelurahan/desa yang diharapkan di masa yang akan datang. Dalam penanggulangan kemiskinan, tentu ini merupakan tugas BKM. Untuk mencapai cita – cita tersebut dibutuhkan rencana strategis dan program jangka panjang, menengah dan program tahunan.

9. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan – keputusan yang diambil

Aturan – aturan dan program yang telah dikembangkan bersama, harus dipastikan dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Untuk itu BKM harus melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan PJM pronangkis yang diimplementasikan oleh UP – UP, KSM dan panitia dan pelaksanaan aturan – aturan lainnya.

10. Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP (Unit Pengelolah)

- Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat
- Membangun transparansi

Semua kegiatan verifikasi dan hasilnya harus diinformasikan kepada warga melalui media warga atau media kelompok, sehingga semua warga mendapatkan haknya untuk mengetahui keseluruhan kegiatan. Transparansi juga bisa menghilangkan syak wasangka yang tidak benar

baik kepada BKM, KSM maupun UP. Dengan cara ini masyarakat juga belajar untuk menjunjung nilai – nilai kejujuran dan saling menghargai hak – hak orang lain. Apabila masyarakat mengetahui bahwa amanah yang diemban oleh BKM betul – betul digunakan untuk penanggulangan kemiskinan, kepercayaan akan meningkat dan keterlibatan warga akan makin besar baik dalam bentuk kegiatan maupun dana.

- Membangun akuntabilitas

BKM harus mendorong UP dan KSM/panitia untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatannya. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah dikembangkan oleh BKM dan warga masyarakat.

- Melaksanakan rapat anggota tahunan

Rapat anggota tahunan, merupakan musyawarah warga yang membahas laporan pertanggungjawaban keuangan, realisasi program kerja, rancana program kerja ke depan, review anggaran rumah tangga dan masalah lain yang menyangkut penanggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan/desa.

- Memastikan adanya kontrol sosial dari masyarakat terhadap kebijakan, keputusan dan kegiatan UP UP, termasuk penggunaan keuangan

11. Mengawal terlembaganya nilai – nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan

- Bekerjasama dengan UP dan relawan untuk mendorong kegiatan kolektif masyarakat. Adanya kegiatan bersama (kolektif) untuk menanggulangi kemiskinan merupakan wujud dari kepedulian masyarakat. Dengan kegiatan ini diharapkan terjadi saling menghargai, saling memperhatikan, saling mengasihi antara warga yang non miskin dengan warga miskin. BKM dan UP bisa mendorong kegiatan kolektif ini yang dengan menyelenggarakan kegiatan yang memerlukan keterlibatan banyak pihak seperti kerjabakti, pembangunan jalan, pembangunan rumah keluarga miskin, dan sebagainya.
- Mendorong kepedulian warga dalam bentuk penggalangan dana publik. Wujud kepedulian, bukan hanya di dalam gerakan kolektif saja akan tetapi bisa diaplikasikan dalam bentuk sumbangan dana agar PJM pronangkis yang sudah disusun bisa dilaksanakan. Penggalangan dana publik bisa dilakukan lewat kegiatan bazar amal, beras jimpitan, dompet penanggulangan kemiskinan, dan sebagainya.
- Memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk menjadi relawan. Kerelawanan merupakan wujud dari jatidiri manusia untuk mendayagunakan kemampuannya bagi kesejahteraan masyarakat. Artinya kerelawanan mempunyai nilai kepedulian, keikhlasan, yang tinggi. BKM yang mengawal

pelembagaan nilai – nilai mempunyai kewajiban untuk mendorong warga masyarakat mewujudkan jati dirinya sebagai manusia, dengan memberikan kesempatan terlibat dan menjadi mitra bagi BKM dalam menggerakkan penanggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan/desa.

12. Mewakili masyarakat untuk memberikan kontrol dan masukan terhadap kebijakan pemerintah.

Sebagai wakil masyarakat, BKM mempunyai tugas untuk mendorong kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan mengontrol pelaksanaan kebijakan – kebijakan yang sudah dikeluarkan. Masukan bisa diberikan dalam musrenbang, bersama – sama dengan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), mengadakan dengar pendapat dengan DPR bersama BKM lain yang tergabung dalam forum BKM dan sebagainya.

13. Membangun kerjasama dengan pihak luar

- Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan/desa, kecamatan dan Pemkot/Kab
- Membangun kerjasama dengan pihak lain. Dalam menggerakkan penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan rencana yang sudah disusun dalam PJM pronangkis, BKM tidak mungkin bekerja sendirian tanpa bekerjasama dengan pihak luar. Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang tidak sederhana karena masalah yang

kompleks dan disebabkan banyak faktor, sehingga kerjasama antara berbagai pihak menjadi penting untuk dilakukan. BKM bisa bekerjasama dengan pihak luar dalam hal penggalangan sumberdana maupun dalam bentuk program.

Tugas UPK (Unit Pengelolah Keuangan)

- Bekerjasama dengan BKM untuk menjamin terlaksananya PJM Pronangkis bidang ekonomi
- Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM
- Monitoring dan evaluasi kegiatan – kegiatan KSM ekonomi
- Mengelola keuangan pinjaman bergulir dan mengadministrasikannya
- Menjalin kemitraan dengan pihak – pihak lain

Dalam melaksanakan tugasnya, UPK diharapkan bisa melibatkan relawan – relawan untuk memfasilitasi KSM dan kegiatan – kegiatan khusus misal pemasaran, pelatihan keterampilan pembukuan dan sebagainya yang tergabung dalam gugus tugas berdasarkan permasalahan yang dibahas. Relawan – relawan ini juga bisa dilibatkan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan yang sudah direncanakan.

Tugas UPL (Unit Pengelola Lingkungan)

- Bekerjasama dengan BKM untuk menjamin terlaksananya PJM Nangkis bidang lingkungan
- Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia

- Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan bidang lingkungan
- Menjalin kemitraan dengan pihak – pihak luar

Dalam melaksanakan tugasnya, UPK diharapkan bisa melibatkan relawan – relawan untuk memfasilitasi KSM dan kegiatan – kegiatan khusus misal air bersih, sarana kesehatan dan pendidikan, lingkungan permukiman dan sebagainya yang tergabung dalam gugus tugas berdasarkan permasalahan yang dibahas. Relawan – relawan ini juga bisa dilibatkan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan yang sudah direncanakan.

Tugas UPS (Unit Pengelola Sosial)

- Bekerjasama dengan BKM untuk menjamin terlaksananya PJM Pronangkis bidang sosial
- Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia
- Mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia bidang sosial
- Mendorong dan memfasilitasi Komunitas Belajar Kelurahan
- Mengembangkan media warga
- Menjalin kemitraan dengan pihak lain

Dalam melaksanakan tugasnya, UPK diharapkan bisa melibatkan relawan – relawan untuk memfasilitasi KSM dan kegiatan – kegiatan khusus misal kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, media warga, dan sebagainya yang tergabung dalam gugus tugas berdasarkan permasalahan yang dibahas. Relawan – relawan ini juga bisa dilibatkan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan yang sudah direncanakan.

BKM, UP dan relawan – relawan bisa secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan kemiskinan yang terjadi di kelurahan/desa secara rutin. Kegiatan tersebut dapat diwadahi dalam Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), yang dalam pelaksanaannya bisa dikoordinir oleh UPS. Dengan demikian pembahasan permasalahan kemiskinan secara menerus dilakukan sejalan dengan itu upaya pemecahannya akan terus dilakukan.

Apabila hal di atas dapat dijalankan, BKM betul – betul berfungsi sebagai motor penggerak (sumbu yang menggerakkan bagian – bagian lain), bukan menjadi pelaksana yang bergerak sendiri. Dengan demikian diharapkan kegiatan penanggulangan kemiskinan bukan lagi merupakan kegiatan BKM akan tetapi merupakan gerakan kolektif seluruh masyarakat.

B. Beberapa Pandangan Tentang Konsep Pemberdayaan dan Kemiskinan

Suyanto (2001:19) memberikan argumentasi tentang masalah kemiskinan, selama ini masih terdapat kesimpangsiuran diantara pendapat para ahli tentang kemiskinan. Beberapa ahli mendefinisikan kemiskinan lebih pada aspek ekonomi. Menurut Suyanto kemiskinan bukanlah semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan orang atau keluarga misJdn untuk mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.

Menurut Namba (2003:1-4) dan Sukartawi (1997:1-14), untuk menekan kemiskinan dapat dilakukan berbagai program

penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah, swasta, dan LSM. Beragam program sektoral telah diluncurkan oleh pemerintah, seperti: IDT yang pertama kali diumumkan secara terbuka, kemudian Dinas memiliki program pengembangan prasarana yang termasuk dalam gugus program 'penanggulangan kemiskinan perkotaan, BKKBN memiliki Takesra/Kukesra dan Raskin, Dinas Sosial memiliki program KUBE dan pemberdayaan masyarakat miskin, Dinas Pertanian memiliki program P4K, dan program lain dengan aneka istilah lain.

C. Kurang Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat

Belum berhasilnya upaya pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan yang |Nah dilaksanakan oleh pemerintah seperti penyediaan kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, , pembangunan sarana dan prasarana umum dan pendampingan, dikarenakan kebijakan 'program yang selama ini dilakukan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat (top down), di mana kebijakan tersebut mempunyai banyak kelemahan yang perlu dikoreksi cara mendasar seperti: (1) Pemberdayaan yang berindikasi KKN (2) Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro (3) Kebijakan yang terpusat (4) Lebih bersifat karikatif (5) Memosisikan masyarakat sebagai obyek (6) Cara pandang kemiskinan yang diorientasikan pada ekonomi (7) Bersifat sektoral (8) Kurang terintegrasi (9) Tidak berkelanjutan atau mengesampingkan faktor/daya dukung lingkungan.

Beberapa hal penting dalam memajukan masyarakat dalam pemberdayaan, yang berorientasi pada aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat atau disebut pemberdayaan berbasis partisipasi. Beberapa hal penting tersebut diantaranya yaitu:

1. Fasilitasi untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat desa melalui kegiatan forum rembuk diskusi reguler yang dilakukan secara keliling antar desa (*rural rountable disscussion*) dengan pemahaman belajar dan pengalaman untuk menjadikan daur program pemberdayaan.
2. Fasilitasi pemetaan partisipatif oleh masyarakat desa sebagai dasar penggalan kebutuhan, permasalahan, potensi sumber daya alam, dan masyarakat desa.
3. Fasilitasi pemahaman dan kemitraan pemerintah desa, BPD dan masyarakat adalah mitra dan sekaligus agen perubahan yang mampu menyusun dan merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Memfasilitasi dan menumbuhkan fasilitator dari desa itu sendiri sebagai agen perubahan dari dalam (PRA) yang memotivasi kegiatan belajar dan karakteristik desa untuk menemukan pola ekonominya sendiri.
5. Memfasilitasi kaum perempuan untuk lebih terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan perkembangan pedesaan.
6. Membuat media warga sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan dan penggunaan anggaran desa.
7. Memanfaatkan sumber potensi desa, mengelola secara berkesinambungan, dan ramah lingkungan.

BAB 4

Konsep Participatory Rural Appraisal (PRA)

Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan Sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat (pedesaan) untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan (Chambers, 1994). Pada intinya PRA adalah sekelompok pendekatan atau metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, serta membuat rencana dan tindakan nyata (Chambers, 1994). Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam metode PRA antara lain adalah: saling belajar dan berbagi pengalaman, keterlibatan semua anggota kelompok dan informasi, orang luar sebagai fasilitator, konsep triangulasi, serta optimalisasi hasil, orientasi praktis dan keberlanjutan program (Rochdyanto, 2000:55).

Metode tersebut dipandang telah memiliki teknis-teknis yang dijabarkan cukup operasional dengan konsep bahwa keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam seluruh kegiatan. Pendekatan PRA memang bercita-cita menjadikan masyarakat menjadi peneliti, perencana, dan pelaksana pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Tekanan aspek penelitian bukan pada validitas data yang diperoleh, namun pada nilai praktis untuk pengembangan program itu sendiri.

Penerapan pendekatan dan teknik PRA dapat memberi peluang yang lebih besar dan lebih terarah untuk melibatkan masyarakat. Selain itu melalui pendekatan PRA akan dapat dicapai kesesuaian dan ketepatan program dengan

kebutuhan masyarakat sehingga keberlanjutan (*sustainability*) program dapat terjamin.

Kata "partisipasi" dan "partisipatoris" merupakan dua kata yang sangat sering digunakan dalam pembangunan. Keduanya memiliki banyak makna yang berbeda. Berbagai kajian, dokumen proyek, dan buku panduan menunjukkan tafsiran yang sangat beragam mengenai arti kata partisipasi. Berikut ini beberapa tafsiran makna partisipasi (FAO, 1989 dalam Mikkelsen, 2001:89) :

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah membuat peka pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosialnya.
5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Participatory Rural Appraisal (PRA) atau Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan (PRA) adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama

menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata. Metode dan pendekatan ini semakin meluas dan diakui kegunaannya ketika paradigma pembangunan berkelanjutan mulai dipakai sebagai landasan pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, manusia ditempatkan sebagai inti dalam proses pembangunan. Manusia dalam proses pembangunan tidak hanya sebagai penonton tetapi mereka harus secara aktif ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan menikmati hasil pembangunan. Metode dan pendekatan yang tampaknya sesuai dengan tuntutan paradigma itu adalah metode dan pendekatan yang partisipatif.

TUJUAN PENERAPAN METODE PRA

Pada intinya PRA adalah sekelompok pendekatan atau metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, serta membuat rencana dan tindakan nyata (Chambers, 1996). Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam metode PRA anatar lain adalah : saling belajar dan berbagi pengalaman, keterlibatan semua anggota kelompok dan informasi, orang luar sebagai fasilitator, konsep triangulasi, serta optimalisasi hasil, orientasi praktis dan keberlanjutan program (Rochdyanto, 2000:55). Metode tersebut dipandang telah memiliki teknis-teknis yang dijabarkan cukup operasional dengan konsep bahwa keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam seluruh kegiatan. Pendekatan PRA memang bercita-cita menjadikan masyarakat menjadi peneliti, perencana, dan pelaksana pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Tekanan aspek penelitian bukan pada

48

validitas data yang diperoleh, namun pada nilai praktis untuk pengembangan program itu sendiri. Penerapan pendekatan dan teknik PRA dapat memberi peluang yang lebih besar dan lebih terarah untuk melibatkan masyarakat. Selain itu melalui pendekatan PRA akan dapat dicapai kesesuaian dan ketepatangunaan program dengan kebutuhan masyarakat sehingga keberlanjutan (sustainability) program dapat terjamin.

PRINSIP-PRINSIP PRA

- 1) Saling belajar dari kesalahan dan berbagi pengalaman dengan masyarakat

Prinsip dasar PRA bahwa PRA adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti bahwa PRA dibangun dari pengakuan serta kepercayaan masyarakat yang meliputi pengetahuan tradisional dan kemampuan masyarakat untuk memecahkan persoalannya sendiri. Prinsip ini merupakan pembalikan dari metode pembelajaran konvensional yang bersifat mengajari masyarakat. Kenyataan membuktikan bahwa dalam perkembangannya pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan yang terjadi, sementara itu pengetahuan modern yang diperkenalkan orang luar tidak juga selalu memecahkan masalah. Oleh karenanya diperlukan ajang dialog di antara keduanya untuk melahirkan sesuatu program yang lebih baik. PRA bukanlah suatu perangkat teknik tunggal yang telah selesai, sempurna, dan pasti benar. Oleh karenanya metode ini selalu harus dikembangkan yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Kesalahan yang dianggap tidak wajar, bisa saja menjadi wajar dalam proses pengembangan PRA. Bukannya kesempurnaan penerapan yang ingin dicapai, namun penerapan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang

ada dan mempelajari kekurangan yang terjadi agar berikutnya menjadi lebih baik. Namun PRA bukan kegiatan coba-coba (trial and error) yang tanpa perhitungan kritis untuk meminimalkan kesalahan.

- 2) Keterlibatan semua anggota kelompok, menghargai perbedaan, dan informal

Masyarakat bukan kumpulan orang yang homogen, namun terdiri dari berbagai individu yang mempunyai masalah dan kepentingan sendiri. Oleh karenanya keterlibatan semua golongan masyarakat adalah sangat penting. Golongan yang paling diperhatikan justru yang paling sedikit memiliki akses dalam kehidupan sosial komunitasnya (miskin, perempuan, anak-anak, dll). Masyarakat heterogen memiliki pandangan pribadi dan golongan yang berbeda. Oleh karenanya semangat untuk saling menghargai perbedaan tersebut adalah penting artinya. Yang terpenting adalah pengorganisasian masalah dan penyusunan prioritas masalah yang akan diputuskan sendiri oleh masyarakat sebagai pemiliknya. Kegiatan PRA dilaksanakan dalam suasana yang luwes, terbuka, tidak memaksa, dan informal. Situasi santai tersebut akan mendorong tumbuhnya hubungan akrab, karena orang luar akan berproses masuk sebagai anggota bukan sebagai tamu asing yang harus disambut secara protokoler. Dengan demikian suasana kekeluargaan akan dapat mendorong kegiatan PRA berjalan dengan baik.

- 3) Orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku

Konsekuensi dari prinsip pertama, peran orang luar hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pelaku, guru, penyuluh, instruktur, dll. Perlu bersikap rendah hati untuk belajar dari

masyarakat dan menempatkannya sebagai nara sumber utama. Bahkan dalam penerapannya, masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Secara ideal sebaiknya penentuan dan penggunaan teknik dan materi hendaknya dikaji bersama, dan seharusnya banyak ditentukan oleh masyarakat.

4) Konsep triangulasi

Untuk bisa mendapatkan informasi yang kedalamannya dapat diandalkan, bisa digunakan konsep triangulasi yang merupakan bentuk pemeriksaan dan pemeriksaan ulang (check and recheck). Triangulasi dilakukan melalui penganekaragaman keanggotaan tim (disiplin ilmu), sumber informasi (latar belakang golongan masyarakat, tempat), dan variasi teknik.

a. Penggunaan variasi dan kombinasi berbagai teknik PRA, yaitu bersama masyarakat bisa diputuskan variasi dan kombinasi teknik PRA yang paling tepat sesuai dengan proses belajar yang diinginkan dan cakupan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan program.

b. Menggali berbagai jenis dan sumber informasi, dengan mengusahakan kebenaran data dan informasi (terutama data sekunder) harus dikaji ulang dan sumbernya dengan menggunakan teknik lain.

c. Tim PRA yang multidisipliner, dengan maksud sudut pandang yang berbeda dari anggota tim akan memberi gambaran yang lebih menyeluruh terhadap penggalan informasi dan memberi pengamatan mendalam dari berbagai sisi.

5) Optimalisasi hasil

Pelaksanaan PRA memerlukan waktu, tenaga narasumber, pelaksana yang terampil, partisipasi masyarakat yang

semuanya terkait dengan dana. Untuk itu optimalisasi hasil dengan pilihan yang menguntungkan mutlak harus dipertimbangkan. Oleh karenanya kuantitas dan akurasi informasi sangat diperlukan agar jangan sampai kegiatan yang berskala besar namun biaya yang tersedia tidak cukup.

6) Berorientasi praktis

Orientasi PRA adalah pemecahan masalah dan pengembangan program. Dengan demikian dibutuhkan penggalan informasi yang tepat dan benar agar perkiraan yang tepat akan lebih baik daripada kesimpulan yang pasti tetapi salah, atau lebih baik mencapai perkiraan yang hampir salah daripada kesimpulan yang hampir benar.

7) Keberlanjutan program

Masalah dan kepentingan masyarakat selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Karenanya, pengenalan masyarakat bukan usaha yang sekali kemudian selesai, namun merupakan usaha yang berlanjut. Bagaimanapun juga program yang mereka kembangkan dapat dipenuhi dari prinsip dasar PRA yang digerakkan dari potensi masyarakat.

8) Mengutamakan yang terabaikan

Prinsip ini dimaksudkan agar masyarakat yang terabaikan dapat memperoleh kesempatan untuk berperan dan mendapat manfaat dalam kegiatan program pembangunan. Keberpihakan pada pihak atau golongan masyarakat yang terabaikan bukan berarti bahwa golongan masyarakat lainnya (elite masyarakat) perlu mendapat giliran untuk diabaikan atau tidak diikutsertakan. Keberpihakan ini lebih pada upaya untuk mencapai keseimbangan perlakuan terhadap berbagai golongan dan lapisan yang ada di masyarakat, dengan

mengutamakan golongan paling miskin agar kehidupannya dapat meningkat.

9) Pemberdayaan (Penguatan) masyarakat

Kemampuan masyarakat ditingkatkan melalui proses pengkajian keadaan, pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, peilaian dan koreksi terhadap kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian masyarakat memiliki akses peluang dan kesempatan) serta memiliki kemampuan memberikan keputusan dan memilih berbagai keadaan yang terjadi. Dengan demikian mereka dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan 'orang luar'.

10) Santai dan informal

Penyelenggaraan kegiatan PRA bersifat luwes, tidak memaksa, dan informal sehingga antara orang luar dan masyarakat setempat terjalin hubungan yang akrab, orang luar akan berproses masuk sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian kedatangan orang luar tidak perlu disambut atau dijamu secara adat oleh masyarakat dan tokohnya maupun oleh pemerintah setempat. Orang luar yang masuk harus memperhatikan jadwal atau waktu kegiatan masyarakat, sehingga penerapan PRA tidak mengganggu kegiatan rutin masyarakat.

11) Keterbukaan

PRA sebagai metode dan perangkat teknik pendekatan kepada masyarakat masih belum sempurna, dan belum selesai. Berbagai teknik penerapannya di dalam praktik masih terus dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu berbagai pengalaman penerapan tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan pemi kiran untuk memperbaiki konsep dan pemikiran serta dalam merancang teknik-teknik

baru sehingga sangat berguna dalam memperkaya metode ini.

STRUKTUR PROGRAM

Karena tujuan penerapan metode PRA adalah pengembangan program bersama masyarakat, penerapannya perlu senantiasa mengacu pada siklus pengembangan program. Gambaran umum siklus tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut :

- a. Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi, dengan maksud untuk menggali informasi tentang keberadaan lingkungan dan masyarakat secara umum.
- b. Perumusan masalah dan penetapan prioritas guna memperoleh rumusan atas dasar masalah dan potensi setempat.
- c. Identifikasi alternatif pemecahan masalah atau pengembangan gagasan guna membahas berbagai kemungkinan pemecahan masalah melalui urun rembug masyarakat.
- d. Pemilihan alternatif pemecahan yang paling tepat sesuai dengan kemampuan masyarakat dan sumber daya yang tersedia dalam kaitannya dengan swadaya.
- e. Perencanaan penerapan gagasan dengan pemecahan masalah tersebut secara konkrit agar implementasinya dapat secara mudah dipantau.
- f. Penyajian rencana kegiatan guna mendapatkan masukan untuk penyempurnaannya di tingkat yang lebih besar.
- g. Pelaksanaan dan pengorganisasian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masyarakat.
- h. Pemantauan dan pengarahan kegiatan untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun.

- i. Evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk melihat hasil sesuai yang diharapkan, masalah yang telah terpecahkan, munculnya masalah lanjutan, dll.

PERMASALAHAN PRA

Meningkatnya secara cepat popularitas PRA dikhawatirkan menyebabkan sedemikian terburu-burunya menerima gagasan ini tanpa pemahaman yang cukup mendasar akan prinsip dasar yang ada yang kemudian diikuti dengan harapan yang terlalu tinggi akan kemampuan PRA. Oleh karenanya beberapa masalah yang timbul akibat merebaknya penggunaan metode PRA adalah :

- a. Permintaan melampaui kemampuan akibat metode ini dilatihkan dalam forum yang formal tanpa cukup kesempatan untuk menghayati dan mendalami prinsip yang mendasarinya.
- b. Kehilangan tujuan dan kedangkalan hasil akibat penerapan yang serampangan di lapangan tanpa tujuan yang jelas.
- c. Kembali menyuluh akibat petugas tidak siap untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat.
- d. Menjadi penganut fanatik karena tidak munculnya improvisasi dan variasi petugas untuk menggali lebih dalam permasalahan di masyarakat.
- e. Mengatasnamakan PRA untuk kegiatan yang sepotong-potong di luar konteks program pengembangan masyarakat.
- f. Terpatok waktu akibat program yang berorientasi pada target (teknis, administratif).
- g. Kerutinan yang dapat membuat kegiatan tidak hidup lagi sehingga terjebak dalam pekerjaan yang rutin dan membosankan.

TEKNIK-TEKNIK PRA

Dalam perkembangannya telah banyak dikembangkan beberapa teknik PRA yang pada intinya merupakan bentuk implementasi dari metode PRA. Sudah barang tentu teknik-teknik yang dikembangkan tersebut disesuaikan dengan maksud dan tujuan penerapan metode PRA sendiri, serta semestinya tidak menutup kemungkinan atau bahkan dapat disebutkan mengharuskan adanya improvisasi dan modifikasi terhadap metode PRA itu sendiri.

Beberapa teknik penerapan PRA anatar lain :

- (a) Penelusuran Alur Sejarah,
- (b) Penelusuran Kebutuhan Pembangunan,
- (c) Analisis Mata Pencaharian,
- (d) Penyusunan Rencana Kegiatan,
- (e) Focus Group Discussion,
- (f) Pemetaan, dll.

BAB 4

RANCANGAN CAPAIAN SDG'S MELALUI PEMBERDAYAAN

Pendekatan / Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dikombinasi dengan eksplorasi konfirmatory. Adapun, variabel-variabel penelitian diturunkan dari konsep *Empowerment* (Pemberdayaan Sumber Manusia), *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, dan empat dimensi konsep SDG's yang dapat menjadi dasar penentuan skema pengelolaan pemberdayaan yang kompetitif dan *sustainable*.

Penelitian ini dirancang untuk tiga tahap penelitian setiap tahap adalah satu tahun anggaran penelitian. Pada, tahap 1, setelah mencermati model-model pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya, tahap pertama atau tahun pertama dilakukan eksplorasi terhadap penanggulangan kemiskinan baik yang berbasis PRA maupun yang tidak. Pemberdayaan lebih diarahkan pada partisipasi Pegawai Pemerintahan Kota Batu dalam program-program penanggulangan kemiskinan, dengan menerapkan SDG's.

Tahap kedua atau tahun kedua penelitian ini lebih banyak menggali model-model implementatif program penanggulangan kemiskinan di Masyarakat, terutama bagi program-program yang sudah dilakukan maupun yang sedang dilakukan. Diharapkan penelitian di tahun kedua ini bisa memperoleh model yang tepat bagi pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan yang disesuaikan dengan pencapaian tujuan SDG's.

Tahap Ketiga, Berdasarkan hasil penelitian tahap 1 dan tahap 2, diharapkan sudah ada model baru dalam pendekatan penanggulangan kemiskinan yang diselaraskan dengan tujuan

SDG's yang berbasis PRA dan kebijakan lokal, hingga model siap dideseminasikan.

Penelitian ini menginduk pada bidang Pemberdayaan Masyarakat, maka pada tahap ketiga, target temuan hasil penelitian, dapat mendukung Renstra penelitian Umner Malang, yang dilanjutkan sebagai dasar implementasi.

BAB V

HASIL PENELITIAN EMPIRIS

Analisis Statistik Deskriptif

Persepsi subyek penelitian responden dapat dilihat pada hasil analisis deskriptif pada tabel (distribusi frekuensi). Variabel laten/konstruk yang diteliti terdiri dari: Pemberdayaan SDM, *Participatory Rural Appraisal*, dan Capaian *SDG's*. Distribusi frekuensi variabel diperotek dari hasil tabulasi skor jawaban responden. Adapun dasar interpretasi skor item dalam variabel penelitian adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Dasar Interpretasi Skor Indikator Dalam Variabel Penelitian

No.	Nilai Skor	Interpretasi
1.	$0 < NS \leq 1$	Berada pada daerah sangat negatif
2.	$1 < NS \leq 2$	Berada pada daerah negatif
3.	$2 < NS \leq 3$	Berada pada daerah tengah-tengah
4.	$3 < NS \leq 4$	Berada pada daerah positif
5.	$4 < NS \leq 5$	Berada pada daerah sangat positif

Sumber: Arikunto, 2002.

5.1.1. Deskripsi Variabel Laten / Konstruk Pemberdayaan SDM (X1)

Variabel pemberdayaan SDM/masyarakat dalam penelitian ini merupakan proses memampukan sumber daya manusia dalam mengambil keputusan dan tindakan terhadap anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sebagai representasi warga masyarakat dalam memberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan pelaksanaan program kerja. Penelitian ini menggunakan empat indikator pemberdayaan

SDM sesuai dengan pendapat Rose et al. (2006), Jarrar (2002), Lashley (1999, 2002) dan Mobley (2005), yaitu partisipasi, inisiatif, komitmen, dan tanggung jawab. Item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain indikator partisipasi ada dua item yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan, indikator inisiatif ada dua item kuesioner yaitu pengambilan keputusan yang mempertimbangkan inisiatif pegawai SKPD, dan penghargaan terhadap inisiatif. Indikator komitmen terdapat dua dimensi yaitu komitmen terhadap pencapaian SDG's dan komitmen terhadap pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan penanggulangan kemiskinan. Indikator tanggung jawab juga mempunyai dua item yaitu tanggung jawab terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan dan keleluasaan tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan SDG's. variabel pemberdayaan SDM sebagaimana dapat dilihat pada label di bawah ini.

Tabel 5.2
Deskripsi Variabel Pemberdayaan SDM (X1)

Indikator	Skor Jawaban Responden										Mean
	1		2		3		4		5		
	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%	
X1.1.1	0	0	0	0	17	9.5	96	53.6	66	36.9	4.27
X1.1.2	0	0	2	1.1	25	14.0	85	47.5	67	34.4	4.21
Mean Indikator											4.24
X1.2.1	0	0	0	0	11	6.1	100	55.9	68	38.0	4.32
X1.2.2	0	0	4	2.2	56	31.3	80	44.7	39	21.8	3.86
Mean Indikator											4.09
X1.3.1	0	0	1	0.6	40	22.3	87	48.6	51	28.5	4.05
X1.3.2	0	0	0	0	5	2.8	110	61.5	64	35.8	4.33
Mean Indikator											4.09
X1.4.1	0	0	1	0.6	17	9.5	79	44.1	82	45.8	4.35
X1.4.2	0	0	4	2.2	21	11.7	86	48.0	68	38.0	4.22
Mean Indikator											4.29
Mean Variabel											4.18

Sumber: Data Primer diolah

Dari hasil analisis deskripsi kuantitatif dengan menggunakan analisis frekuensi SPSS, dapat diketahui bahwa dari 179 orang responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap variabel Pemberdayaan SDM berada pada daerah positif dengan rata-rata skor 4,18 dan hal ini dinyatakan baik. Indikator yang memperoleh respon yang paling tinggi adalah tanggung jawab yaitu dari item kemauan yang kuat untuk bertanggungjawab terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan , dengan rata-rata skor 4,35. Hal ini menunjukkan bahwa anggota aparat pemerintahan daerah di kota Batu

mempunyai tanggung jawab yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam pencapaian SDG's. Hal ini diperkuat juga dengan pilihan responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebesar 89,9 %. Disusul kemudian oleh keluasan tanggung jawab aparat pemerintahan daerah terhadap pencapaian tujuan SDG's secara bersama-sama dengan rata-rata skor 4,22, sedangkan yang memilih setuju dan sangat setuju sebesar 86,0 %. hal ini menunjukkan bahwa aparat pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap perencanaan dan penyelesaian kegiatan penanggulangan kemiskinan. Item kuesioner pemberdayaan SDM selanjutnya adalah kemauan yang kuat untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD dengan rata-rata skor 4,07. Sebanyak 84,4 % menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata aparat pemerintahan daerah Kota Batu mempunyai kemauan yang kuat untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Batu. Selanjutnya adalah keluasan tanggung jawab) dengan rata-rata skor 4,05 dan 79,3 % menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum aparat pemerintahan daerah Kota Batu mempunyai keluasan tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengawasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Berikutnya adalah item kuesioner partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian SDG's dengan nilai rata-rata skor 3,77 dan sebanyak 68,9 % responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pegawai di pemerintahan Kota Batu ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencapaian SDG's. Nilai skor rata-rata item pengambilan keputusan yang mempertimbangkan inisiatif staf/aparat

pemerintahan adalah 3,68 nilai ini ditunjukkan juga dengan pilihan responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 62,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata aparat pemerintahan daerah di Kota Batu mempertimbangkan inisiatif aparat pemerintahan daerah dalam pengembangan program yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan. Berikutnya adalah item keterlibatan aparat pemerintahan daerah dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan) dengan rata-rata skor 3,50 dan responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju 62,0 %. Item kuesioner pemberdayaan ini menunjukkan bahwa rata-rata aparat pemerintahan daerah di Kota Batu dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Terakhir adalah penghargaan terhadap inisiatif dan usulan serta pendapat masyarakat terkait dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mempunyai nilai rata-rata skor 3,46 sedangkan responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 39,6 %, item pemberdayaan SDM ini menunjukkan bahwa secara umum aparat pemerintahan daerah pada SKPD jarang mendapatkan penghargaan terhadap ide-ide kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.

5.1.2. Deskripsi Variabel Laten / Konstruk *Participatory Rural Appraisals / PRA*

Variabel *Participatory Rural Appraisals / PRA* dalam penelitian ini adalah persepsi responden terhadap implementasi model PRA dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Batu. Indikator variabel ini mengacu pada pendapat Chambers (1994) yang terdiri dari lima indikator yaitu sikap dan perilaku, keterlibatan, fasilitasi, optimalisasi hasil dan keberlanjutan program. Sikap dan perilaku (Y1.1), Indikator ini

mempunyai empat item kuesioner, keterlibatan (Y1.2) Indikator ini mempunyai empat item kuesioner, fasilitasi (Y1.3) Indikator ini mempunyai tiga item kuesioner, optimalisasi hasil (Y1.4) Indikator ini mempunyai tiga item kuesioner dan keberlanjutan program (Y1.5), indikator ini mempunyai tiga item kuesioner. tanggapan responden terhadap indikator variabel *PRA* sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3

Deskripsi Variabel *Participatory Rural Appraisals* Sikap & Perilaku

Indikator	Skor Jawaban Responden										Mean
	1		2		3		4		5		
	F	%	f	%	f	%	f	%	F	%	
Y1.1.1	0	0	0	0	20	11.2	108	60.3	51	28.5	4.17
Y1.1.2	0	0	0	0	26	14.5	103	57.5	50	27.9	4.13
Y1.1.3	0	0	3	1.7	39	21.8	83	46.4	54	30.2	4.05
Y1.1.4	0	0	0	0	10	5.6	96	53.6	73	40.8	4.35
Mean Indikator											4.175

Sumber: Data Primer diolah

Indikator pertama variabel *PRA* adalah sikap dan perilaku, indikator ini terdiri dari empat butir kuesioner antara lain saling belajar dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (Y1.1.1). item ini mempunyai nilai rata-rata 3,53 dari item ini jumlah responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju 55,2 %, artinya sudah ada salaing belajar diantara anggota Aparat Pemerintahan di Kota Batu dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Item kedua indikator pendidikan dari variabel sikap dan perilaku adalah berbagi pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat sebagai sarana belajar (Y1.1.2), nilai rata-rata item ini adalah 3,65 jumlah responden yang menyatakan setuju dan

sangat setuju 58,6 %, hal ini menunjukkan bahwa secara umum antara aparat pemerintahan Kota Batu berbagi pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat melalui forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Batu.

Item kuesioner ketiga indikator sikap dan perilaku adalah saling belajar dari kesalahan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (Y1.1.3) nilai *mean* item ini adalah 3,98. Responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebesar 87,9 %, hal ini mengindikasikan bahwa sudah terjalin saling belajar antara aparat Pemerintahan Kota Batu yang dijadikan semangat untuk terus memberdayakan masyarakat untuk penghapusan kemiskinan di Kota Batu. Item kuesioner terakhir dari indikator sikap dan perilaku adalah keterlibatan masyarakat sebagai subyek dalam penanggulangan kemiskinan (Y1.1.4). *mean* item kuesioner ini sebesar 3,96 dan responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebesar 77,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sudah melibatkan masyarakat sebagai subyek dalam penanggulangan kemiskinan.

Tabel 5.4

Deskripsi Variabel Laten / Konstruk *Participatory Rural Appraisals*
Indikator Keterlibatan

Indikator	Skor Jawaban Responden										Mean
	1		2		3		4		5		
	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%	
Y1.2.1	0	0	1	0.6	44	24.6	73	40.8	61	34.1	4.08
Y1.2.2	0	0	2	1.1	42	23.5	63	35.2	61	34.1	4.15
Y1.2.3	0	0	2	1.1	30	16.8	93	52.0	54	30.2	4.11
Y1.2.4	0	0	0	0	22	12.3	98	54.7	59	33.0	4.21
Mean Indikator											4.1375

Sumber: Data Primer diolah

Indikator keterlibatan pada variabel *PRA* terdiri dari empat butir kuesioner sebagaimana terlihat pada tabel diatas, untuk butir pertama yaitu keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan mempunyai nilai rata-rata 3,55, dari nilai tersebut responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju 51,8 % pada butir ini mempunyai intepretasi yang positif artinya dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan aparat pemerintahan daerah di Kota Batu sudah melibatkan semua lapisan masyarakat baik yang miskin maupun yang tidak miskin, walaupun ada responden yang menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan kuesioner ini sebesar 48,2 %. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua manajer hotel berbintang di Jawa Timur telah melakukan pengembangan diri baik secara individu maupun dilakukan oleh pihak hotel.

Item kedua, adalah keterbukaan dalam menjalankan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh aparat pemerintahan daerah, pada butir ini mempunyai nilai rata-rata 3,62, responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 53,2 %

sedangkan yang menyatakan cukup setuju dan tidak setuju serta sangat tidak setuju sebanyak 46,8 % hal ini mengindikasikan bahwa hampir semua aparat pemerintahan daerah di Kota Batu dalam menjalankan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terbuka. Selanjutnya butir kuesioner ketiga adalah keterlibatan semua unsur di masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, mempunyai nilai rata-rata terendah kedua diantara item yang lain yaitu sebesar 3,53 sedangkan responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebesar 58,6 %, masih dalam kategori positif, artinya rata-rata semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah Kota Batu telah melibatkan semua unsur golongan yang ada di masyarakat.

Item kuesioner keempat adalah keterlibatan semua unsur masyarakat (perempuan, orang miskin, dll) dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Item ini mempunyai nilai *mean* terendah diantara ketiga item lainnya yaitu 3,43 sedangkan responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju 29 %, ragu-ragu sebanyak 32,8 % dan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 17,2 %. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD belum sepenuhnya melibatkan semua golongan yang ada di masyarakat.

Tabel 5.5

Deskripsi Variabel Laten / Konstruk *Participatory Rural Appraisals*
Indikator Fasilitas

Indikator	Skor Jawaban Responden										Mean
	1		2		3		4		5		
	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%	
Y1.3.1	0	0	5	2.8	53	29.6	79	44.1	42	23.5	3.88
Y1.3.2	0	0	1	0.6	62	34.6	79	44.1	37	20.7	3.85
Y1.3.3	0	0	0	0	24	13.4	96	53.6	59	33.0	4.20
Mean Variabel											3.98

Sumber: Data Primer diolah

Indikator ketiga dari variabel *PRA* adalah fasilitas. Indikator ini mempunyai tiga butir kuesioner, pertama adalah fasilitas anggota Aparat Pemerintahan Kota Batu dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan (Y1.3.1), item ini mempunyai nilai rata-rata 3,72 dan masuk dalam kategori positif. Responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebesar 65,6 % artinya secara umum Aparat Pemerintahan di Kota Batu telah menyelenggarakan kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tupoksinya, namun masih terdapat 44,4 % responden yang menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju, artinya masih masih ada Aparat Pemerintahan yang belum tanggap terhadap penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan di OPD-nya.

Item kuesioner kedua adalah fasilitas yang sudah optimal oleh Aparat Pemerintahan Kota Batu dalam penanggulangan kemiskinan item ini mempunyai nilai rata-rata 3,34 nilai ini terendah diantara item lain dalam indikator fasilitas. Responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 51,4 % hal ini menunjukkan bahwa ada separo Aparat Pemerintahan di Kota

Batu yang merasa sudah optimal dalam menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan. Namun terdapat 48,4 % responden yang menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju artinya masih terdapat Aparat Pemerintahan Kota Batu yang belum optimal dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Item ketiga indikator fasilitasi adalah mengutamakan masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. item ini mempunyai *mean* 3,81 nilai ini terbesar diantara dua item lainnya, responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 74,1 %, hal ini mengindikasikan bahwa hampir semua Aparat Pemerintahan di Kota Batu yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan telah mengutamakan masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Nilai rata-rata indikator pelatihan adalah 3,62 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata para responden dalam penelitian ini yaitu Aparat Pemerintahan di Kota Batu dalam menerapkan metode PRA dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah memberikan fasilitasi kepada masyarakat.

Tabel 5.6.

Deskripsi Variabel Laten / Konstruk *Participatory Rural Appraisals*
Indikator Optimalisasi Hasil

Indikator	Skor Jawaban Responden										Mean
	1		2		3		4		5		
	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%	
Y1.4.1	1	0.6	8	4.5	68	38.0	70	39.1	32	17.9	3.69
Y1.4.2	0	0	2	1.1	40	22.3	93	52.0	44	24.6	4.00
Y1.4.3	1	0.6	2	1.1	22	12.3	85	47.5	69	38.5	4.22
Mean Variabel											3.97

Sumber: Data Primer diolah

Indikator keempat dari variabel *PRA* adalah optimalisasi hasil, variabel ini mempunyai tiga item kuesioner. Pertama adalah item informasi tentang data masyarakat miskin di Kota Batu telah tersedia dengan akurat, item ini mempunyai nilai rata-rata 3,08 terkecil diantara dua item lainnya. Responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 27,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa belum tersedia secara memadai informasi tentang keberadaan masyarakat miskin di Kota Batu, terutama data yang akurat tentang keberadaan masyarakat miskin. Item kedua dari indikator optimalisasi hasil adalah penyusunan anggaran Pemerintahan Kota Batu yang berpihak pada optimalisasi penanggulangan kemiskinan. item ini mempunyai nilai rata-rata 3,22 jumlah responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebesar 39,7 %, sedangkan 46,6 % menyatakan ragu-ragu sedangkan yang tidak setuju sebesar 13,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Aparat Pemerintahan di Kota Batu belum melakukan penyusunan anggaran secara optimal untuk penanggulangan kemiskinan.

Item kuesioner terakhir dari optimalisasi hasil adalah optimalisasi penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat tanpa adanya kebocoran. item ini mempunyai nilai rata-rata 3,52, responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju 44,8 %, ragu-ragu 48,6 %, tidaksetuju dan sangat tidak setuju sebesar 6,9 % hal ini mengindikasikan bahwa secara umum Aparat Pemerintahan di Kota Batu ragu-ragu atau belum optimal dalam penggunaan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, hal ini disebabkan belum optimalnya data orang miskin di Kota Batu. Nilai rata-rata indikator optimalisasi hasil (Y1.4) adalah 3,273, hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan metode PRA belum optimal dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan di Kota Batu.

Tabel 5.7

Deskripsi Variabel Laten / Konstruk *Participatory Rural Appraisals* Indikator Keberlanjutan Program

Indikator	Skor Jawaban Responden										Mean
	1		2		3		4		5		
	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%	
Y1.5.1	0	0	0	0	13	7.3	116	64.8	50	27.9	4.21
Y1.5.2	0	0	2	1.1	16	8.9	91	50.8	70	39.1	4.28
Y1.5.3	0	0	2	1.1	42	23.5	95	53.1	40	22.3	3.97
Mean Variabel											4.15

Sumber: Data Primer diolah

Indikator kelima dari variabel *PRA* adalah keberlanjutan program, variabel ini mempunyai tiga item kuesioner. Pertama adalah item Pemerintahan Kota Batu menganggarkan dan memprogramkan kegiatan penanggulangan kemiskinan, item ini mempunyai nilai rata-rata 3,87. Responden yang menyatakan

setuju dan sangat setuju sebanyak 70,7 % Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua OPD Pemerintah Kota Batu mempunyai anggaran dan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan. Item kedua dari indikator keberlanjutan program adalah kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. item ini mempunyai nilai rata-rata 3,83 jumlah responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebesar 74,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Aparat Pemerintahan di Kota Batu yang melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Item kuesioner terakhir dari keberlanjutan program adalah pembaruan data orang miskin setiap tahun. item ini mempunyai nilai rata-rata 3,20 responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju 44,2 %, ragu-ragu 29,3 %, tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 27,6 % hal ini mengindikasikan bahwa secara umum Aparat Pemerintahan di Kota Batu ragu-ragu atau belum pembaruan data orang miskin setiap tahun, pembaruan data ini tidak setiap tahun dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga seringkali tidak akurat. Nilai rata-rata indikator keberlanjutan program adalah 3,63, hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan metode PRA dilaksanakan oleh SKPD di Kota Batu secara berkelanjutan walaupun belum ada data yang akurat tentang orang miskin.

5.1.3. Deskripsi Variabel Laten / Konstruk Capaian SDG's

Variabel Capaian SDG's (Y2) dalam penelitian ini adalah capaian SDG's terhadap empat indikator SDG's yang telah disesuaikan nawa cita pembangunan Indonesia di era saat ini. Empat indikator yang diukur dalam penelitian ini, yaitu Pembangunan manusia (Y2.1), kesejahteraan dan pendidikan (Y2.2), ekonomi berkelanjutan (Y2.3), akses energi (Y2.4). Tanggapan responden terhadap indikator variabel *capaian* SDG's sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.8

Deskripsi Variabel Laten / Konstruk Capaian SDG's Indikator pembangunan manusia

Indikator	Skor Jawaban Responden										Mean
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Tingkat penurunan kemiskinan & Kelaparan sudah sesuai dengan target Y2.1.1	0	0	4	2.2	75	41.9	75	41.9	25	14.0	3.67
Secara kuantitatif jumlah orang miskin dan dan kelaparan sudah menurun dibandingkan tahun sebelumnya Y2.1.2	0	0	1	0.6	35	19.6	105	58.7	38	21.2	4.01
Secara keseluruhan penduduk sudah bisa mengakses air bersih Y2.1.3	0	0	4	2.2	33	18.4	108	60.3	34	19.0	3.96
telah mempunyai akses sanitasi yang memadai Y2.1.4	6	3.4	12	6.7	58	32.4	58	32.4	45	25.1	3.69
permasalahan diskriminasi laki-laki & perempuan Y2.1.5	7	3.9	6	3.4	37	20.7	75	41.9	54	30.2	3.91
Mean Variabel											3.88

Sumber: Data Primer diolah

Item pertama dari indikator pembangunan manusia adalah penurunan kemiskinan dan kelaparan sesuai dengan target, nilai rata-rata item ini adalah 3,67 jumlah responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju 55,9 %, dan 41,4 %

menyatakan ragu-ragu serta 2,2 % menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai di pemerintahan Kota Batu mempersepsikan pencapaian penurunan kemiskinan dan kelaparan di Kota Batu masih sudah sesuai dengan target, namun masih ada yang menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju sebanyak 41,4 %. Artinya bahwa pencapaian penurunan kemiskinan dan kelaparan di Kota Batu masih stagnan dan kurang optimal dalam pencapaiannya. Item kedua dari indikator pembangunan manusia adalah jumlah orang miskin dan kelaparan di Kota Batu secara kuantitatif sudah menurun dibandingkan tahun sebelumnya (Y2.1.2). nilai rata-rata item ini adalah 4,01 sebanyak 79,9 % menyatakan setuju dan sangat setuju dan sebanyak 20,2 %, menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitatif dibandingkan tahun sebelumnya angka kemiskinan dan kelaparan di Kota Batu sudah menurun, hal ini ditunjang oleh angka penurunan menurut BPS Kota Batu.

Butir ketiga dari indikator pembangunan manusia adalah Secara keseluruhan penduduk di wilayah Kota Batu, sudah bisa mengakses air bersih. Item ini mempunyai nilai rata-rata yaitu 3,96 dan sebanyak 79,3 % responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum persepsi pegawai di Kota Batu menyatakan bahwa akses air bersih bukanlah masalah bagi sebagian besar penduduk Kota Batu, mengingat letak geografis Kota Batu di wilayah pegunungan dan relatif mudah untuk mengakses air bersih. Item kuesioner keempat adalah penduduk di wilayah Kota Batu telah mempunyai akses sanitasi yang memadai. Item kuesioner ini mempunyai nilai rata-rata 3,69, responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 57,5 %, sedangkan yang menyatakan netral 32,4 % dan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 10,1 %. Hal ini mengindikasikan

bahwa responden mempersepsikan bahwa akses sanitasi di Kota Batu relative masih kurang, hal ini nampak pada kebiasaan masyarakat yang masih banyak menggunakan sungai sebagai sanitasi bagi rumah tangga kebanyakan.

Item kuesioner kelima pada indicator pembangunan manusia adalah permasalahan diskriminasi laki-laki & perempuan. Nilai rata-rata item kuesioner ini adalah 3,91, responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 72,1 %, sedangkan yang menyatakan netral sebanyak 20,7 %, dan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 7,3 %, hal ini menunjukkan bahwa secara umum jarang ditemukan masalah diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat Kota Batu, walaupun masih ada responden yang merasa pernah menemukan masalah diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Nilai rata-rata untuk indikator pembangunan manusia ini adalah 3,88 hal ini mengindikasikan bahwa menurut persepsi responden bahwa Pemerintah Kota Batu sudah mampu melaksanakan dan meningkatkan pembangunan manusia walaupun masih ada beberapa hal yang dipersepsikan masih belum sesuai dengan target. Hal ini nampak item kuesioner masalah diskriminasi laki-laki dan perempuan serta masalah akses sanitasi bagi masyarakat secara umum di Kota Batu.

Tabel 5.9
 Deskripsi Variabel Laten / Konstruk Capaian SDG's
 Indikator kesejahteraan dan pendidikan

Indikator	Skor Jawaban Responden										Mean
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Kualitas pendidikan penduduk secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Y2.2.1	1	0.6	0	0	34	19.0	82	45.8	62	34.6	4.14
Jumlah Sekolah Dasar telah mencukupi dibandingkan dengan jumlah penduduknya	38	21.2	48	26.8	43	24.0	42	23.5	8	4.5	2.63
Kualitas kesehatan anak-anak telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Y2.2.3	0	0	6	3.4	46	25.7	92	51.4	35	19.6	3.87
Perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan relatif sama Y2.2.4	0	0	1	0.6	16	8.9	107	59.8	55	30.7	4.21
Antara penduduk laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam kegiatan program pendidikan Y2.2.5	0	0	1	0.6	35	19.6	93	52.0	50	27.9	4.07
Antara penduduk laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam kegiatan program kesehatan Y2.2.6	0	0	1	0.6	27	15.1	105	58.7	46	25.7	4.09
Mean Variabel											3.91

Sumber: Data Primer diolah

Indikator kedua variabel *capaian SDG's* adalah kesejahteraan dan Pendidikan, indikator ini terdiri dari enam butir kuesioner. Pertama, persepsi tentang kualitas pendidikan penduduk secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Item ini mempunyai nilai rata-rata 4,14, responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak

80,4 % responden menyatakan setuju dan sangat setuju dan sebanyak 19,6 % responden menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa pada umumnya responden mempersepsikan bahwa bahwa kualitas pendidikan penduduk Kota Batu sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Item kuesioner kedua adalah persepsi tentang Jumlah Sekolah Dasar telah mencukupi dibandingkan dengan jumlah penduduknya, nilai rata-rata item ini adalah 2,63, dan sebanyak 28 % responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari rasio jumlah sekolah tingkat dasar di Kota Batu dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum mencukupi, serta perlu ditambah lagi jumlah sekolah dasar mengingat jumlah penduduk di Kota Batu yang bertambah terus.

Item ketiga adalah Kualitas kesehatan anak-anak telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, nilai rata-rata item ini adalah 3,87, jumlah responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 74,1 %, dan sebanyak 29,1 % menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum kualitas kesehatan anak-anak di kota Batu menurut persepsi responden telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Item kuesioner keempat pada indikator kesejahteraan dan pendidikan adalah Perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan relatif sama, item kuesioner ini mempunyai nilai rata-rata 4,21. Sebanyak 90,4 % responden menyatakan setuju dan sangat setuju dan sebanyak 9,6 % responden menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ditemukan perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatka pendidikan dan kesejahteraan. Item kelima adalah mempunyai kesempatan yang

sama antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam kegiatan program pendidikan. Item kuesioner ini mempunyai nilai rata-rata 4,07, responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 79,8 %, sedangkan yang menyatakan netral dan tidak setuju sebanyak 20,2 %. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini tidak ditemukan perbedaan perlakuan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam hal kegiatan program pendidikan.

Item kuesioner keenam dalam indikator kesejahteraan dan pendidikan adalah mempunyai kesempatan yang sama antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam kegiatan program kesehatan. Nilai rata-rata item kuesioner ini adalah 4,09, responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 84,4 %, sedangkan yang menyatakan netral dan tidak setuju sebanyak 15,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal akses untuk mendapatkan program kesehatan antara penduduk laki-laki dan perempuan tidak ditemukan adanya perbedaan. Sehingga dalam hal mendapatkan akses kesehatan merata pada penduduk laki-laki dan perempuan.

Nilai rata-rata indikator kesejahteraan dan pendidikan adalah 3,91, nilai ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan program kesejahteraan dan pendidikan dalam pencapaian SDG's di Kota Batu dipersepsikan telah berjalan sesuai dengan standart yang ditetapkan pemerintah daerah. Walaupun masih ada yang mempersepsikan bahwa ketercapaian ini masih belum optimal dan masih bisa lebih dioptimalkan lagi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Tabel 5.10
 Deskripsi Variabel Laten / Konstruk Capaian SDG's Indikator
 Ekonomi berkelanjutan

Indikator	Skor Jawaban Responden										Mean
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Pemerintah daerah telah mampu menaikkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat Y2.3.1	0	0	1	0.6	53	29.6	82	45.8	43	24.0	3.93
pertumbuhan ekonomi sudah sesuai dengan target pemerintah daerah Y2.3.2	4	2.2	20	11.2	56	31.3	66	36.9	33	18.4	3.58
Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat relatif merata pada semua kawasan desa dan kota Y2.3.3	0	0	1	0.6	41	22.9	102	57.0	35	19.6	3.96
Jumlah sarana-prasarana perumahan telah mencukupi dibandingkan dengan jumlah penduduknya Y2.3.4	2	1.1	18	10.1	59	33.0	74	41.3	26	14.3	3.58
Pertumbuhan industri pariwisata sesuai dengan target & rencana pemerintah, merata di semua kawasan Y2.3.5	12	6.7	10	5.6	58	32.4	74	41.3	25	14.0	3.50
Mean Variabel											3.57

Sumber: Data Primer diolah

Indikator ketiga dari variabel capaian SDG's adalah Ekonomi berkelanjutan indikator ini mempunyai lima item pernyataan kuesioner. Pertama adalah Pemerintah daerah telah mampu menaikkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat, nilai rata-rata item ini adalah 3,93, sejumlah 38,0 % responden menyatakan setuju dan sangat setuju sedangkan yang ragu-ragu sebanyak 36,2 % dan tidak setuju sebanyak 22,4 %. hal ini menunjukkan bahwa ada permasalahan diskriminasi gender di Kota Batu dalam berbagai bentuk sesuai dengan persepsi

responden. Walaupun masih terdapat 58,6 % yang merasa tidak yakin bahwa permasalahan tersebut ada di Kota Batu.

Item kedua dari indikator kesetaraan gender dalam variabel capaian SDG's adalah pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Batu sudah sesuai dengan target pemerintah daerah, nilai rata-rata item ini adalah 3,58, responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 55,3 %, sedangkan ragu-ragu dan tidak setuju sebanyak 44,7 %. hal ini mengindikasikan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi di Kota Batu sudah sesuai dengan target, walaupun hamper separuh juga tidak berpendapat dan juga belumsetuju terhadap pernyataan tersebut.

Butir ketiga dari indikator variabel capaian SDG's adalah Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Batu relatif merata pada semua kawasan desa dan kota, nilai rata-rata item ini adalah 3,96. Jumlah responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 76,6 %, sedangkan yang menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju sebanyak 23,5 %, artinya bahwa Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Batu saat ini relatif sudah merata pada semua kawasan desa dan kota. Walaupun masih ada yang menyatakan ragu-ragu, artinya masih ada beberapa wilayah yang relative tertinggal di bandingkan dengan kawasan perkotaan, misalnya di daerah perbatasan wilayah Mojokerto dan Dusun yang relative sulit keterjakaannya karena masalah sarana jalan.

Butir keempat dari indikator variabel capaian SDG's adalah Jumlah sarana-prasarana perumahan di wilayah Kota Batu telah mencukupi dibandingkan dengan jumlah penduduknya, nilai rata-rata item ini adalah 3,58. Jumlah responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 55,6 %, sedangkan yang menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju sebanyak 44,4 %, artinya bahwa Jumlah sarana-prasarana perumahan di wilayah Kota Batu

telah mencukupi dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Walaupun masih ada yang menyatakan ragu-ragu, artinya masih ada beberapa wilayah yang masih kekurangan sarana prasarana perumahan, misalnya di dusun yang relatif sulit keterjangkauannya karena masalah sarana jalan.

Butir kelima dari indikator variabel capaian SDG's adalah Pertumbuhan industry pariwisata di kota Batu sesuai dengan target & rencana pemerintah, merata di semua kawasan Kota Batu, nilai rata-rata item ini adalah 3,50. Jumlah responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 55,3 %, sedangkan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 32,4 %, menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 11,2 %, artinya bahwa secara umum pertumbuhan industry pariwisata di kota Batu sesuai dengan target & rencana pemerintah, merata di semua kawasan Kota Batu. Walaupun masih ada yang menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju. Artinya masih ada beberapa wilayah yang belum menjadi kawasan wisata atau belum menikmati hasil dari industri wisata di Kota Batu.

Secara keseluruhan nilai rata-rata indikator ekonomi berkelanjutan dari variabel *capaian SDG's* adalah 3,57, hal ini menunjukkan bahwa secara umum aparat pemerintahan di Kota Batu mempersepsikan tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Batu ini sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada yang menyatakan belum berjalan dengan baik.

Tabel 5.11

Deskripsi Variabel Laten / Konstruk Capaian SDG's Indikator akses energi

Indikator	Skor Jawaban Responden										Mean
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Semua penduduk telah mempunyai akses listrik yang merata Y2.4.1	18	10.1	24	13.4	51	28.5	59	33.0	27	15.1	3.29
Listrik dari PLN saat ini telah menjangkau wilayah terpencil Y2.4.2	7	3.9	22	12.3	46	25.7	79	44.1	25	14.0	3.52
pemerintah daerah terkait telah mampu mendorong tumbuh berkembangnya energy alternatif selain PLN Y2.4.3	7	3.9	26	14.5	66	36.9	60	33.5	20	11.2	3.34
Jalur transportasi yang layak bisa diakses oleh semua penduduk secara merata, sampai wilayah terpencil	0	0	5	2.8	26	14.5	103	57.5	45	25.1	4.05
Pembangunan infrastruktur yang layak bisa diakses oleh semua penduduk secara merata, sampai	10	5.6	18	10.1	48	26.8	73	40.8	30	25.1	3.53
Mean Variabel											3.92

Sumber: Data Primer diolah

Indikator keempat dari variabel capaian SDG's adalah Akses Energi (Y2.4) indikator ini mempunyai lima item pernyataan kuesioner yaitu Semua penduduk Kota Batu telah mempunyai akses listrik yang merata, nilai rata-rata item ini adalah 3,29 sejumlah 48,1 % responden menyatakan setuju dan sangat setuju sedangkan yang ragu-ragu sebanyak 28,5 %, responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 23,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya responden dalam penelitian ini Aparat pemerintahan Kota Batu mempersepsikan bahwa pemerintah Kota Batu belum mampu menyediakan akses listrik PLN bagi semua penduduk. Ketidak merataan ini disebabkan oleh persepsi responden yang dimaksudkan listrik disini adalah ketersediaan dari PLN. Sedangkan penduduk Kota

Batu yang mempunyai peternakan sapi, akan cenderung memanfaatkan biogas untuk keperluan akses energy alternatifnya.

Item kedua dari indikator akses energi dalam variabel capaian SDG's adalah Listrik dari PLN saat ini telah menjangkau wilayah terpencil di wilayah Kota Batu, nilai rata-rata item ini adalah 3,52 responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 55,1 %, sedangkan ragu-ragu 25,7 %, dan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 16,2 %. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam hal pencapaian SDG's Pemerintah Kota Batu telah memberikan layanan berupa keterjangkauan listrik dari PLN ke hamper seluruh wilayah Kota Batu, sehingga masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan mengingat masih ada responden yang merasa ragu-ragu Pemerintah Kota Batu mampu pemeratakan keterjangkauan listrik di wilayah Kota Batu. Namun keraguan ini sebenarnya karena beberapa wilayah menggunakan biogas sebagai alternative sumber energi.

Butir ketiga dari indikator akses energi adalah mampu mendorong tumbuh berkembangnya energy alternatif selain PLN, nilai rata-rata butir ini adalah 3,34. Jumlah responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 43,7 %, sedangkan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 36,9 % dan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 18,4 %, artinya adalah bahwa pemerintah kota Batu telah mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkann energy alternative selain dari PLN. Hal ini Nampak pada maraknya penggunaan biogas sebagai energy alternative untuk skala rumah tangga.

Item keempat dari indikator akses energi adalah Jalur transportasi yang layak di wilayah Kota Batu bisa diakses oleh semua penduduk secara merata, sampai wilayah terpencil, item

kuesioner ini mempunyai nilai rata-rata 4,05. Sebanyak 82,6 % responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sedangkan yang ragu-ragu dan tidak setuju sebanyak 17,3 %, artinya rata-rata aparat pemerintahan di Kota Batu menyatakan bahwa jalur transportasi yang layak di wilayah Kota Batu bisa diakses oleh semua penduduk.

Item kelima dari indikator akses energi adalah pembangunan infrastruktur yang layak di wilayah Kota Batu bisa diakses oleh semua penduduk secara merata, sampai wilayah terpencil, item kuesioner ini mempunyai nilai rata-rata 3,53. Sebanyak 65,9 % responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju sedangkan yang ragu-ragu sebanyak 26,8 %, sedangkan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 15,7 % artinya rata-rata aparat pemerintahan di Kota Batu menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang layak di wilayah Kota Batu bisa diakses oleh semua penduduk secara merata, sampai wilayah terpencil, walaupun masih ada yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang layak masih kurang layak.

Secara keseluruhan mean indikator dari masing-masing variable dalam penelitian ini bisa disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.12 **Variabel dan Mean Indikator**

Variabel	Indikator	Jumlah Item	Mean Indikator
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (X1)	Tingkat Partisipasi (X1.1)	2 item	4.24
	Tingkat Inisiatif (X1.2)	2 item	4.09
	Tingkat Komitmen (X1.3)	2 item	4.09
	Tanggung jawab (X1.4)	2 item	4.29
Mean Variabel			4.177
Partipatory Apraisal (Y1)	Sikap & Perilaku (Y1.1)	4 item	4.175
	Keterlibatan (Y1.2)	4 item	4.137
	Fasilitasi (Y1.3)	3 item	3.98
	Optimalisasi hasil (Y1.4)	3 item	3.97
	Keberlanjutan program (Y1.5)	3 item	4.15
Mean Variabel			4.0824
Capaian SDG's (Y2)	Pembangunan Manusia (Y2.1)	5 item	3.88
	Kesejahteraan dan pendidikan (Y2.2)	6 item	3.91
	Ekonomi berkelanjutan (Y2.3)	5 item	3.57
	Akses energi (Y2.4)	5 item	3.92
Mean Variabel			3.82

Sumber : Data diolah

1. Pada variabel Pemberdayaan SDM, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah tanggung jawab dengan nilai 4,29, kedua indikator tingkat partisipasi dengan nilai rata-rata 4,24, ketiga indikator inisiatif dan komitmen mempunyai nilai yang sama dengan nilai rata-rata 4,09. Dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan SDM aparat pemerintahan Kota Batu dalam pencapaian SDG's sudah baik, hal ini ditunjukkan nilai mean variabel 4,18. Namun demikian pemberdayaan tersebut masih perlu dioptimalkan. Optimalisasi pemberdayaan SDM yang dimaksudkan disini adalah dalam bentuk keberlanjutan pemberdayaan (*sustainable empowerment*). Mengingat tantangan kedepan lebih kompleks, sehingga masyarakat

dituntut untuk lebih kreatif dalam pembiayaan program-program pencapaian SDG's.

2. Variabel *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

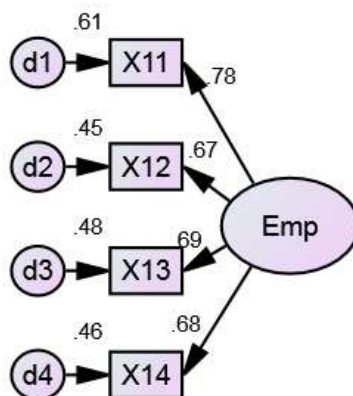
Variabel ini mempunyai nilai rata-rata 4,08. Nilai ini menggambarkan bahwa kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan di Kota Batu pada umumnya sudah berbasis PRA. Hal ini bisa ditunjukkan dari nilai mean masing-masing indikator dalam variabel PRA. Indikator pertama sikap dan perilaku mempunyai nilai mean 4,175, tertinggi diantara indikator lainnya. Secara umum indikator ini menggali tentang sikap dan perilaku aparat pemerintahan dalam kegiatan pencapaian SDG's yang harus mampu sebagai fasilitator di wilayah Kota Batu yang difasilitasi. Nilai mean ini menunjukkan bahwa rata-rata sikap dan perilaku aparat pemerintahan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sudah sesuai dengan ketentuan dari model PRA namun masih dioptimalkan, hal ini dikarenakan masalah paradigma aparat pemerintahan yang memandang bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah sebuah proyek.

3. Variabel Capaian SDG's

Variabel ini mempunyai nilai rata-rata 3,74, secara keseluruhan variabel ini mempunyai nilai diatas 3,82 artinya menurut persepsi responden bahwa capain SDG's di Kota Batu sudah cukup baik. Variabel ini mempunyai empat indikator, diantara indikator tersebut yang mempunyai nilai mean terendah adalah indikator SDG's ekonomi berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Batu masih belum optimal, hasil-hasil pembangunan ekonomi masih belum merembes ke bawah yang bias dinikmati oleh masyarakat secara luas. Sehingga

diperlukan perhatian khusus pada indikator pembangunan ekonomi berkelanjutan tersebut. Terendah kedua adalah indikator pembangunan manusia dengan nilai mean 3,88 hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia belum menyentuh secara menyeluruh pada masyarakat, khususnya pada masyarakat kelas bawah (masyarakat miskin) masih terjadi diskriminasi kesetaraan hak dibidang kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya Pemerintah Kota Batu lebih serius dalam program pemerataan hasil-hasil pembangunan, terutama pembangunan ekonomi menengah ke bawah yang lebih bisa dinikmati oleh sebagian besar penduduk di Kota Batu. Perlu ada formula yang lebih jitu agar peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kelas bawah. Pemerataan pertumbuhan ekonomi yang lebih bisa dinikmati oleh sebagian besar penduduk Kota Batu khususnya dalam akses pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya.

5.4.1. Variabel Pemberdayaan SDM (Empowerment = Emp)



Seluruh perhitungan hasil analisis unidimensionalitas konstruk Pemberdayaan SDM telah memenuhi syarat *confirmatory factor analysis*. Nilai GFI sebagai ukuran kelayakan dari model mencapai nilai 1,000 (lebih besar dari 0,90) dan nilai *chi square* sebesar 0,082 menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,774 (lebih besar dari 0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada bukti bahwa konstruk Pemberdayaan SDM memiliki unidimensionalitas yang dapat diterima.

Tabel 5.13

Hasil Unidimensionalitas variabel Pemberdayaan SDM

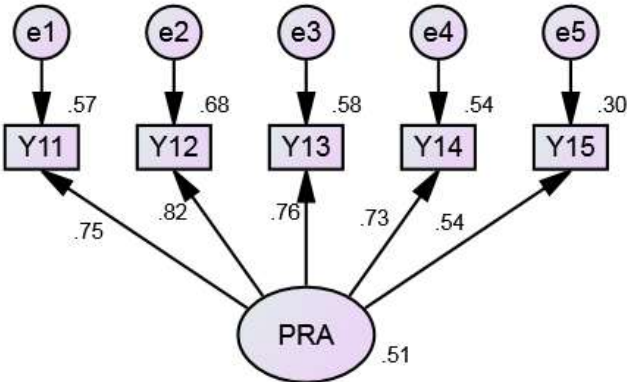
Indikator	C.R.	P	Estimate
Partispasi	7.036	0,000	0,78
Inisiatif	-	Fix	0,67
Komitmen	12.937	0,000	0.69
Tanggungjawab	12.693	0,000	0,68

Sumber: Data Primer diolah

Hasil uji terhadap statistik C.R pada setiap indikator pada konstruk Pemberdayaan SDM telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil ini dibuktikan dengan nilai C.R lebih dari 2 atau *p-value* < 0,05. Berdasarkan nilai *loading* (λ), seluruhnya bernilai di atas 0,30, sehingga juga memberikan bukti bahwa setiap indikator memiliki tingkat validitas terhadap konstruk yang tinggi (Sharma, 1996). Secara substansial hasil uji dimensionalitas menunjukkan bahwa keempat dimensi dapat mengkonstruk Pemberdayaan SDM. Nilai *loading* paling tinggi terdapat pada dimensi tingkat partisipasi. *Loading* terbesar ini memberikan arti bahwa pegawai di SKPD Kota Batu mempunyai partisipasi yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya, khususnya dalam

penanggulangan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab di SKPD tersebut. Hasil analisis ini juga menjelaskan adanya variasi yang besar pada persoalan inisiatif atau kreasi dalam bekerja, komitmen terhadap pekerjaan dan organisasi. Pada tiga dimensi lainnya dengan loading lebih dari 0,30 juga dapat menerangkan bahwa perbedaan pemberdayaan SDM bisa diukur melalui partisipasi, inisiatif, komitmen dan tanggung jawab.

5.4.2. Variabel *Participatory Rural Appraisal*



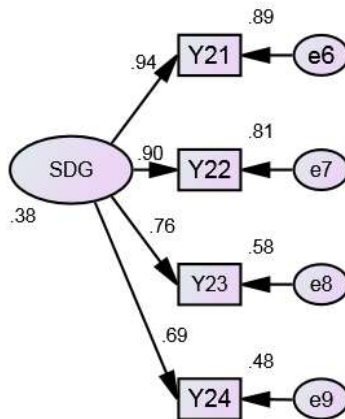
Seluruh perhitungan hasil analisis unidimensionalitas variabel *participatory rural appraisal* telah memenuhi syarat *confirmatory factor analysis*. Secara substansial uji dimensionalitas variabel *participatory rural appraisal* dapat dibentuk oleh lima indikator. Nilai loading paling tinggi adalah indikator sikap dan perilaku serta indikator optimalisasi hasil dengan nilai yang sama, sebesar 0,84. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini aparat pemerintahan di Kota Batu telah memberikan fasilitasi yang cukup menurut persepsi responden terhadap penyelenggaraan program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan model PRA. Pada empat dimensi lainnya dengan

loading lebih dari 0,30 juga dapat menjelaskan bahwa penerapan PRA pada program penanggulangan kemiskinan di Kota Batu bisa diukur melalui sikap & perilaku aparat selaku fasilitator, keterlibatan pegawai dalam program penanggulangan kemiskinan, optimalisasi hasil dan keberlanjutan program.

Tabel 5.14
Standardized Regression Weights Variabel PRA

			Estimate
Y14 (Optimalisasi Hasil)	<--	PRA	0.468
Y13 (Fasilitasi)	<--	PRA	0.788
Y12 (Keterlibatan)	<--	PRA	0.704
Y11 (Sikap & Perilaku)	<--	PRA	0.549
Y15 (Keberlanjutan)	<--	PRA	0.694

5.4.3. Variabel Capaian SDG's

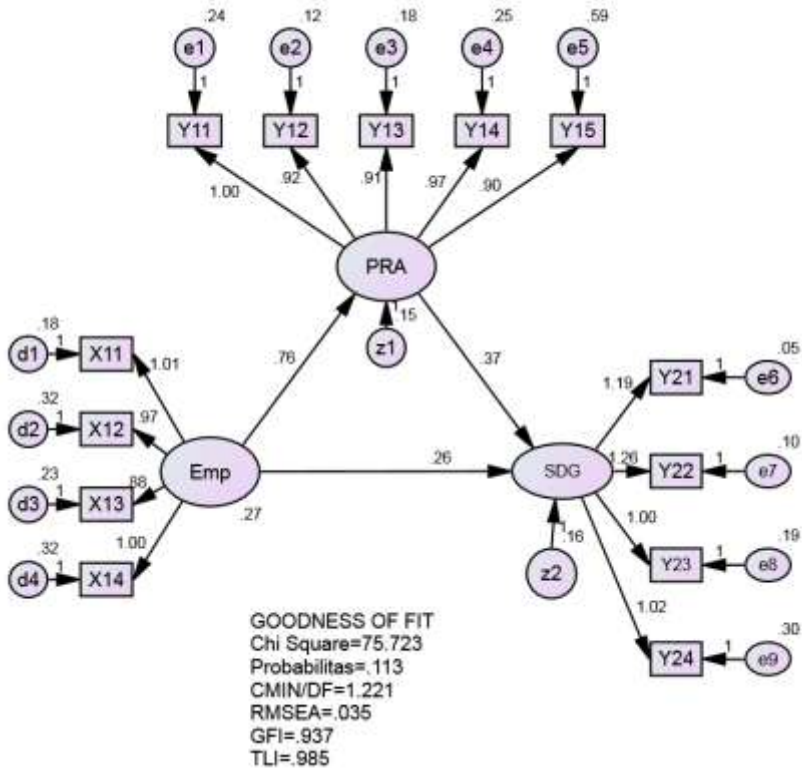


Tabel 5.15
Standardized Regression Weights Varibel PRA

			Estimate
Y21 (Optimalisasi Hasil)	<--	SDG's	0.468
Y22 (Fasilitasi)	<--	SDG's	0.788
Y23 (Keterlibatan)	<--	SDG's	0.704
Y24 (Sikap & Perilaku)	<--	SDG's	0.549

Hasil perhitungan analisis unidimensionalitas variabel capaian SDG's telah memenuhi syarat *confirmatory factor analysis*. Secara substansial uji dimensionalitas variabel capaian SDG's dapat dibentuk oleh empat indikator. Nilai loading paling tinggi adalah indikator kesejahteraan dan pendidikan dengan nilai 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa menurut persepsi responden yaitu aparat pemerintahan di Kota Batu bahwa capaian SDG's di Kota Batu telah sesuai dengan target dan sasaran pemerintah Kota Batu yang dilihat dari kesejahteraan dan pendidikan, hal ini dimungkinkan dengan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan serta masalah gender, sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan. Hal ini juga ditunjukkan dengan mudahnya akses kesehatan bagi warga miskin untuk mendapatkan pengobatan. Pada tiga dimensi lainnya dengan loading lebih dari 0,30 juga dapat dijelaskan bahwa capaian SDG's di Kota Batu bisa diukur melalui penurunan pembangunan manusia, ekonomi berkelanjutan, dan akses energi.

Model Persamaan Struktural



Kriteria penerimaan model persamaan struktural dilakukan dengan membandingkan ukuran nilai *cut-off* yang disarankan. Evaluasi nilai *Goodness of fit indeces* yang dihasilkan oleh model persamaan struktural berada di Tabel 5.17:

Tabel 5.17.
Evaluasi *Goodness of Fit* Model Persamaan Struktural

<i>Goodness of fit indices</i>	Hasil	<i>Cut-off value</i>	Keterangan
χ^2 Chi-Square	75,723	Chi Square _{tabel} (243,20)	Baik
<i>Probability</i> (p)	0,1113	$\geq 0,05$	Baik
CMIN/DF	1,221	$\leq 2,00$	Baik
RMSEA	0,035	$\leq 0,08$	Baik
GFI	0,937	$\geq 0,90$	Baik
TLI	0,985	$\geq 0,95$	Baik

Sumber: lampiran 7. Data Primer diolah

Tabel 5.16. menginformasikan tentang hasil pengujian model persamaan struktural. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ukuran kriteria absolut yakni nilai Chi-Square dan Probabilitas sesuai dengan yang disarankan yakni nilai Chi-Square_{hitung} (194,80) < Chi-Square_{tabel} (243,20) dengan tingkat probabilitas 19,9% lebih besar dari 5%. Sedangkan untuk ukuran kriteria incremental seperti RMSEA, GFI dan TLI telah memenuhi nilai *cut-off* yang disarankan. Dengan demikian model persamaan struktural yang dibangun dapat diterima untuk selanjutnya dapat digunakan untuk analisis pengaruh antar variabel penelitian.

4. Pengujian hipotesis

Terdapat tiga hipotesis penelitian yang diusulkan untuk diuji. Di bawah ini adalah penjelasan tentang pengujian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut.

a. Hipotesis pertama

Hipotesis pertama yang diusulkan adalah pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap participatory rural appraisals (PRA). Hasil pengujian hipotesis penelitian pertama terdapat pada Tabel 5.28.

Tabel 5.18
Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

No.	Variabel eksogen	Variabel endogen	Koefisien standardized	Prob.	Hasil
1	EMP	PRA	0,76	0,000	Signifikan

EMP = Empowerment
PRA = Participatory Rural Appraisals

Nilai koefisien pengaruh variabel pemberdayaan masyarakat terhadap PRA ditunjukkan dengan angka 0,76 dengan tingkat probabilitas 0,000 kurang dari 5%. Pengujian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap PRA. Koefisien yang diinformasikan pada Tabel 5.17 menunjukkan terdapat pengaruh signifikan diantara variabel penelitian yang dihipotesiskan. Dengan demikian hipotesis pertama yang diusulkan yakni pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap PRA adalah dapat dibuktikan.

b. Hipotesis kedua

Hipotesis kedua yang diusulkan adalah pemberdayaan masyarakat dan PRA berpengaruh signifikan terhadap capaian SDG's. Hasil pengujian hipotesis penelitian pertama terdapat pada Tabel 5.18.

Tabel 5.19
Hasil Pengujian Hipotesis kedua

No	Variabel eksogen	Variabel endogen	Koefisien standardized	Prob.	Hasil
1	EMP	SDG's	0,37	0,030	Signifikan
2	PRA	SDG's	0,26	0,000	Signifikan

EMP = Empowerment
PRA = Participatory Rural Appraisals
SDG's = Sustainable Development Goal's

Nilai koefisien pengaruh variabel pemberdayaan masyarakat terhadap capaian SDG's ditunjukkan dengan angka 0,37 dengan tingkat probabilitas 0,000 kurang dari 5%. Pengujian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap capaian SDG's. Nilai koefisien pengaruh variabel PRA terhadap capaian SDG's ditunjukkan dengan angka 0,26 dengan tingkat probabilitas 0,000 kurang dari 5%. Pengujian ini menunjukkan bahwa PRA berpengaruh signifikan terhadap capaian SDG's.

d. Hipotesis ketiga

Hipotesis ketiga adalah pemberdayaan masyarakat terhadap capaian SDG's melalui organisasi PRA. Hasil pengujian hipotesis penelitian ketiga terdapat pada Tabel 5.19.

Tabel 5.20
Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

No	Variabel eksogen	Variabel mediasi	Variabel endogen	Koefisien standardized pengaruh langsung	Koefisien standardized pengaruh total	Hasil
1	EMP	-	PRA	0,713	-	-
2	EMP	-	SDG's	0,268	-	-
3	PRA	-	SDG's	0,397	-	-
4	EMP	PRA	SDG's	-	0,551	0,397 < 0,551

EMP = Empowerment / Pemberdayaan Masyarakat
PRA = Participatory Rural Appraisal
SDG's = Sustainability Development Goal's

Pada Tabel 5.20, pengaruh langsung variabel pemberdayaan masyarakat terhadap PRA memiliki nilai koefisien *standardized* sebesar 0,713. Dibandingkan dengan pengaruh total variabel pemberdayaan masyarakat terhadap capaian SDG's melalui PRA masing-masing nilai koefisien *standardized* sebesar 0,268 dan 0,397. Hasil perbandingan teruji bahwa pengaruh total lebih besar dari pengaruh langsung (Tabel 5.19). Dengan demikian hipotesis penelitian ketiga yakni pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap capaian SDG's melalui PRA adalah dapat dibuktikan.

5.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian persepsional yakni menjelaskan tentang persepsi responden tentang Pemberdayaan SDM, participatory rural appraisals dan capaian SDG's. Responden dalam penelitian ini adalah staf/karyawan di Pemerintahan daerah. Hasil penelitian dan analisis sebagai berikut :

5.5.1. Pemberdayaan SDM, PRA dan Capaian SDG's

1. Pemberdayaan SDM

Pemberdayaan SDM diukur dari tingkat partisipasi, tingkat inisiatif, tingkat komitmen dan kuatnya tanggung jawab. Indikator partisipasi teruji sebagai gambaran paling unggul dalam mencerminkan pemberdayaan SDM. Menurut persepsi responden menunjukkan bahwa partisipasi dalam memberdayakan sumber daya manusia di masyarakat secara keseluruhan merupakan hal menonjol dan penting pada pemberdayaan sumber daya manusia di masyarakat. Selain partisipasi, komitmen berbagai pihak adalah hal penting kedua dalam memberdayakan sumber daya manusia. Berikutnya diikuti oleh tanggung jawab dan inisiatif.

Partisipasi, fasilitasi, inisiatif dan tanggungjawab teruji dapat mencerminkan pemberdayaan SDM di masyarakat. Dalam model dari Denison (Moblely et al. 2005), pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu indikator dalam model budaya organisasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Stewart (1998) bahwa memberdayakan orang lain pada hakekatnya merupakan perubahan budaya. Pemberdayaan tidak akan jalan jika seluruh budaya organisasi tidak berubah secara mendasar (Stewart, 1998). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini telah teruji. Artinya bahwa empat pengukuran tentang pemberdayaan SDM dalam proses pemberdayaan masyarakat teruji dapat diterapkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, yang ditujukan mempercepat capaian SDG's.

2. Participatory Rural Appraisals (PRA)

Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan Sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat (pedesaan) untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan (Chambers, 1994). Pada intinya PRA adalah sekelompok pendekatan atau metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, serta membuat rencana dan tindakan nyata (Chambers, 1994). Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam metode PRA antara lain adalah : saling belajar dan berbagi pengalaman, keterlibatan semua anggota kelompok dan informasi, orang luar sebagai fasilitator, konsep triangulasi, serta optimalisasi hasil, orientasi praktis dan keberlanjutan program (Rochdyanto, 2000:55).

Menurut persepsi responden, menunjukkan bahwa PRA lebih nampak pada sikap dan perilaku yakni SKPD dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sudah melibatkan masyarakat sebagai subyek dalam penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian ini telah membuktikan rekomendasi pendapat Chambers 1994 bahwa Sikap dan perilaku, keterlibatan, fasilitasi, optimalisasi hasil dan keberlanjutan program dapat mengukur *participatory rural appraisal* pada proses pemberdayaan masyarakat dalam percepatan capaian SDG's.

3. Capaian SDG's

SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.

SDG's berisi 17 Tujuan. Salah satu Tujuan adalah Tujuan yang mengatur tata cara dan prosedur yaitu masyarakat yang damai tanpa kekerasan, non diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi-pihak. Indonesia telah memiliki prioritas pembangunan, sesuai dengan program dan prioritas dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019. Terdapat konvergensi dan divergensi antara SDGs dan Nawacita. Dalam penelitian ini SDG's disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang telah tertuang dalam rencana aksi pembangunan yang terdiri atas : Keberlanjutan agenda **pembangunan manusia**. Peningkatan **kesejahteraan dan pendidikan**, Pembangunan **ekonomi berkelanjutan** merupakan isu baru yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, akses **energi** yang terjangkau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia, kesejahteraan dan pendidikan, ekonomi berkelanjutan, dan akses energi. teruji dapat mencerminkan capaian SDG's. Tidak semua indikator yang terdiri dari 17 indikator capaian SDG's digunakan dalam penelitian ini. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kondisi Indonesia secara umum dengan nawacita yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Kondisi ini juga sesuai dengan perkembangan pemerintah daerah yang merupakan turunan program-program dari pemerintah pusat.

4. Pengaruh Pemberdayaan SDM terhadap Participatory Rural Appraisals dan Capaian SDG's

Participatory rural appraisals merupakan salah satu metode dalam pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat yang termarjinalkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

efektifitas penerapan *paricipatory rural appraisals* dipengaruhi efektifitas pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang diberdayakan lebih mudah untuk dalam pencapaian SDG's, jika menggunakan metode PRA.

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap sumber daya manusia di masyarakat merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan *paricipatory rural appraisals* yang ditandai oleh partisipasi semua pihak, terutama oleh pemerintah. Hal ini nampak pada pemberdayaan sumber daya manusia yang mengedepankan pada partisipasi dan fasilitasi pemerintah daerah.

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap sumber daya manusia di masyarakat merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan *paricipatory rural appraisals* yang ditandai oleh partisipasi semua pihak, terutama oleh pemerintah. Hal ini nampak pada pemberdayaan sumber daya manusia yang mengedepankan pada partisipasi dan fasilitasi pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang telah diberdayakan akan mampu mendorong pendekatan PRA yang diterapkan untuk percepatan pencapaian SDG's sesuai dengan agenda yang dicanangkan oleh Pemerintah. Artinya agar PRA dapat diimplementasikan dengan benar dibutuhkan partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya. Selain partisipasi komitmen dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong gerakan masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan bersama.

Dalam hal penerapan PRA, hal penting yang dan mendesak untuk dilakukan adalah fasilitasi dari pemerintah daerah serta pengambil keputusan ditingkat masyarakat untuk berinisiatif menerapkan dengan sungguh-sungguh, model pemberdayaan terhadap masyarakat yang telah disepakati.

Selain fasilitasi, hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam penerapan PRA adalah keterlibatan semua unsur masyarakat untuk memberdayakan dirinya agar program penanggulangan kemiskinan diwilayahnya dapat dijalankan secara berkelanjutan. Optimalisasi hasil pencapaian program merupakan tujuan akhir yang harus disepakati bersama, dilaksanakan serta diawasi bersama, sehingga mampu dinikmati bersama oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia di masyarakat, dengan penerapan metode PRA mendukung efektivitas pencapaian SDG's melalui tingkat keterlibatan yang tinggi dari masyarakat yang diberdayakan, serta fasilitasi dari pemerintah daerah berbagai pihak yang berkepentingan dalam penerapan PRA. Percepatan pencapaian SDG's bagi Negara Indonesia mendesak untuk dilakukan untuk pencapaian pembangunan manusia dan kesejahteraan serta pemerataan pendidikan bagi semua.

5. Pengaruh Pemberdayaan SDM terhadap Capaian SDG's

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas sumber daya manusia yang diberdayakan teruji unggul dalam mencerminkan kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan pula bahwa masyarakat yang telah berdaya memiliki tingkat respon yang tinggi terhadap kebijakan dari pemerintah daerah secara bersama-sama dalam pencapaian SDG's. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat secara umum dapat meningkatkan percepatan dalam pencapaian SDG's. Pengujian ini menunjukkan pula bahwa percepatan dalam pencapaian SDG's yang ditunjukkan oleh respon pemerintah daerah terhadap kebijakan dan fasilitasi untuk kegiatan dalam pencapaian SDG's dipengaruhi

oleh pemberdayaan SDM masyarakat yang menekankan pada partisipasi. Khususnya pada proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan serta evaluasi kegiatan.

6. Pengaruh PRA terhadap Capaian SDG's

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan metode PRA yang konsisten dapat meningkatkan percepatan capaian SDG's, artinya bahwa untuk pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian pembangunan manusia serta pencapaian kesejahteraan masyarakat bersama akan lebih efektif jika menggunakan metode PRA. Hal ini tidak berbeda dengan penelitian (Henman & Chambers, 2009) yang pertama mengenalkan metode ini terutama untuk masyarakat pedesaan yang sesuai dengan karakter masyarakat pedesaan di Indonesia.

Penerapan secara konsisten metode PRA dalam pemberdayaan masyarakat memiliki peran bagi percepatan capaian SDG's. jadi bisa dikatakan disini bahwa keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan fasilitasi pemerintah daerah, terutama untuk masyarakat yang berkarakter pedesaan.

7. Pengaruh Pemberdayaan SDM terhadap Capaian SDG's Melalui PRA

Penelitian ini merupakan studi penerapan pemberdayaan SDM masyarakat untuk percepatan pencapaian tujuan-tujuan SDG's, dengan menggunakan metode participatory rural appraisals (PRA). Responden penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan pelaku dalam

pemberdayaan masyarakat serta aparat di tingkat kelurahan/desa. Hasil kajian tentang peran pemberdayaan masyarakat terhadap percepatan capaian SDG's melalui metode PRA menjadi bagian penting pada pembahasan ini, karena telah teruji bahwa pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan percepatan dalam capaian SDG's, melalui penerapan metode PRA. Hal ini mengindikasikan bahwa, ketika pemerintah beserta masyarakat berkeinginan untuk mempercepat capaian SDG's, sebaiknya menggunakan metode PRA dalam memberdayakan masyarakat tersebut.

Dalam penerapan PRA, keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam pencapaian SDG's harus terlibat secara total. Selain itu fasilitasi dari pemerintah juga sangat diperlukan hal ini dilakukan untuk percepatan dalam pencapaian tujuan-tujuan SDG's. Lebih detil lagi bisa dijelaskan bahwa untuk mendorong pencapaian pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka sumber daya manusia di pedesaan harus diberdayakan dengan cara ditingkatkan partisipasi dan komitmen-nya. Peningkatan partisipasi ini dilakukan dengan keterlibatan yang lebih jauh semua pihak dan fasilitasi dari pemerintah.

BAB 6

REKOMENDASI PENELITIAN

Pembahasan tentang pemberdayaan sumberdaya manusia dan masyarakat dengan menggunakan pendekatan PRA yang dilaksanakan pada lapisan masyarakat paling bawah perlu diperluas lagi, dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung dari masyarakat yang melaksanakan kegiatan program dari anggaran pemerintah daerah, untuk percepatan capaian SDG's. Peran serta berbagai pihak dalam capaian SDGF's ini untuk memastikan bahwa masyarakat juga ikut serta dalam pembangunan manusia bagi lingkungan masing-masing. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya diketahui bahwa Capaian SDG's membutuhkan kepedulian dan peran serta berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Hasil ini dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Pada variabel Pemberdayaan SDM, Dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan SDM aparat Pemerintah Daerah dalam pencapaian SDG's sudah baik. Namun demikian pemberdayaan tersebut masih perlu dioptimalkan. Optimalisasi pemberdayaan SDM yang dimaksudkan disini adalah dalam bentuk keberlanjutan pemberdayaan (*sustainable empowerment*). Mengingat tantangan kedepan lebih kompleks, sehingga masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dalam pembiayaan program-program pencapaian SDG's.
2. Variabel *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, dari hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Dearah pada umumnya sudah berbasis PRA. Hal ini bisa ditunjukkan dari nilai mean masing-masing indicator dalam variabel PRA.

Indikator pertama sikap dan perilaku mempunyai nilai mean 4,175, tertinggi diantara indikator lainnya. Secara umum indikator ini menggali tentang sikap dan perilaku aparat pemerintahan dalam kegiatan pencapaian SDG's yang harus mampu sebagai fasilitator di wilayah Kota Batu yang difasilitasi. Nilai mean ini menunjukkan bahwa rata-rata sikap dan perilaku aparat pemerintahan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sudah sesuai dengan ketentuan dari model PRA namun masih dioptimalkan, hal ini dikarenakan masalah paradigma aparat pemerintahan yang memandang bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah sebuah proyek.

3. Variabel Capaian SDG's, bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan masih belum optimal, hasil-hasil pembangunan ekonomi masih belum merembes ke bawah yang bias dinikmati oleh masyarakat secara luas. Sehingga diperlukan perhatian khusus pada indikator pembangunan ekonomi berkelanjutan tersebut. Selain itu pembangunan manusia belum menyentuh secara menyeluruh pada masyarakat, khususnya pada masyarakat kelas bawah (masyarakat miskin) masih terjadi diskriminasi kesetaraan hak dibidang kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya perhatian yang lebih serius dalam program pemerataan hasil-hasil pembangunan, terutama pembangunan ekonomi menengah ke bawah yang lebih bisa dinikmati oleh sebagian besar penduduk. Perlu ada formula yang lebih jitu agar peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kelas bawah. Pemerataan pertumbuhan ekonomi yang lebih bisa dinikmati oleh sebagian besar penduduk masyarakat khususnya dalam

akses pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya.

Bedasarkan hal tersebut direkomendasikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian masalah Implementasi dan kendala dalam percepatan capaian SDG's. Dalam hal ini adalah organisasi atau lembaga keswadayaan masyarakat serta elemen-elemen lain yang terkait dengan percepatan peningkatan capaian SDG's. percepatan capaian SDG's tidak hanya ditentukan oleh pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan PRA namun ada factor-faktor lain, misalnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi dalam memfasilitasi pemberdayaan dan keberpihakan anggaran daerah untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Terutama dalam hal efektivitas pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari APBD. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis empiris tentang percepatan capaian SDG's yang lebih akurat.

Jadi masih relevan untuk dilakukan penelitian multi tahun untuk tahun kedua yang difokuskan pada peran masyarakat dalam percepatan capaian SDG's yang lebih merata dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Sehingga output yang diharapkan pada tahun kedua adalah blue print kebijakan pemerintah daerah yang lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan dengan cara fasilitasi dan pemberdayaan ekonomi kecil.

BAB 7

PENUTUP

Peran pemerintah daerah dalam proses percepatan capaian SDG's masih perlu dioptimalkan. Terutama dalam hal keberpihakan pendanaan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Diharapkan dari keberpihakan dalam hal pendanaan di anggaran belanja daerah mampu untuk mempercepat ketercapaian tujuan-tujuan yang tertuang dalam perjanjian SDG's.

Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, telah diterapkan walaupun belum optimal. Penerapan ini dilakukan hampir pada semua kegiatan yang berorientasi pada percepatan pencapaian tujuan-tujuan yang tertuang dalam SDG's. beberapa kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh OPD masih bersifat *charity* dan belum memberdayakan masyarakat secara murni. Sehingga diperlukan contoh baik (*best practice*) dari penerapan metode PRA untuk memberdayakan masyarakat dalam percepatan pencapaian SDG's.

PRA, sebagai metode yang banyak dipercaya oleh beberapa kalangan cukup tepat digunakan dalam usaha pemberdayaan masyarakat, adalah bukan suatu metode dan teknik yang benar-benar sudah fiks. Seandainya sebuah buku, dalam metode PRA masih banyak terdapat halaman-halaman kosong, dimana pembaca mempunyai dan bahkan diberi kesempatan untuk mengisi halaman kosong tersebut. Hal tersebut memungkinkan pengembangan yang tidak terbatas terhadap metode ini, dan itu bukan menjadi masalah selama prinsip dasar metode ini masih menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan teknik-teknik PRA. Pertimbangan tersebut perlu ditekankan agar kita

tidak terjebak lagi dalam pola lama yang menjadikan suatu metode merupakan panduan atau petunjuk pelaksanaan teknis (juklaknis) yang baku, yang tidak mungkin ada perubahan, yang kalau tidak menggunakan dan mengikuti panduan tersebut artinya salah, dll, yang antara lain seperti telah diuraikan dalam permasalahan yang mungkin muncul dalam penerapan PRA.

Berdasarkan persepsi responden pada capaian SDG's, masih perlu dioptimalkan pencapaiannya, khususnya capaian pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis deskriptif didapatkan bahwa pencapaian SDG's pada pembangunan ekonomi masih kurang bisa dinikmati oleh masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi baru bisa dinikmati oleh masyarakat menengah keatas. Hal ini ditengarai oleh pertumbuhan ekonomi Kota Batu yang melebihi wilayah disekitarnya dan melebihi pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional, namun belum diimbangi oleh laju penurunan persentase kemiskinan.

Sejalan dengan belum meratanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, indicator kedua yang perlu mendapat perhatian adalah pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia berdasarkan data statistic sudah bagus, namun secara umum responden menyatakan belum menikmati hasil-hasil pembangunan manusia tersebut berupa peningkatan pendapatan, layanan kesehatan serta pemerataan pendidikan.

Keberpihakan pada masyarakat marginal masih perlu terus ditingkatkan bagi pemerintah daerah, dengan cara menciptakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dari pendanaan anggaran daerah. Menggantungkan pendanaan dari pemerintah tidaklah bijak, mengingat birokrasi panjang dalam pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan pihak lain diluar pemerintah (masyarakat

dan perguruan tinggi) masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat mulai perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan pengawasannya.

Kepedulian pihak swasta dalam percepatan capaian SDG's perlu dilibatkan melalui pendanaan corporate social responsibility (CSR). Hal ini sesuai dengan hasil temuan pada indikator partisipasi variable pemberdayaan masyarakat, bahwa partisipasi masyarakat secara umum, termasuk didalamnya adalah pihak swasta masih perlu ditingkatkan mengingat pendapatan asli pemerintah daerah masih sangat minim.

Pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan dinamika masyarakat, untuk mendapatkan data orang miskin yang lebih akurat. Hal ini perlu dilakukan setiap tahun anggaran, untuk menghindari konflik di masyarakat dan pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan pada orang yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Syafaruddin, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi Keunggulan Kompetitif*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Asia Forest Network, 2002, *Participatory Rural Appraisal For Community Forest Management, Tools And Techniques*, Published in 2002 by Asia Forest Network Santa Barbara, California USA
- Benu, Fredrik, (2002:1-22), *Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Kajian Konseptual. Artikel Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Provinsi/WTdi Hotel Kristal Kupang.*
- Chambers, Robert, 1994, *Participatory Rural Appraisal (PRA): hallenges, Potentials and Paradigm*, *World Development*, Vol. 22, No. 10, 1437-1454, Copyright 0 1994 Elsevier Science Ltd 0305-750X(94)00066-2
- Cooper Robin and Kaplan Robert S, (1993) *The design ofCost Manajement System : Text, Cases and Reading*, Prentise-Hall.
- Erstad, Margaret, 1997, *Empowerment and Organizational Change*, *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 9/7 (1997) pp. 325 – 333, MCB University Press.
- Hoelman, Mikhael B, Bona Tua Parlinggoman Parhusip, Sutoro Eko, Sugeng Bahagijo, Hamong Santono, 2015, *PANDUAN SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*, diterbitkan infid (International NGO Forum on Indonesia Development), Jakarta.

- Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 180/105/Kep/422.013/2008, tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa untuk Program mberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2008.
- Malhotra, Naresh K., (1999), "Marketing Research," International Edition an Applied Orientation, Third Edition
- Mobley, William H., Lena Wang and Kate Fang, 2005, *Organizational Culture: Measuring and Developing it in Your Organization*, Knowledge @ CEIBS, Summer 2005
- Mubyarto (2002), Kajian Strategis Indikator Kemiskinan, Penerbit Balitbang Propinsi Jawa Tengah.
- Newstrom, John W., Keith Davis, 1997, *Organization Behavior*, The McGraw-Hill Inc, Singapore.
- Nugroho, Ganjar, (2000), Ketegangan anatara Individualitas **dan** Sosialitas (Memahami Logika Pedagang Mojokuto), *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol 4, No.1, Juli. Fakuitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta,
- Spellerberg A, (2001), Framework for the Measurement of Social Capital in New Zealand, Research and Analytical Report, Nol4, Statistics New Zealand, Wellington.
- Soekartawi, (1997) Strategi Mengentas Kemiskinan di Indonesia Melalui Impres Desa Tertinggal, *Jurnal Studi Indonesia* Vol. 7. No. 2. Agustus.
- Sumintardja, Elmira N., dkk, (2002) Faktor Determinan Pembentuk Kepribadian Manusia Indonesia yang Mencerminkan Perilaku Sehat Mental dalam Tatanan Budaya Kolektif, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Padjadjaran*, Vol.3. No.1. Maret. Penerbit: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung.
- Stewart, Allen Mitchell, 1998, *Empowering People: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Suyanto, Bagang dan Karnaji (2001), Rencana Induk Pengentasan

Kemiskinan di Surabaya, I Edisi Penerbit, Lutfansah
Mediatama Surabaya.

Swasono, Sri-Edi, Guru Besar FE-UI Jakarta, Penasehat Menteri
PPN/Bappenas, Anggota Komisi Khusus Kajian Ekonomi
Pancasila (2004:1-10), Pembangunan Menggusur Orang
Miskin Bukan Menggusur Kemiskinan, Diskusi Bulanan
Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, September.

Wibowo, 2006, *Manajemen Perubahan*, edisi kedua, Penerbit PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta.

UNDP, Konvergensi Agenda Pembangunan, Nawa Cita, RPJMN,
dan SDG's, 2015, UNDP Indonesia Country Office, Jakarta.

Djohani, R. 1996. *Berbuat Bersama Berperan Setara*. Driya Media.
Bandung.

Kumar, S. 2002. *Methods for Community Participation*. ITDP
Publishing. London.

Mikkelsen, B. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-
upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Soetrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius.
Yogyakarta.

M

MDG's, ii, iii, 2

P

Participatory Rural Appraisal,
iv, vi, 2, 4, 10, 32, 47, 51, 55,
56, 60, 62, 63, 64

Pemberdayaan Masyarakat, i,
iii, iv, vi, 3, 5, 6, 9, 12, 18,
55, 66

PRA, ii, iii, iv, vi, vii, viii, 2, 4, 5,
6, 9, 10, 12, 35, 36, 37, 38,
39, 47, 51, 52, 54, 55, 56,
57, 58, 60, 61, 62, 64

S

SDG's, ii, iii, iv, vi, vii, viii, 1, 2,
3, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 31,
32, 33, 34, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 47, 48, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63,
65, 66, 69

Suplemen
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
(SPKD)
KOTA BATU, JAWA TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan upayakan Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan upayakan terus menerus melakukan akselerasi penanggulangan kemiskinan yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang percepatan program penanggulangan kemiskinan. Di dalam aturan yang dimaksud berisikan penajaman program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain yaitu: Program Perlindungan Sosial, yang meliputi Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga derajat kesejahteraan rakyat juga meningkat.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sebagai pengawalnya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengawal suksesnya pelaksanaan Program Perlindungan Sosial dimaksud untuk level nasional sedangkan di level daerah dikawal oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berkolaborasi dengan program

unggulan untuk mengurangi penduduk miskin di daerah termasuk di Kota Batu

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu melaksanakan beberapa program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dengan dukungan pendanaan dari APBN atau APBD Provinsi; program-program sektoral khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perdagangan dan pariwisata serta jasa; dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perlu didukung oleh semua pihak yaitu kemitraan dan keterpaduan langkah dari berbagai pihak baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, DPRD, pelaku usaha, masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan LSM. Program kegiatan yang dilaksanakan diorientasikan pada peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui bantuan usaha, peningkatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan masalah yang dihadapi masyarakat.

Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak 2014 – 2019 terus menurun, dari 4,71 pada tahun 2015 menjadi 3,81 pada tahun 2019 (BPS, berdasarkan data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret 2019). Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi

peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar mereka.

Dalam rangka untuk melaksanakan upaya menanggulangi kemiskinan, perlu dilakukan perencanaan strategis yang mampu memberi arah dan pijakan bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kota Batu. Dokumen ini dituangkan dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah pada dasarnya menyesuaikan dan menurunkan (breakdown) dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022, khususnya yang terkait dengan program-program dan indikasi kegiatan yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Batu. Untuk efektivitas program dan rencana aksi perlu juga dilakukan pembaharuan (up dating) data kemiskinan secara periodik dan berkesinambungan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan kemiskinan Daerah (SPKD) adalah untuk menyediakan acuan kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam sinergi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut: a. Mempertegas komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam memecahkan isu kemiskinan b. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar dan pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan c. Menyelaraskan dan membentuk sinergitas

lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022;

1.4. Kedudukan dan Ruang Lingkup

1. Kedudukan

Dokumen SPKD menjadi pedoman dan acuan seluruh pemangku kepentingan yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah. Oleh sebab itu, strategi, rencana aksi dan sasaran SPKD tidak hanya menjadi rencana kerja dan program pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama semua pihak.

2. Ruang Lingkup

- a. Rencana aksi yang memuat strategi dan program/kegiatan, prioritas kebijakan serta langkah kebijakan termasuk sasaran, target dan indikator kinerja
- b. Tata cara pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi penanggulangan kemiskinan.

1.5. Proses Penyusunan SPKD Kota Batu

Proses penyusunan dokumen SPKD Kota Batu terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a. Pengkajian permasalahan kemiskinan,
- b. Pengkajian kebijakan yang terkait dengan usaha penanggulangan kemiskinan,
- c. Pengkajian ulang kebijakan dan program untuk penanggulangan kemiskinan, serta,
- d. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan

1.6. Sistematika Pengkajian

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kondisi Umum Daerah

Bab III : Profil dan Determinan Kemiskinan Daerah

Bab IV : Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan

Bab V : Prioritas Intervensi Kebijakan

Bab VI : Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah

Bab VII : Sistem Monitoring dan Evaluasi

Bab VIII : Penutup

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

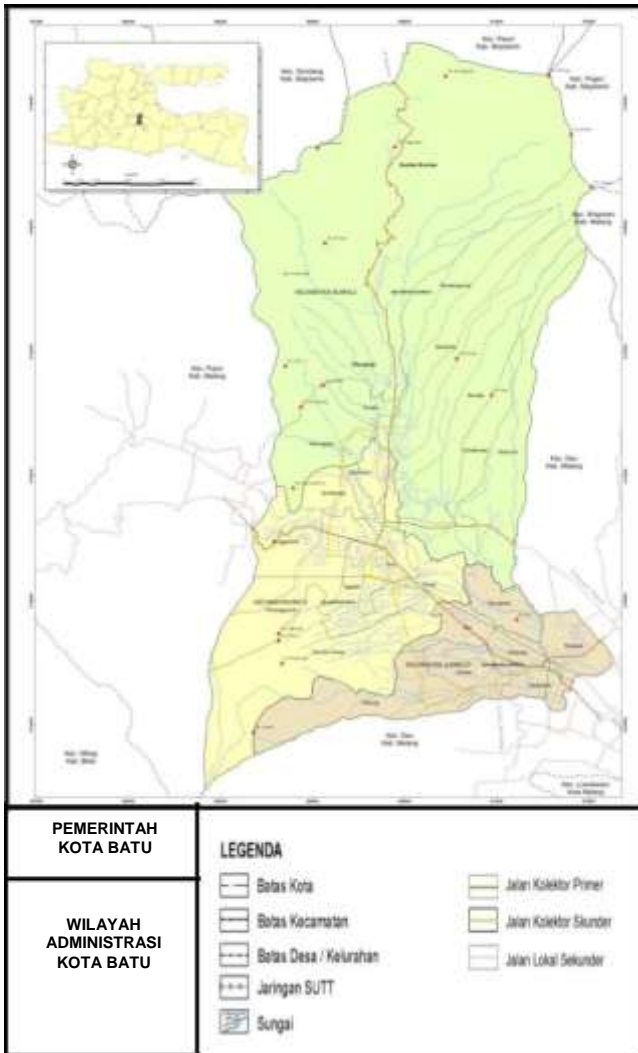
2.1. Kondisi Umum Geografi

Wilayah Kota Batu berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur terletak diantara $112^{\circ} 35'22.31152''$ Bujur Timur (BT) dan $7^{\circ}45'51.61362''$ Lintang Selatan (LS). Kota Batu berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, terletak sekitar 101 km di sebelah Selatan Kota Surabaya, dan sekitar 18 km di sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri atau Malang-Jombang. Wilayah administratif Kota Batu dikelilingi oleh Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan.

Luas wilayah administrasi Kota Batu adalah 199,09 Km² atau 19.908,72 hektar. Kurang lebih 0,42 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Wilayah seluas ini terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Batu
 - a. Luas wilayah Kecamatan Batu: 45,46 Km² (22,83% dari total wilayah Kota Batu)
 - b. Jumlah Desa/Kelurahan: 4 kelurahan dan 4 desa
 - c. Jumlah RW/RT: 96 RW dan 453 RT.
2. Kecamatan Junrejo
 - a. Luas wilayah Kecamatan Batu: 25,65 Km² (12,88% dari total wilayah Kota Batu)
 - b. Jumlah Desa/Kelurahan: 1 kelurahan dan 6 desa
 - c. Jumlah RW/RT: 59 RW dan 240 RT.
3. Kecamatan Bumiaji

- a. Luas wilayah Kecamatan Batu: 127,09 Km²
(64,28% dari total wilayah Kota Batu)
- b. Jumlah Desa/Kelurahan: 9 desa
- c. Jumlah RW/RT: 82 RW dan 429 RT



Sumber : Peta RTRW Kota Batu 2010-2030
Gambar 2.1. Wilayah Administratif Kota Batu

Wilayah Kota Batu merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan dengan iklim yang sejuk, dengan Kondisi topografi Kota Batu dalam konteks kemiringan lahan berada pada kemiringan 0%->40%. Namun demikian, sehubungan dengan kontur Kota Batu yang merupakan perbukitan dan pegunungan, maka lebih banyak wilayah berada pada kemiringan 25%-40% dan > 40%.

Kondisi topografi Kota Batu dalam konteks ketinggian lahan berada pada ketinggian 600 DPL->3.000 DPL. Secara umum wilayah Kota Batu merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Tiga gunung yang terdapat dalam wilayah Kota Batu, yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter).

Kondisi geologi Kota Batu terkait dengan struktur dan karakteristik tanah, serta potensinya sangat dipengaruhi oleh jenis batuan pembentuknya. Sebagian besar tanah di wilayah Kota Batu dibentuk oleh jenis batuan yang berkarakteristik subur.

Kurang lebih seluas 6.231,12 Ha terbentuk dari batuan andosol yang memiliki karakteristik paling subur, dan 3.026,37 Ha terbentuk dari batuan kambisol yang memiliki karakteristik cukup subur. Adapun selebihnya terbentuk dari jenis batuan alluvial dan laktosol yang memiliki karakteristik kurang subur dan berkapur. Hal ini berarti 84,4 persen luas tanah di Kota Batu berkarakteristik subur. Oleh karenanya, kesuburan tanah ini cukup berpotensi mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

Dilihat dari formasi geologi menunjukkan bahwa Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu, ada tiga gunung yang berada di wilayah Kota Batu yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter), sehingga di Kota Batu mata pencaharian penduduknya didominasi oleh sektor pertanian.

Kondisi hidrologi Kota Batu divariasikan oleh keberadaan sumber mata air, daerah aliran sungai, dan sungai. Sumber mata air yang berada di wilayah Kota Batu berjumlah sekitar 111 (seratus sebelas) sumber mata air, 83 (delapan puluh tiga) diantaranya berstatus produktif dan diberdayakan oleh PDAM unit Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang untuk memenuhi kebutuhan air dari masyarakat. Sumber mata air itu mengalir melalui 17 (tujuh belas) jaringan sungai yaitu Kali Brantas, Kali Gringsing, Kali Ampo, Kali Lanang, Kali Jurangsusuh, Kali Junggo, Kali Braholo, Kali Brugan, Kali Ngujung, Kali Clumprit, Kali Sumpil, Kali Sumbergunung, Kali Kasinan, Kali Krikil, Kali Krecek, Kali Jurangjero, dan Kali Mranak.

Kota Batu memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Brantas. Hulu DAS Brantas terletak di Desa Sumberbrantas. Panjang DAS Brantas dari hulu hingga hilir sekitar 12.000 km melewati 485 (empat ratus delapan puluh lima) sungai. DAS Brantas mengalir melewati 9 (sembilan) kabupaten dan 6 (enam) Kota di Jawa Timur.

Tabel 2.1. Kondisi dan penggunaan lahan di Kota Batu
Tahun 2017

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1.	Hutan Lindung	3,563,30	17,90
2.	Taman Hutan Rakyat R. Suryo	5.342,50	26,84
3.	Hutan Produksi	2.521,70	12,67
4.	Ruang Terbuka Hijau	1.777,70	8,93
5.	Kawasan Pertanian	4.018,50	20,18
6.	Kawasan Perumahan	2.104,50	10,57
7.	Kawasan Perdagangan & Jasa	172,70	0,87
8.	Kawasan Perkantoran	12,70	0,06
9.	Kaw. Industri &Pergudangan	26,70	0,13
10.	Kawasan Pariwisata	206,00	1,03
11.	Kaw. Pertahanan & Keamanan	45,90	0,23
12.	Pelayanan Umum	117,00	0,59
	Total	19,908.70	100

Sumber: LKPJ AMJ 2012-2017

Kota Batu terletak di selatan equator yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kondisi iklim di Kota Batu cenderung merupakan iklim pegunungan yang berudara sejuk dan curah hujan yang tinggi.

Penggunaan lahan Kota Batu dengan luas total 19,908.70 Ha sampai dengan akhir tahun 2017 masih didominasi untuk kawasan hijau, terdiri dari hutan lindung sebesar 3.563,30 Ha (17,9%), kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo 5.342,50 Ha (26,84%), Ruang Terbuka Hijau 1.777,70 Ha (8,93%), kawasan hutan

produksi 2.521,70 Ha (12,67%), dan kawasan pertanian 4.018 Ha (20,19%). Sementara penggunaan lahan untuk kawasan perumahan seluas 2.104 Ha (10,57%).

Untuk luasan lahan per kecamatan, Kecamatan Junrejo sebesar 25,65 km² (12,88% dari keseluruhan luas wilayah Kota Batu), Kecamatan Batu 45,45 km² (22,83%), dan Kecamatan Bumiaji memiliki wilayah terluas sebesar 127,98 km² (64,29). Adapun luasan per-wilayah dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Junrejo, 2018

Desa/Kelurahan		Luas ¹ (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Tlekung	8.727	34.02
2	Junrejo	3.5204	13.72
3	Mojorejo	1.9317	7.53
4	Torongrejo	3.394	13.23
5	Beji	2.4124	9.40
6	Pendem	3.6009	14.04
7	Dadaprejo	2.0638	8.05
	Kecamatan Junrejo	25,65	100.00

Sumber : Kecamatan Junrejo Dalam Angka, 2019

Tabel 2.3 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu, 2018

Desa/Kelurahan		Luas ¹ (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Oro-oro Ombo	16.92	37.22
2	Temas	4.61	10.14
3	Sisir	2.63	5.80
4	Ngaglik	3.20	7.04
5	Pesanggrahan	6.99	15.38
6	Songgokerjo	5.67	12.48
7	Sumberejo	2.92	6.42
8	Sidomulyo	2.51	5.52
Kecamatan Batu		45.45	100.00

Sumber : Kecamatan Batu Dalam Angka, 2019

Tabel 2.4 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bumiaji, 2019

Desa/Kelurahan		Luas ¹ (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Pandanrejo	6.28	4.91
2	Bumiaji	8.45	6.60
3	Bulukerto	10.07	7.87
4	Gunungsari	6.88	5.38
5	Punten	2.46	1.92

6	Tulungrejo	64.83	50.65
7	Sumbergondo	13.79	10.78
8	Giripurno	9.81	7.66
9	Sumberbrantas	5.42	4.23
	Kecamatan Bumiaji	127.98	100.00

Sumber : Kecamatan Bumiaji Dalam Angka, 2019

2.2. Kependudukan

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Jumlah penduduk di Kota Batu berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 adalah sejumlah 205.785 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 103.515 jiwa dan perempuan sebanyak 102.270 jiwa.

Kecamatan Junrejo berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 51.183 jiwa yang terdiri atas 26.031 jiwa penduduk laki-laki dan 25.152 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kecamatan Junrejo mengalami pertumbuhan sebesar 1,12 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103. Kepadatan penduduk di Kecamatan Junrejo tahun 2018 mencapai 1.995 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di desa/kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Beji

dengan kepadatan sebesar 3.395 jiwa/km².

Kecamatan Batu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 95.852 jiwa yang terdiri atas 47.901 jiwa penduduk laki-laki dan 47.951 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kecamatan Batu mengalami pertumbuhan sebesar 0,93 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103. Kepadatan penduduk di Kecamatan Batu tahun 2018 mencapai 2.109 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di desa/kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kelurahan Sisir dengan kepadatan sebesar 6.826 jiwa/km².

Kecamatan Bumiaji berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 58.750 jiwa yang terdiri atas 29.585 jiwa penduduk laki-laki dan 29.165 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kecamatan Bumiaji mengalami pertumbuhan sebesar 0,58 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101. Kepadatan penduduk di Kecamatan Bumiaji tahun 2018 mencapai 459 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Punten dengan kepadatan sebesar 2.162 jiwa/km².

Tabel 2.5 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Junrejo, 2010 dan 2018

Desa/Kelurahan		Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		2010	2017	2018	2010-2018	2017-2018
1	Tlekung	3,950	4,156	4,156	0.64	0.00
2	Junrejo	8,705	9,625	9,777	1.46	1.58
3	Mojorejo	4,556	5,181	5,269	1.83	1.70
4	Torongrejo	5,438	5,729	5,764	0.73	0.61
5	Beji	7,471	8,109	8,191	1.16	1.01
6	Pendem	10,658	11,275	11,351	0.79	0.67
7	Dadaprejo	5,604	6,542	6,678	2.22	2.08
Kecamatan		46,382	50,617	51,186	1.24	1.12

Sumber : Kecamatan Junrejo Dalam Angka, 2019

Tabel 2.6 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu, 2010 dan 2018

Desa/Kelurahan		Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		2010	2017	2018	2010-2018	2017-2018
1	Oro-oro Ombo	9,113	10,814	11,059	2.45	2.27
2	Temas	16,379	19,363	19,795	2.40	2.23
3	Sisir	18,540	18,072	17,981	- 0.38	-0.50
4	Ngaglik	11,3	11,3	11,3	0.37	0.23

		1,049	58	84		
5	Pesanggrahan	1 1,946	13,0 54	13,1 98	1.25	1.10
6	Songgokerjo	6, 668	7,222	7,29 1	1.12	0.96
7	Sumberejo	6, 929	7,37 0	7,421	0.86	0.69
8	Sidomulyo	7, 554	7,713	7,72 3	0.28	0.13
	Kecamatan	88,178	94,966	95,852	1.05	0.93

Sumber : Kecamatan Batu Dalam Angka, 2019

Tabel 2.7 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bumiaji, 2010 dan 2018

Desa/Kelurahan		Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		2010	2017	2018	2010-2018	2017-2018
1	Pandanrejo	5, 455	5, 861	5, 861	0.90	0.00
2	Bumiaji	6, 275	6, 349	6, 402	0,25	0.83
3	Bulukerto	5, 857	5, 902	5, 902	0,10	0.00
4	Gunungsari	6, 567	6, 846	6, 878	0,58	0.47
5	Punten	5, 093	5, 290	5, 312	0,53	0.42
6	Tulungrejo	8, 838	9,56 8	9,66 5	1.12	1.01
7	Sumbergondo	3, 741	3, 906	3, 924	0,60	0.46
8	Giripurno	9, 845	10,0 23	10,0 90	0.78	0.67
9	Sumberbrantas	4,313	4,669	4,716	1.12	1.01
	Kecamatan	55,624	58,414	58,750	0,69	0.58

Sumber : Kecamatan Bumiaji Dalam Angka, 2019

Tabel 2.8 Distribusi Presentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Junrejo, 2010 dan 2018

Desa/Kelurahan		Presentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per km ²	
		2010	2018	2010	2018
1	Tlekung	8.52	8.12	453	476
2	Junrejo	18.77	19.10	2,473	2,777
3	Mojorejo	9.82	10.29	2,359	2,728
4	Torongrejo	11.72	11.26	1,602	1,698
5	Beji	16.11	16.00	3,097	3,395
6	Pendem	22.98	22.18	2,960	3,152
7	Dadaprejo	12.08	13.05	2,715	3,236
Kecamatan		100	100	1,808	1,996

Sumber : Kecamatan Junrejo Dalam Angka, 2019

Tabel 2.9 Distribusi Presentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu, 2010 dan 2018

Desa/Kelurahan		Presentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per km ²	
		2010	2018	2010	2018
1	Oro-oro				6
	Ombo	10.33	11.54	539	54
2		18.57	20.65	3,553	4,29
	Temas				3

3	Sisir	21.03	18.76	7,039	6,826
4	Ngaglik	12.53	11.88	3,453	3,558
5	Pesanggrahan	13.55	13.77	1,709	1,888
6	Songgokerjo	7.56	7.61	1,176	1,286
7	Sumberejo	7.86	7.74	2,373	2,541
8	Sidomulyo	8.57	8.06	3,010	3,077
	Kecamatan	100	100	1,940	2,109

Sumber : Kecamatan Batu Dalam Angka, 2019

Tabel 2.10 Distribusi Presentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bumiaji, 2010 dan 2018

	Desa/Kelurahan	Presentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per km ²	
		2010	2018	2010	2018
					93
1	Pandanrejo	9.81	9.98	868	3
2	Bumiaji	11.28	10.90	743	758
3	Bulukerto	10.53	10.05	582	586
4	Gunungsari	11.81	11.71	954	999
5	Punten	9.16	9.04	2,073	2,162
6	Tulungrejo	15.89	16.45	136	149

7	Sumbergondo	6.73	6.68	271	285
8	Giripurno	17.05	17.17	967	1,029
9	Sumberbrantas	7.75	8.03	796	871
	Kecamatan	100	100	435	459

Sumber : Kecamatan Bumiaji Dalam Angka, 2019

Tabel 2.11 Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Junrejo, 2010 dan 2018

Desa/Kelurahan		Rasio Jenis Kelamin	
		2010	2018
1	Tlekung	104	105
2	Junrejo	105	106
3	Mojorejo	103	102
4	Torongrejo	100	100
5	Beji	98	97
6	Pendem	109	109
7	Dadaprejo	102	102
	Kecamatan	104	103

Sumber : Kecamatan Junrejo Dalam Angka, 2019

Tabel 2.12 Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu, 2010 dan 2018

Desa/Kelurahan		Rasio Jenis Kelamin	
		2010	2018
1	Oro-oro Ombo	102	102
2	Temas	102	102
3	Sisir	99	99
4	Ngaglik	97	97
5	Pesanggrahan	105	105
6	Songgokerjo	96	96
7	Sumberejo	97	96
8	Sidomulyo	99	99
	Kecamatan	100	100

Sumber : Kecamatan Batu Dalam

Angka, 2019

Tabel 2.13 Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu, 2010 dan 2018

Desa/Kelurahan		Rasio Jenis Kelamin	
		2010	2018
1	Pandanrejo	98	100
2	Bumiaji	104	102
3	Bulukerto	103	103
4	Gunungsari	102	102
5	Punten	103	103

6	Tulungrejo	100	100
7	Sumbergondo	99	99
8	Giripurno	100	100
9	Sumberbrantas	105	105
	Kecamatan	102	101

Sumber : Kecamatan Bumiaji Dalam Angka, 2019

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Junrejo, 2018

Desa/Kelurahan		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tlekung	2,128	2,025	4,153
2	Junrejo	5,021	4,756	9,777
3	Mojorejo	2,666	2,603	5,269
4	Torongrejo	2,885	2,879	5,764
5	Beji	4,043	4,148	8,191
6	Pendem	5,923	5,428	11,351
7	Dadaprejo	3,365	3,313	6,678
	Kecamatan	26 031	25 152	51 183

Sumber : Kecamatan Junrejo Dalam Angka, 2019

Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Batu, 2018

Desa/Kelurahan		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Oro-oro Ombo	575	552	1,127
2	Temas	1,224	1,276	2,500
3	Sisir	1,834	1,885	3,719
4	Ngaglik	1,123	1,160	2,283
5	Pesanggrahan	964	1,006	1,970
6	Songgokerjo	588	675	1,263
7	Sumberejo	372	358	730
8	Sidomulyo	464	452	916
Kecamatan		7,144	7,364	14,508

Sumber : Kecamatan Batu Dalam Angka, 2019

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Bumiaji, 2018

Desa/Kelurahan		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pandanrejo	2,929	2,932	5,861
2	Bumiaji	3,231	3,171	6,402
3	Bulukerto	2,998	2,904	5,902
4	Gunungsari	3,471	3,407	6,878
5	Punten	2,700	2,612	5,312
6	Tulungrejo	4,836	4,829	9,665
7	Sumbergondo	1,955	1,969	3,924
8	Giripurno	5,051	5,039	10,090
9	Sumberbrantas	2,414	2,302	4,716
Kecamatan		29,585	29,165	58,750

Sumber : Kecamatan Bumiaji Dalam Angka, 2019

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Junrejo, 2018

Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	2,212	2,134	4,346
5-9	2,151	2,053	4,204
10-14	1,930	1,820	3,750
15-19	2.070	1,844	3,914

Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
20-24	2.425	1,916	4,341
25-29	1,955	2,043	3,998
30-34	2,124	2,062	4,186
35-39	1,974	1,971	3,945
40-44	2,099	2,003	4,102
45-49	1,769	1,917	3,686
50-54	1,665	1,501	3,166
55-59	1,316	1,022	2,338
60-64	818	827	1,645
65-69	652	744	1,396
70-74	430	523	953
75+	441	772	1,213
Jumlah	26 031	25 152	51 183

Sumber : Kecamatan Junrejo Dalam Angka, 2019

Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Batu, 2018

Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	3,950	3,841	7 791
5-9	4,030	3,817	7 847
10-14	3,777	3,810	7 587
15-19	3,860	3,846	7 706
20-24	4,152	3,900	8 052
25-29	3,882	3,857	7 739
30-34	3,769	3,900	7 669
35-39	3,701	3,673	7 374
40-44	3,780	3,716	7 496
45-49	3,317	3,550	6 867
50-54	3,050	2,865	5 915
55-59	2,493	2,066	4 559
60-64	1,459	1,412	2 871
65-69	1,093	1,259	2 352
70-74	774	954	1 728

Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
75+	814	1,485	2 299
Jumlah	47 901	47 951	95 852

Sumber : Kecamatan Batu Dalam Angka, 2019

Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Bumiaji, 2018

Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	2,380	2,340	4.720
5-9	2,357	2,370	4.727
10-14	2,195	2,179	4.374
15-19	2,259	2,157	4.416
20-24	2,300	2,194	4.494
25-29	2,436	2,383	4.819
30-34	2,356	2,357	4.713
35-39	2,330	2,345	4.675
40-44	2,305	2,288	4.593
45-49	2,182	2,096	4.278

Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
50-54	1,828	1,909	3.737
55-59	1,390	1,566	2.956
60-64	1,055	937	1.992
65-69	817	779	1.596
70-74	631	524	1.155
75+	762	743	1.505
Jumlah	29,583	29,167	58.750

Sumber : Kecamatan Bumiaji Dalam Angka, 2019

Tabel 2.20 Ringkasan Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2018

Uraian	Satuan	Jumlah
Jumlah Penduduk	jiwa	205.785
Laki-laki	jiwa	103.515
Perempuan	jiwa	102.270
Kepadatan Penduduk	Jiwa /km2	958

Sumber : BPS, 2019

Dilihat dari kelompok umur, jumlah Penduduk Kota Batu didominasi oleh usia produktif. Dari struktur penduduk menurut kelompok umur dapat diketahui sejauh mana tingkat ketergantungan usia tidak produktif terhadap usia produktif.

Usia produktif adalah kelompok umur 15 sampai dengan 64 tahun, sedangkan usia tidak produktif pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Gambaran tersebut yang dinamakan Angka Beban Ketergantungan.

Pada tahun 2018 angka kergantungan secara keseluruhan adalah 44.67 persen. Angka ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan menanggung sekitar 44 orang bukan usia produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Secara keseluruhan jumlah penduduk usia produktif yaitu 15 - 64 tahun pada Tahun 2018 mencapai 142.245 jiwa atau sebesar 69,12 persen.

2.3. Ketenagakerjaan

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 70,52 persen lebih penduduk Kota Batu termasuk angkatan kerja. Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Kota Batu antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan.

TPAK Kota Batu tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. TPAK Kota Batu tahun 2017 sebesar 73,35 persen sedangkan tahun 2018 sebesar 70,52 persen. TPAK 70,52 mempunyai arti bahwa dari 100 penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, 70 orang diantaranya termasuk angkatan kerja.

Tabel 2.21 Statistik Ketenagakerjaan Kota Batu Tahun 2015 – 2018

Uraian	2015	2016*)	2017	2018
Angkatan Kerja	105.496	-	115.591	112.502
Bekerja	100.970	-	112.984	108.990
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) , %	68,60	-	73,35	70,52
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) , %	95,71	-	97,74	96,88
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), %	4,29	-	2,26	3,12

Sumber: Sakernas 2015, 2017, 2018, Statistik Daerah Kota Batu, BPS 2018-2019

*) Data tidak tersedia

Tingkat Kesempatan Kerja Kota Batu pada tahun 2018 sebesar 96,88 persen artinya bahwa setiap 100 penduduk angkatan kerja 97 diantaranya sudah bekerja. Dari hasil Sakernas diketahui bahwa jumlah angkatan kerja penduduk Kota Batu yang terserap dalam kegiatan ekonomi (bekerja) sebanyak 108.990 atau 96,88 persen terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator makro yang digunakan untuk melihat perkembangan pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan pada tahun 2018 tercatat 3,12 persen dibandingkan dengan tahun 2017 angka ini mengalami sedikit peningkatan.

Sektor perdagangan dan pertanian mendominasi jenis lapangan usaha yang banyak digeluti oleh tenaga kerja di Kota Batu. Penduduk yang bekerja di sektor perdagangan dan pertanian pada tahun 2018 masing-masing sebesar 37,04 persen dan 25,10 persen. Sektor perdagangan dan pertanian masih mendominasi lapangan usaha yang dikerjakan tenaga kerja di Kota Batu. Hal ini terjadi sejalan dengan dicanangkannya Kota Batu sebagai Kota Wisata yang berbasis agropolitan sehingga memberikan kesempatan kerja bagi penduduk Kota Batu di sektor perdagangan dan pertanian.

Tabel 2.22 Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Kota Batu Tahun 2015 – 2018

Status Pekerjaan Utama	2015	2016*)	2017	2018
Berusaha sendiri	18.292	-	17.592	20.840
Berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap	8.849	-	15.694	15.283
Berusaha dibantu buruh tetap	5.889	-	9.111	5.025
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	42.631	-	54.613	48.754
Pekerja bebas pertanian	6.155	-	4.234	8.556
Pekerja tidak dibayar	11.336	-	11.740	10.532

Sumber: Sakernas 2015, 2017, 2018, Statistik Daerah Kota Batu, BPS 2018-2019

*) Data tidak tersedia

Pada tahun 2018 penduduk Kota Batu yang bekerja, sebanyak 44,73 persen berstatus sebagai

buruh/karyawan/pegawai, kemudian 19,12 persen berusaha sendiri. Diantara status pekerjaan tersebut yang paling kecil adalah pekerja yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, yaitu sekitar 4,61 persen

Tenaga kerja di Kota Batu umumnya masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Hal ini terlihat dari persentase penduduk bekerja yang sebagian besar adalah lulusan SD atau bahkan tidak tamat SD, yaitu sebanyak 35,17 persen. Persentase terbesar selanjutnya adalah lulusan SMA/SMK/ sederajat yang mencapai 33,12 persen. Sedangkan lulusan perguruan tinggi hanya sekitar 11,57 persen.

2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara serta mampu menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Trend dari tahun 2010 sampai dengan 2017 menunjukkan bahwa IPM baik di Kota Batu, tingkat Jawa Timur maupun nasional mengalami peningkatan. Dilihat dari komponen penyusun IPM pun, semua komponen selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik angka usia harapan hidup, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari segi posisi, IPM Kota Batu selalu diatas Jawa Timur dan Nasional.

Di wilayah Malang Raya, tahun 2018 posisi Kota Batu (75,04) berada di atas Kabupaten Malang (69,4) dan di bawah Kota Malang (80,89).

Tabel 2.23 IPM Kota Batu Tahun 2014-2018

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,89	72,62	73,57	74,26	75,04
2	Angka Harapan Hidup	72,06	72,16	72,2	72,25	72,37
3	Harapan Lama Sekolah	12,9	13,16	13,62	14,03	14,04
4	Rata-Rata Lama Sekolah	8,41	8,44	8,45	8,46	8,77
5	Pengeluaran per kapita (1/1000)	10,85	11,27	11,77	12,06	12,466

Sumber : BPS

Sejak tahun 2012, IPM Kota Batu telah melampaui angka 70, dengan kata lain status pembangunan manusia Kota Batu termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal pembangunan manusia untuk lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Berbagai program pemerintah telah diupayakan untuk meningkatkan angka IPM, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Selain itu keberhasilan program tersebut ditentukan oleh pola pikir masyarakat Kota Batu dalam memanfaatkan sarana yang ada. Pembangunan manusia yang dipotret melalui angka IPM hasilnya tidak langsung berdampak pada tahun berikutnya melainkan beberapa tahun kemudian.

2.5. Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kota Batu selama kurun waktu lima tahun terakhir ini terus menerus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan capaian positif para pelaku pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat. Kondisi ini harus tetap dipertahankan atau ditingkatkan kineja para pelaku pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat sehingga kondisi sosial ekonomi di Kota Batu semakin mantap. Pada tahun 2018 penduduk miskin di Kota Batu tercatat 8.050 jiwa dengan persentase sebesar 3,89 persen. Hal ini lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang mencapai 10,98 persen. Dengan demikian hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Kota Batu dalam upaya untuk selalu mengurangi dan menanggulangi kemiskinan menuju target *Sustainable Development Goal's* (SDG's).

Tabel 2.24 Angka Kemiskinan Kota Batu dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Maret)
1	Kota Batu	4,59	4,71	4,48	4,31	3,89	3,81
2	Provinsi Jatim	12,28	12,34	12,05	11,77	10,98	

Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, program-program untuk masyarakat miskin perlu diupayakan agar dapat dirasakan di seluruh masyarakat Kota Batu hingga ke desa-desa di daerah pegunungan. Perbaikan distribusi pendapatan, program pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan ekonomi pada

masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses perlindungan sosial perlu terus diupayakan.

2.6. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kota Batu, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kota Batu namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

Laju pertumbuhan sektor ekonomi dalam PDRB disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.25 Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2018

Lapangan Usaha	Industry	2014	2015	2016	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.83	7.91	6.29	4.18	3.91
B	Pertambangan dan Penggalian	12.31	8.05	3.60	3.03	2.30
C	Industri Pengolahan	7.06	8.09	5.41	5.72	2.37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.54	5.18	5.83	15.56	4.48

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.68	4.68	2.17	3.66	0.31
F	Konstruksi	7.86	6.28	5.30	4.15	1.88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.79	2.58	5.27	5.33	4.58
H	Transportasi dan Pergudangan	8.30	3.70	3.28	2.93	2.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.24	4.67	6.53	4.92	4.12
J	Informasi dan Komunikasi	0.58	1.96	3.08	1.84	1.43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.07	7.85	4.92	2.72	2.94
L	Real Estate	1.17	7.30	2.79	3.10	4.36
M,N	Jasa Perusahaan	2.04	5.34	2.08	4.61	3.36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	- 0.64	8.01	5.35	6.59	2.31
P	Jasa Pendidikan	5.68	4.11	2.11	2.73	0.96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.79	7.34	2.25	5.25	2.65
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.19	4.09	4.86	4.74	4.24

Potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan pendekatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan

produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha (sektor) dan setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

Tabel 2.26 Perkembangan PDRB Tahun Dasar 2010 Kota Batu
Periode Tahun 2015 – 2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
PDRB ADHK (milyar)	9.145,9	9.750,9	10.390,8	11.066,50
PDRB ADHB (milyar)	11.510,3	12.901,7	14.351,5	15.801,00
PDRB/Kapita ADHK (juta)	45,6	48,2	50,9	53,8
PDRB/Kapita ADHB (juta)	57,4	63,8	70,4	76,8
Pertumbuhan Ekonomi	6,69	6,61	6,56	6,5

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRByang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Ditinjau dari pendekatan produksi, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Batu pada tahun 2018 mencapai 15.801,00 milyar. Apabila dibandingkan tahun 2017 maka ada kenaikan sebesar 10,1 persen. Pendukung utama PDRB ADHB Kota Batu tahun 2018 adalah sektor perdagangan, pertanian dan jasa lainnya masing-masing mencapai 18,83 persen, 49,58 persen dan 15,94 persen.

Perkembangan ekonomi Kota Batu atas dasar harga konstan tidak berbeda jika dibandingkan dengan harga berlaku. PDRB ADHK pada tahun 2017 mencapai 10.390,84 milyar naik sekitar 6.56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor-sektor ekonomi lokal yang mempunyai potensi diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan bahkan menjadi sektor unggulan.

Potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan pendekatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Berkembang pesatnya pariwisata di Kota Batu mendorong tumbuhnya ekonomi di sektor-sektor pendukungnya. Sektor Tersier masih menjadi sektor andalan yang menggenjot PDRB Kota Batu, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya yang besar terhadap PDRB. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan jasa dan akomodasi merupakan sektor yang tumbuh signifikan dan menyerap tenaga kerja yang banyak di Kota Batu. Sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan relatif stabil pertumbuhan kontribusinya terhadap PDRB Kota Batu.

Kemajuan ekonomi Kota Batu, tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Batu yang selalu mendorong investor dan pelaku ekonomi yang bersifat UMKM untuk tetap berpartisipasi dalam membangun Kota Batu sebagai Kota Wisata.

Sejalan dengan paradigma pembangunan yang partisipatif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal, sistem ekonomi yang dijalankan diharapkan dapat memberikan peran kepada usaha di tingkat komunitas dengan skala mikro, kecil dan menengah. Dalam hal ini peran UKM sebagai pelaku usaha lokal secara optimal dan menggunakan teknologi yang sesuai agar produk yang dihasilkan dapat lebih bersaing baik di pasar nasional maupun internasional.

Berdasarkan distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Penentuan sektor unggulan di Kota Batu didasarkan pada kontribusi sektor terhadap perekonomian Kota Batu. Ukuran yang digunakan adalah besarnya kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Batu. Dikatakan sektor unggulan apabila kontribusinya terhadap nilai PDRB Kota Batu dari waktu ke waktu secara konsisten relatif besar.

Kemajuan ekonomi Kota Batu, tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Batu yang selalu mendorong investor dan pelaku ekonomi yang bersifat UMKM untuk tetap berpartisipasi dalam membangun Kota Batu sebagai Kota Wisata.

Pada tahun 2014-2018 ada empat sektor yang mendominasi perekonomian Kota Batu yaitu sektor perdagangan, sektor jasa lainnya, sektor pertanian dan sektor

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini menunjukkan bahwa berkembang pesatnya pariwisata di Kota Batu mendorong tumbuhnya ekonomi di sektor-sektor pendukungnya, disamping sektor pertanian yang merupakan jati diri Kota Batu.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah isu yang kompleks dan multidimensional, karena banyak pendekatan yang dilakukan terhadap kondisi yang disebut miskin, maka banyak definisi tentang kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2000), pada umumnya definisi kemiskinan mengacu kepada ide dasar bahwa kemiskinan adalah masalah "kekurangan" dalam "kesejahteraan".

Indonesia menggunakan konsep atau definisi kemiskinan sesuai dengan konsep Badan Pusat Statistik bahwa Kemiskinan Absolut yaitu kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti Pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang di konseptualisasikan dengan garis kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), dimana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

Kebutuhan Pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum/ kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Dengan pendekatan ini kemudian ditentukan Garis Kemiskinan (yang merupakan gabungan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan non- Makanan), penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan penduduk miskin. Cara penentuan penduduk miskin semacam ini disebut penentuan kemiskinan absolut.

Garis kemiskinan absolut, mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting untuk menilai efek dari kebijakan penanggulangan kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu program terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit usaha kecil).

Tidak tercapainya standar hidup layak oleh seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya multidimensi seperti tidak mencukupinya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya kesempatan produktif dan tidak mencukupinya perlindungan social. Rendahnya kualitas SDM dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya yang diselenggarakan pemerintah. Sementara kurangnya kesempatan produktif dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan dan iklim wirausaha khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Sementara perlindungan sosial yang cukup akan melindungi masyarakat dari guncangan sosial yang dapat menyebabkan seseorang jatuh kedalam kemiskinan ketika terjadi bencana, sakit ataupun krisis

ekonomi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
5. Mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

3.2. Status Kesejahteraan

Status kesejahteraan terbagi dalam 4 desil yang terdiri dari:

1. Desil 1 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 0% - 10% terendah.
2. Desil 2 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah
3. Desil 3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah

4. Desil 4 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31% - 40% terendah

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Januari 2019 dari Pusdatin Kemensos, Status kesejahteraan di Kota Batu yang terbagi dalam 4 desil dengan rincian 11.489 Kepala Rumah Tangga, 12.645 Kepala Keluarga dan jumlah individu sebanyak 39.526 orang. Jumlah kepala rumah tangga (KRT) terendah adalah pada Kecamatan Junrejo dan tertinggi pada Kecamatan Bumiaji. Sedangkan jumlah individu terendah adalah pada Kecamatan Junrejo dan tertinggi adalah pada Kecamatan Batu. Dibandingkan dengan data BDT 2015, jumlah Kepala Rumah Tangga maupun jumlah individu dan Kepala Keluarga mengalami perubahan/penurunan, dimana di BDT 2015 jumlah Kepala Rumah Tangga sebanyak 11.521 KRT, jumlah individu sebanyak 39.665 orang dan jumlah kepala keluarga sebanyak 12.678 KK.

Adapun rincian per kecamatan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Batu 2019

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk (BPS, 2018)	Jumlah sampai DESIL 4		
			KRT	ART	Keluarga
1	BATU	95.852	4.542	16.338	5.149
2	JUNREJO	51.186	2.390	7.993	2.548
3	BUMIAJI	58.750	4.557	15.195	4.948
	JUMLAH	205.788	11489	39526	12645

Sumber data: BPS dan Pusdatin Kemensos RI, Januari 2019

Tabel 3.2 Jumlah ART per Desil per Kecamatan 2019

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk (BPS, 2018)	Jumlah ART Desil 1	% ART Desil 1 Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah ART Desil 2	% ART Desil 2 Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah ART Desil 3	% ART Desil 3 Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah ART Desil 4	% ART Desil 4 Terhadap Jumlah Penduduk
1	BATU	95.852	4.786	2,33	7.262	3,53	2.821	1,37	1.514	0,74
2	JUNREJO	51.186	2.775	1,35	3.427	1,67	1.151	0,56	640	0,31
3	BUMIAJI	58.750	5.377	2,61	6.679	3,25	2.093	1,02	1.046	0,51
	JUMLAH	205.788	12.938	6,29	17.368	8,44	6.065	2,95	3.200	1,55

Sumber data: BPS dan Pusdatin Kemensos RI, Januari 2019

Tabel di atas memperlihatkan kondisi kesejahteraan Kota Batu terbanyak (8,44 %) berada pada Desil 2 dan paling sedikit pada Desil 4 (1,55 persen)

3.3. Kondisi Umum Kemiskinan Daerah

Kondisi kemiskinan daerah digambarkan secara umum, dengan menggunakan indikator kemiskinan konsumsi (satu dimensi) yaitu: (i) Persentase Penduduk Miskin (P0); (ii) Garis Kemiskinan; (iii) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Daerah

Berdasarkan data yang dirilis BPS, perkembangan jumlah penduduk miskin (jiwa) di Kota Batu tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan trend/kecenderungan menurun. Tahun 2014 sebesar 9.100 jiwa hingga sebesar 7.980 jiwa pada tahun 2018 atau terjadi penurunan sebesar 1.120 jiwa. Secara persentase penduduk miskin di Kota Batu cenderung menurun seiring berjalannya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Pada 2014, penduduk miskin di Kota Batu sebesar 4,59 persen, dan sempat meningkat menjadi 4,71 persen pada

tahun 2015. Namun setelah itu, angka tersebut terus menurun hingga mencapai 3,89 persen pada tahun 2018, atau sekitar 7.980 orang. Persentase kemiskinan di Kota Batu merupakan yang terkecil di antara Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sebagai perbandingan, pada tahun 2018 angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur mencapai 10,98 persen.

Penduduk miskin (P0) Kota Batu selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0.42 poin dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2017 sebesar 4,31% atau 8.770 penduduk miskin, kemudian pada tahun 2018 sebesar 3,89% atau 7.980 penduduk miskin. Penurunan angka Kemiskinan Kota Batu ini ada kecenderungan mengikuti trend di tingkat Provinsi Jawa Timur, maupun Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Batu telah berhasil menurunkan angka kemiskinan selama dua tahun terakhir dengan melalui program-program kemaslahatan maupun program-program lainnya.

Tabel. 3.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin,

NO	URAIAN	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Kemiskinan	%	4,59	4,71	4,48	4,31	3,89
2	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	9.100	9.430	9.050	8.770	7.980
3	Garis Kemiskinan	Rp	355.317	380.393	398.401	424.354	467.073

Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kota Batu

Tahun 2014 – 2018

Sumber: BPS, 2019

Garis kemiskinan (GK) merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan terpisah antara daerah

perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan Kota Batu mengalami peningkatan antar waktu selama tahun 2014-2018. Pada 2014, garis kemiskinan Kota Batu mencapai Rp. 355.317, kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp. 467.073,- pada tahun 2018. Garis kemiskinan Kota Batu umumnya selalu berada di atas garis kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Pada periode terakhir yaitu dari 2017 ke 2018, kenaikan garis kemiskinan mencapai 10,07 persen.

2. Perkembangan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya terbatas persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P1) dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P2).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar angka P1, semakin jauh jarak orang miskin terhadap garis kemiskinan. Jika semakin dalam atau semakin jauh dengan garis kemiskinan, semakin sulit untuk pengentasan kemiskinannya. Pada tahun 2017 kedalaman kemiskinan di Kota Batu tercatat sebesar 0,35 selanjutnya angka ini melebar menjadi 0,62 pada tahun 2015.

Namun pada tahun-tahun berikutnya, angka ini sudah cenderung menurun, 0,59 pada tahun 2017 dan hingga mencapai

0,55 pada tahun 2018. Kondisi tersebut mengindikasikan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit. Atau dengan kata lain rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin semakin mendekati dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks mengindikasikan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

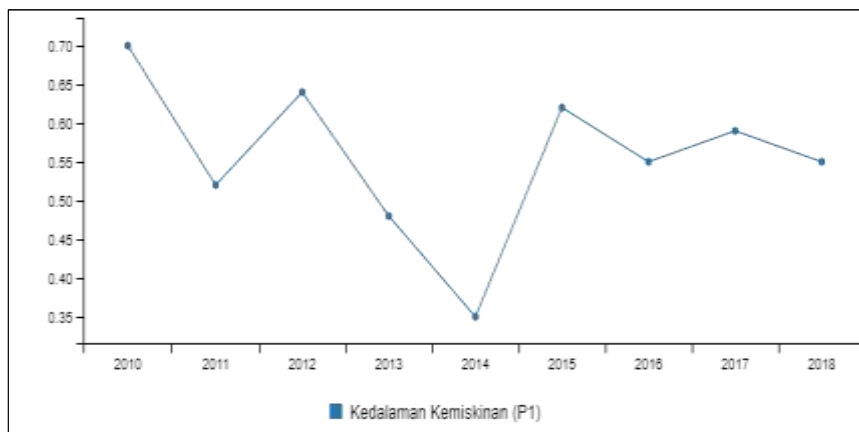
Di Kota Batu pada tahun 2014, angka keparahan kemiskinan hanya sekitar 0,05 saja. Namun pada tahun 2015 meningkat menjadi 0,13, dan angka ini cenderung stabil pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2018 angka keparahan kemiskinan sebesar 0,12.

Tabel. 3.4 Perbandingan Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Batu Tahun 2010 – 2018

Publikasi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,7	0,52	0,64	0,48	0,35	0,62	0,55	0,59	0,55
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,18	0,1	0,13	0,07	0,05	0,13	0,11	0,12	0,12

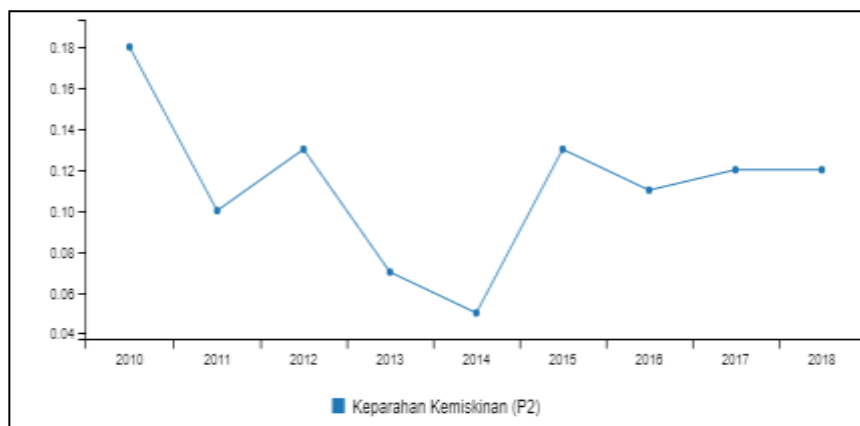
Sumber: Aplikasi Sepakat Bappenas, 2019

Grafik 3.1 Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Batu Tahun 2010 – 2018



Sumber: Aplikasi Sepakat Bappenas, 2019

Grafik 3.2 Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Batu Tahun 2010 – 2018



Sumber: Aplikasi Sepakat Bappenas, 2019

3.4. Analisis Kondisi Umum Kemiskinan Daerah

3.4.1. Analisis Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Tingkat Kemiskinan Daerah

a. Analisis Persentase Penduduk Miskin

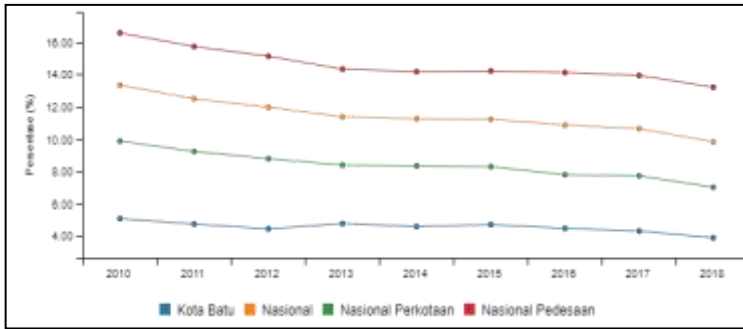
Bagian ini akan membandingkan persentase penduduk miskin di Indonesia dengan persentase penduduk miskin di Kota Batu untuk mengetahui capaian persentase. Tabel di bawah ini memperlihatkan trend persentase penduduk miskin di tingkat Nasional dengan di Kota Batu Tahun 2010 sampai 2018.

Tabel. 3.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Batu Tahun 2010 – 2018 dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Nasional

:::	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Batu	5,08	4,74	4,45	4,77	4,59	4,71	4,48	4,31	3,89
Nasional	13,33	12,49	11,96	11,37	11,25	11,22	10,86	10,64	9,82
Nasional Perkotaan	9,87	9,23	8,78	8,39	8,34	8,29	7,79	7,72	7,02
Nasional Pedesaan	16,56	15,72	15,12	14,32	14,17	14,21	14,11	13,93	13,2

Sumber: Aplikasi Sepakat Bappenas, 2019

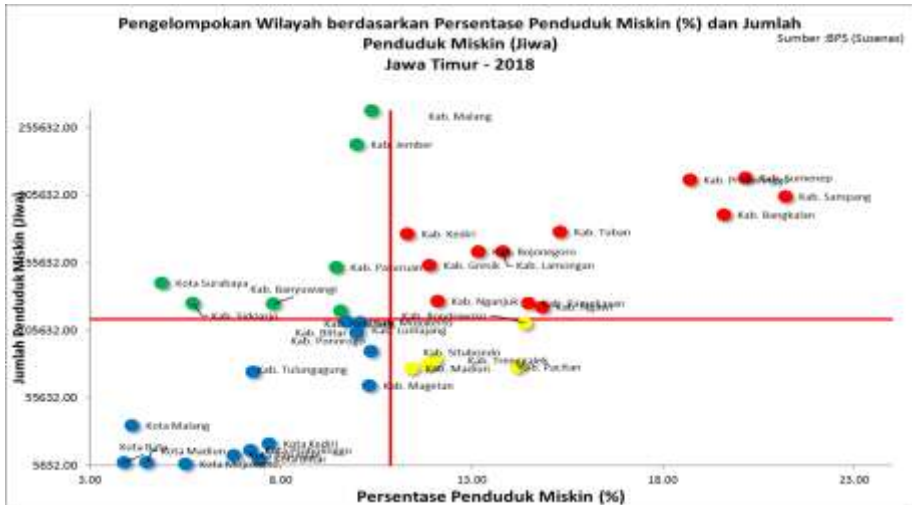
Grafik 3.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Batu Tahun 2010 – 2018 dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Nasional



Sumber: Aplikasi Sepakat Bappenas, 2019

Dari kombinasi persentase kemiskinan di tingkat nasional dengan di Kota Batu terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kota Batu kecuali pada tahun 2013 dan 2015 terus menurun dari tahun ke tahun. Bila dibandingkan dengan tingkat nasional, persentase penurunannya masih selalu di bawah laju penurunan tingkat nasional, tetapi secara besaran persentase Kota Batu masih di bawah tingkat nasional. Dengan kata lain, capaian posisi relatif persentase penduduk miskin (%) di Kota Batu tahun 2018 sebesar 3,89 persen berada di atas capaian nasional tahun 2018 (9.82 persen). Hal ini menunjukkan bahwa telah ada upaya terus menurun tingkat kemiskinan akan tetapi belum signifikan.

Grafik 3.4 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kota Batu Tahun 2018 di Tingkat Jawa Timur



Grafik di atas menunjukkan posisi relatif tingkat kemiskinan Kota Batu terhadap Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur. Pada tahun 2018 di lingkup wilayah Jawa Timur, Tingkat Kemiskinan Kota Batu termasuk yang terendah.

b. Analisis Garis Kemiskinan

Tabel. 3.6 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Batu Tahun 2014 – 2018 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Garis Kemiskinan Kota Batu	355.317	380.393	398.401	424.354	467.073
2	Garis Kemiskinan Jawa Timur	282.796	305.171	321.761	342.092	373.574

Sumber: BPS, 2019

Tabel 3.6 menunjukkan capaian posisi relatif garis kemiskinan (Rp) di Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur dari

tahun 2014 hingga tahun 2018 yang selalu meningkat besarnya. Pada Tahun 2018 Garis Kemiskinan Kota Batu berada pada besaran Rp.467.073 per kapita per bulan,- berada diatas capaian Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.373.574 per kapita per bulan. Baik Pemerintah Kota Batu maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil untuk meningkatkan / memperbaiki garis kemiskinan.

Peningkatan angka garis kemiskinan merupakan signal bahwa taraf kesejahteraan masyarakat Kota Batu semakin mengalami perbaikan. Memang garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh factor inflasi, namun besaran ini juga menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Angka garis kemiskinan yang terus meningkat mengindikasikan suatu wilayah semakin membaik kondisi perekonomiannya.

c. Analisis Kedalaman Kemiskinan

Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, Kota Batu selalu mempunyai Indeks Kedalaman Kemiskinan yang lebih rendah daripada Indeks Kedalaman Provinsi Jawa Timur. Tahun 2014, Kota Batu sebesar 0,35% sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar 1,85%. Untuk capaian pada dua tahun terakhir 2017 dan 2018 Kota Batu sebesar 0,59% (2017) dan 0,55% (2018) sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar 1,87% (2017) dan 1,95% (2018).

Dari dua tahun terakhir (2017 dan 2018), di Kota Batu terjadi kondisi yang mengindikasikan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit. Untuk Provinsi Jawa Timur berlaku kondisi sebaliknya mengindikasikan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin

melebar. Bila dilihat dari begitu fluktuatifnya besaran Indeks Kedalaman Kemiskinan dari tahun ke tahun, maka diperlukan upaya lebih kuat lagi untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Batu sebagai bagian dari wilayah Pemerintah Jawa Timur.

Tabel. 3.7 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Batu Tahun 2014 – 2018 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	P1 Kota Batu	0,35	0,62	0,55	0,59	0,55
2	P1 Jawa Timur	1,85	2,06	1,99	1,87	1,95

Sumber: BPS, 2019

d. Analisis Keparahan Kemiskinan

Tabel. 3.8 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Batu Tahun 2014 – 2018 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	P2 Kota Batu	0,05	0,13	0,11	0,12	0,12
2	P2 Jawa Timur	0,44	0,52	0,47	0,45	0,5

Sumber: BPS, 2019

Dari tahun 2014 hingga tahun 2018 Indeks keparahan kemiskinan Kota Batu selalu lebih rendah daripada capaian Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2018 sebesar 0,12% lebih rendah dibanding indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Timur 0,5%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Batu telah berhasil mempertahankan upaya perbaikan/melakukan pengurangan terhadap P2.

Dengan demikian semakin tinggi indeks keparahan atau tingkat keragaman kemiskinan juga semakin parah. Artinya dalam penduduk miskin sendiri terjadi ketimpangan ekonomi. Semakin parah ketimpangannya, semakin berat dalam pengentasan kemiskinan. Kondisi ekonomi yang berbeda-beda dalam kelompok penduduk miskin mengharuskan pemerintah untuk melakukan klasifikasi dalam penanganan pengentasan kemiskinan. Jika tingkat keparahan kemiskinan rendah atau relatif homogen, pemerintah lebih mudah untuk melakukan aplikasi program kemiskinan.

3.4.2. Analisis Efektifitas

a. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Daerah

Tren pencapaian efektivitas tingkat kemiskinan (%) Kota Batu tahun 2014-2018 menunjukkan ada perbaikan dengan trend kemiskinan semakin menurun. Kecuali dari tahun 2014 ke tahun 2015, Laju rata-rata penurunan tingkat kemiskinan adalah 27,33% per tahun. Pemerintah Kota Batu telah cukup efektif menurunkan persentase kemiskinan walaupun masih dibawah persentase kemiskinan nasional.

b. Analisis Garis Kemiskinan

Tren efektifitas garis kemiskinan (Rp) Kota Batu 2014-2018 menunjukkan perbaikan peningkatan garis kemiskinan yang cukup efektif. Laju rata-rata kenaikan garis kemiskinan selama 5 tahun terakhir Kota Batu sebesar Rp.27.939,00 per kapita per bulan.

Tabel 3.6 menginformasikan bahwa garis kemiskinan Kota Batu ditahun 2014-2018 selalu mengalami

kenaikan naik, akan tetapi perlu tetap dijaga kestabilan harga kebutuhan pokok serta tetap membantu secara langsung mereka, misalnya melalui sembako murah, sekolah gratis (pakaian, sepatu, buku tulis, buku cetak, dan transportasi) agar generasi mereka bisa bangkit dan menjadi generasi gemilang kelak.

c. Analisis Kedalaman Kemiskinan

Grafik 3.1 menginformasikan tren efektifitas indeks kedalaman kemiskinan P1 (%) Kota Batu 2010-2018 menunjukkan telah ada upaya perbaikan P1 akan tetapi juga terjadi kenaikan P1 ditahun 2015,. Ada kecenderungan terjadi fluktuasi (naik-turun). Laju penurunan rata-rata besaran P1 selama 9 tahun terakhir untuk Kota Batu hanya sebesar 0,02% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Batu belum efektif/optimal untuk mengurangi indeks P1, sementara kemampuan untuk menurunkan P1 dengan melihat jumlah penduduk dan ketersediaan anggaran cukup mampu dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu apabila program kegiatan yang telah disusun sesuai dengan database yang dikeluarkan oleh BPS Pusat dan TNP2K untuk mengintervensi kebijakan yang pro terhadap penurunan P1.

d. Analisis Keparahan Kemiskinan

Grafik 3.2 menginformasikan tren efektifitas indeks keparahan kemiskinan P2 (%) Kota Batu 2010-2018 menunjukkan berfluktuatif. Upaya penurunan P2 cenderung lambat, dan belum efektif. Hal ini terlihat ditahun 2010-2014 terjadi penurunan P2 rata-rata 0,0325% per tahun. Akan tetapi ditahun 2015 menuju tahun 2015

naik sebesar 0,08% dari 0,05% untuk tahun 2014 menjadi 0,13%. Tahun 2015 sampai tahun 2018 besaran P2 yang terjadi cenderung fluktuatif, bahkan cenderung stagnan **(belum efektif)**. Laju rata-rata penurunan P2 selama 9 tahun terakhir untuk Kota Batu hanya mampu sebesar 0,01% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa geliatnya pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Batu belum mampu mengurangi P2 di Kota Batu.

3.4.3. Analisis Relevansi

a. Analisis Relevansi Perkembangan Tingkat Kemiskinan Daerah

Tabel 3.5 dan Grafik 3.1 menginformasikan tren pencapaian relevansi tingkat kemiskinan (%) di Kota Batu terhadap nasional tahun 2010-2018 cenderung cukup relevan, namun berada di bawah tren capaian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Batu lebih baik dibanding nasional.

b. Analisis Relevansi Garis Kemiskinan

Tabel 3.6. menginformasikan tren pencapaian relevansi garis kemiskinan (Rp) Kota Batu terhadap Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 relevan, dan berada diatas tren capaian Jawa Timur yang berarti tidak bermasalah, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi,

Tren capaian kenaikan garis kemiskinan Kota Batu masih lebih baik dibanding capaian Provinsi Jawa Timur, dengan laju rata-rata capaian kenaikan garis kemiskinan Kota Batu selama 5 tahun terakhir sebesar Rp.27.939,0 per kapita per bulan lebih besar dibanding laju rata-rata

capaian kenaikan garis kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang hanya Rp.22.695,00 per kapita per bulan. Terlihat relevansi kenaikan garis kemiskinan Kota Batu terhadap Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 cukup relevan.

c. Analisis Relevansi Kedalaman Kemiskinan

Tabel 3.7 menginformasikan tren pencapaian relevansi indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Batu terhadap Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 cenderung relevan dan masih berada dibawah tren capaian Provinsi Jawa Timur berarti telah ada perubahan/perbaikan terhadap P1 tetapi masih fluktuatif. Pencapaian relevansi P1 Kota Batu dalam 5 tahun terakhir laju rata-rata kenaikan P1 sebesar 0,05% lebih tinggi sebesar 0,02% dibanding capaian Provinsi Jawa Timur 0,03%.

d. Analisis Relevansi Keparahan Kemiskinan

Tabel 3.8 menginformasikan tren pencapaian relevansi indeks keparahan kemiskinan P2 (%) Kota Batu terhadap Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 relevan. P2 Kota Batu naik sebesar 0,07% dari 0,05% di tahun 2014 menjadi 0,12% di tahun 2018. Demikian juga P2 Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan 0,06% dari 0,44% di tahun 2014 menjadi 0,5% untuk tahun 2018. Hal ini menunjukkan belum berhasilnya upaya perbaikan.

3.4.4. Analisis Keterkaitan Tingkat Kemiskinan Daerah

Tabel di bawah ini menginformasikan analisis keterkaitan untuk mengetahui keterkaitan 5 (lima) indikator utama kemiskinan dengan 4 (empat) perspektif

sehingga dapat diketahui penyebab masalah kemiskinan di Kota Batu.

Tabel. 3.9 Analisis Keterkaitan Tingkat Kemiskinan Daerah

PERSPEKTIF					
Indikator	Posisi Relatif Tahun 2018	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi	Keterkaitan
1. Jumlah Penduduk	Penduduk Miskin tahun 2018 menurut BPS, 7.980 jiwa dibanding dengan Provinsi Jawa Timur 4.332.590 jiwa.	Tahun 2014 ada 9.100 jiwa, dan Tahun 2018 sebesar 7.980 jiwa	cukup efektif	cukup relevan	Dari 5 indikator keterkaitan, Capaian Kota Batu selalu lebih baik dari Provinsi Jawa Timur dan Nasional, akan tetapi belum efektif dan masih relevan. Hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam pengentasan kemiskinan
2. Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat kemiskinan Kota Batu 3,89%, lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur 10,98% dan Nasional 9,82%.	Cenderung menurun dengan laju penurunan dalam 5 tahun terakhir sebesar 0,175%	cukup efektif	cukup relevan	
3. Garis Kemiskinan/GK (Rp/Kapita/bulan)	GK Kota Batu Rp.467.073 di atas GK Provinsi Jawa Timur Rp.373.574	Selalu mengalami kenaikan	cukup efektif	cukup relevan	
4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Kota Batu, 0,55 dibanding Jawa Timur 1,95	fluktuatif, dua tahun terakhir Kota Batu mengalami penurunan sedangkan provinsi Jawa Timur naik	belum efektif	relevan	
5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Kota Batu, 0,12 dibanding Jawa Timur 0,5	fluktuatif dan cenderung stagnan	belum efektif	relevan	

BAB IV

ANALISIS APBD

4.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

4.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

Pembahasan kinerja APBD tentunya akan selalu merujuk pada struktur APBD yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah termasuk didalamnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah akan melingkupi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL), sementara Pembiayaan Daerah akan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari kelompok pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah dan dana penyesuaian otonomi khusus. Analisis pendapatan daerah termasuk

pertumbuhan didalamnya akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang.



KPJ Walikota Tahun 2018 diolah, 2019

Grafik 4.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2013 – 2018

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2013 - 2015

URAIAN	TAHUN		
	2013	2014	2015
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
PENDAPATAN	550.422.760.135,80	715.280.431.290,14	720.078.054.477,34
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.544.940.727,80	80.493.920.959,63	104.233.584.925,34
1. Pajak Daerah	44.853.946.415,32	62.807.445.882,00	83.692.699.934,00
2. Retribusi Daerah	4.718.663.733,00	4.480.985.852,10	5.209.867.148,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.027.452.696,34	2.189.729.441,01	2.177.429.333,26
4. Lain-Lain PAD yang Sah	7.944.877.883,14	11.015.759.784,52	13.153.588.510,08
B. DANA PERIMBANGAN	446.587.901.437,00	501.994.753.265,00	503.746.629.211,00
1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	48.793.825.437,00	59.265.138.265,00	49.212.551.211,00
2. Dana Alokasi Umum	374.362.261.000,00	412.378.255.000,00	413.219.693.000,00
3. Dana Alokasi Khusus	23.431.815.000,00	30.351.360.000,00	41.314.385.000,00
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	44.289.917.971,00	132.791.757.065,51	112.097.840.341,00
1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya	8.641.127.259,00	62.263.403.557,00	53.169.725.718,00
2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	30.008.080.000,00	40.011.513.000,00	55.665.432.000,00
3. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	2.198.660.000,00	23.043.006.024,00	2.611.403.623,00
4. Pendapatan Lainnya	3.442.050.712,00	7.473.834.484,51	651.279.000,00

Sumber: LKPJ Walikota Tahun 2018, 2019

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun
2016 - 2018

URAIAN	TAHUN		
	2016	2017	2018
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
PENDAPATAN	803.450.046.047,54	849.422.427.172,26	984.947.474.138,61
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.533.498.033,54	149.402.584.554,26	162.582.873.269,61
1. Pajak Daerah	88.757.389.919,00	113.854.303.436,00	141.909.362.683,00
2. Retribusi Daerah	5.855.560.775,00	4.899.198.825,00	4.609.203.050,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.152.462.133,00	2.360.797.996,69	2.430.675.957,10
4. Lain-Lain PAD yang Sah	12.768.085.206,54	28.288.284.296,57	13.633.631.579,51
B. DANA PERIMBANGAN	624.840.719.033,00	589.620.610.974,00	649.243.671.787,00
1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	51.317.087.281,00	43.445.796.142,00	96.523.674.774,00
2. Dana Alokasi Umum	480.460.016.000,00	474.779.517.000,00	474.881.106.000,00
3. Dana Alokasi Khusus	93.063.615.752,00	71.395.297.832,00	77.838.891.013,00
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	69.075.828.981,00	110.399.231.644,00	173.120.929.082,00
1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya	66.842.910.981,00	83.033.220.644,00	81.098.995.082,00
2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	26.352.611.000,00	76.097.494.000,00
3. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	1.580.120.000,00	1.013.400.000,00	1.370.600.000,00
4. Pendapatan Lainnya	652.798.000,00	0,00	14.553.840.000,00

Sumber: LKPJ Walikota Tahun 2018, 2019

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa yang akan datang.



Sumber: LKPJ Walikota Tahun 2018 diolah, 2019

Grafik 4.2. Realisasi Belanja Daerah Kota Batu Tahun 2013 - 2018

Tabel 4.3 Ringkasan Realisasi Belanja Kota Batu 2013 - 2015

URAIAN	TAHUN		
	2013	2014	2015
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
BELANJA DAERAH	568.468.908.109,01	632.737.653.584,00	819.751.076.487,00
A. Belanja Tidak Langsung	301.948.079.993,50	331.095.124.288,00	356.420.925.443,00
1. Belanja Pegawai	238.935.073.676,99	255.022.291.235,00	263.497.115.227,00
2. Belanja Hibah	37.689.967.511,51	41.211.354.600,00	54.519.247.496,00
3. Belanja Bantuan Sosial	8.016.903.305,00	14.454.462.453,00	15.157.874.146,00
4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	16.718.600.000,00	0	0
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	456.035.500,00	20.407.016.000,00	22.456.151.759,00
6. Belanja Tidak Terduga	131.500.000,00	0	790.536.815,00
B. Belanja Langsung	266.520.828.115,51	301.642.529.296,00	463.330.151.044,00
1. Belanja Pegawai	22.306.828.750,00	26.876.841.375,00	30.019.139.864,00
2. Belanja Barang dan Jasa	88.371.418.665,51	138.138.802.387,00	151.428.709.133,00
3. Belanja Modal	155.842.580.700,00	136.626.885.534,00	281.882.302.047,00

Sumber: LKPJ Walikota Tahun 2018, 2019

Tabel 4.4 Ringkasan Realisasi Belanja Kota Batu 2016 - 2018

URAIAN	TAHUN		
	2016	2017	2018
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
BELANJA DAERAH	819.686.549.125,98	779.442.236.965,00	852.457.583.947,18
A. Belanja Tidak Langsung	429.922.874.412,00	394.795.440.050,00	437.973.644.106,00
1. Belanja Pegawai	291.522.578.649,00	269.112.371.165,00	293.658.956.570,00
2. Belanja Hibah	90.188.121.331,00	65.647.496.950,00	44.466.387.025,00
3. Belanja Bantuan Sosial	7.905.270.639,00	8.192.726.796,00	14.763.730.628,00
4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.156.890.439,00	8.656.890.340,00	9.137.919.683,00
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	31.023.137.854,00	42.364.390.799,00	75.712.920.200,00
6. Belanja Tidak Terduga	1.126.875.500,00	821.564.000,00	233.730.000,00
B. Belanja Langsung	389.763.674.713,98	384.646.796.915,00	414.483.939.841,18
1. Belanja Pegawai	38.500.385.972,00	48.178.254.699,00	58.039.000.882,00
2. Belanja Barang dan Jasa	176.894.580.414,98	193.838.442.249,00	230.390.719.855,18
3. Belanja Modal	174.368.708.327,00	142.630.099.967,00	126.054.219.104,00

Sumber: LKPJ Walikota Tahun 2018, 2019

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Seperti halnya kegunaan analisis Pendapatan dan Belanja Daerah, analisis Pembiayaan Daerah juga digunakan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang.

Tabel 4.5 Ringkasan Realisasi Pembiayaan Kota Batu 2017 - 2018

URAIAN	TAHUN	
	2017	2018
	(Rp.)	(Rp.)
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.308.701.558,07	138.569.682.613,48
Penggunaan SILPA	72.308.701.558,07	138.569.682.613,48
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.040.000.000,00	20.682.026,00
Pembayaran Pokok Utang	4.040.000.000,00	20.682.026,00
PEMBIAYAAN NETTO	68.268.701.558,07	138.549.000.587,48

Sumber: BKD Kota Batu, 2019

4.1.2 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

Tabel 4.6 Neraca Pemerintah Kota Batu per 31 Desember
2018 dan 2017

URAIAN		2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
	Kas di Kas Daerah	268.872.799.937,00	135.810.562.710,66
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	2052209,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.057.125,12	301.570.322,00
	Kas di BLUD	0,00	0,00
	Kas Lainnya	0,00	0,00
	Setara Kas	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Dana Bergulir	36.635.687,01	21.100.506,35
	Kas di Bendahara FKTP	2.848.705.241,34	2.333.749.840,73
	Kas di Bendahara BOS	2.012.455,79	101.712.626,74
	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
	Piutang Pajak	67.201.121.510,00	65.403.985.323,00
	Piutang Retribusi	691.632.092,00	730.750.542,00
	Penyisihan Piutang	-48.237.053.089,29	-42.524.062.962,29
	Belanja Dibayar Dimuka	111.042.395,82	196.512.913,60
	Piutang Dana Bagi Hasil	4.681.327.577,00	14.851.222.679,00
	Piutang Lainnya	2.883.876.299,00	5.448.973.189,10
	Persediaan	9.307.018.581,85	5.586.933.937,09
	JUMLAH ASET LANCAR	308.400.175.812,64	188.265.063.836,98
INVESTASI JANGKA PANJANG			
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
	Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
	Dana Bergulir	0,00	0,00
	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
	Investasi Jangka Panjang Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	30.036.695.948,00	26.800.573.286,00
	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	30.036.695.948,00	26.800.573.286,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	30.036.695.948,00	26.800.573.286,00

URAIAN	2018	2017
ASET TETAP		
Tanah	533.716.069.946,00	533.274.119.946,00
Peralatan dan Mesin	369.887.315.564,58	315.181.028.363,58
Gedung dan Bangunan	539.039.920.278,44	498.876.501.409,56
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	600.064.564.224,38	543.897.882.548,38
Aset Tetap Lainnya	32.553.806.773,25	32.233.973.595,25
Konstruksi dalam Pengerjaan	13.819.454.368,84	23.440.286.150,84
Akumulasi Penyusutan	-554.494.074.553,78	-464.079.688.124,89
JUMLAH ASET TETAP	1.534.587.056.601,71	1.482.824.103.888,72
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tuntutan Ganti Rugi	362.171.000,00	363.171.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	13.976.525.574,00	13.628.876.471,00
Aset Lain-Lain	31.318.252.451,22	38.172.294.434,22
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-7.884.666.338,86	-5.559.337.501,86
JUMLAH ASET LAINNYA	37.772.282.686,36	46.605.004.403,36
JUMLAH ASET	1.910.796.211.048,71	1.744.494.745.415,06

4.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan tuntutan publik yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel, untuk itu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah. Disamping itu Pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Batu yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2018 – 2022, dijelaskan tentang Kebijakan pengelolaan keuangan Tahun 2013 – 2017.

Bahwa Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintahdaerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah

pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*). Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

4.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan (Tabel 5.6).

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah aparatur dan jenis kebutuhan yang lebih kompleks.

Tabel 4.7 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Batu

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Prosentase (%)
1	Tahun Anggaran 2016	352.944.145.824,00	822.686.549.125,98	42,90

2	Tahun Anggaran 2017	341.514.034.007,00	783.482.236.965,00	43,59
3	Tahun Anggaran 2018	380.902.097.141,00	852.478.265.973,18	44,68

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2017, persentase belanja kebutuhan aparatur adalah sebesar 43,59%. Angka ini naik menjadi 44,68% di tahun 2018. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

4.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran pemerintah Kota Batu dalam kurun tahun 2015-2018 dapat digambarkan pada Tabel berikut.

Tabel 4.8 Defisit/Surplus Riil Anggaran Kota Batu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Realisasi Pendapatan Daerah	725.754.996.854,34	803.450.046.047,54	849.443.705.762,26	984.947.474.138,61
	Dikurangi realisasi:				
2	Belanja Daerah	819.751.076.487,00	819.686.549.125,98	728.120.377.965,85	852.457.583.947,18
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	3.000.000.000,00	4.040.000.000,00	20.682.026,00
	Defisit/Surplus Riil	(6.146.851.200,27)	(11.833.193.550,33)	117.283.327.796,41	132.469.208.165,43

Berdasarkan tabel defisit *riil* anggaran di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 memperoleh surplus anggaran sebesar 117 Milyar lebih, demikian pula pada tahun 2018 terjadi peningkatan surplus anggaran sebesar 132 Milyar lebih..

Besarnya surplus anggaran pada tahun 2018 menandakan rendahnya penyerapan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah mencerminkan kinerja anggara yang tidak optimal. Anggaran pendapatan daerah harusnya diserap secara optimal oleh pemerintah daerah, dengan demikian diharapkan dapat membantu perputaran perekonomian masyarakat. Berputarnya perekonomian daerah pada tahap berikutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 4.9 Komposisi Penutup Defisit/Surplus Riil Anggaran Kota Batu

No	Uraian	2016	2017	2018
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	91.492.226.068,24	72.255.722.989,80	138.570.748.215,48

BAB V

PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN

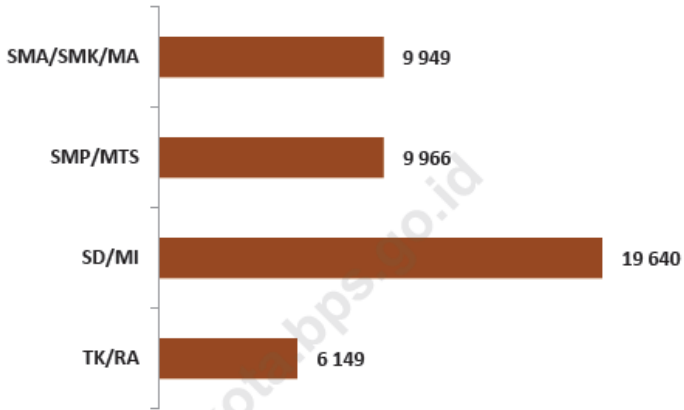
5.1. Capaian Bidang Pendidikan

a. Fasilitas Pendidikan

Menurut data dari Dinas Pendidikan Kota Batu, dari sisi kelengkapan fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh penduduk di Kota Batu secara umum sudah cukup baik, di setiap kecamatan sudah tersedia fasilitas sekolah dasar sampai dengan SLTA. Dari sisi jumlah pengajar pun, jumlahnya sudah cukup terlihat dari rasio guru-murid pada masing-masing jenjang pendidikan.

Berdasarkan data Susenas tahun 2018, sebesar 73 persen penduduk usia 7-24 tahun di Kota Batu sedang bersekolah. Bila dilihat menurut kelompok usia sekolah, persentas penduduk yang sedang bersekolah menurun seiring meningkatnya kelompok usia sekolah.

Selain partisipasi sekolah, gambaran tentang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk di Kota Batu juga dapat dilihat dari data Susenas. Persentase penduduk menurut pendidikan tertinggi dapat menggambarkan kualitas SDM di suatu wilayah. Pada tahun 2018, sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Batu memiliki pendidikan tertinggi SMA/ sederajat yaitu sebesar 29,33 persen. Namun persentase penduduk berpendidikan diploma maupun sarjana hanya sebesar 11,67 persen.



Gambar 5.1 Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Batu, 2018

Tabel 5.1 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2018

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah
Batu	1	36	37	5	223	228	35	242	246
Junrej	1	14	15	9	78	87	90	950	104
Bumiaji	1	21	22	8	79	87	111	893	100
Kota Batu	3	71	74	22	380	402	236	426	450
								8	4

Sumber : Kota Batu Dalam Angka, 2019

Tabel 5.2 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid RA Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2018

Kecamatan	Sekolah	Guru	Siswa
Batu	10	63	797
Junrejo	7	36	386
Bumiaji	7	34	462
Kota Batu	24	133	1645

Sumber : Kota Batu Dalam Angka, 2019

Tabel 5.3 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid SD Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2018

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah
Batu	26	10	36	311	142	453	489	261	751
							5	7	2
Junrej o	16	1	17	197	9	206	365	239	389
							5		4
Bumiaj i	23	1	24	257	8	265	420	77	428
							3		0
Kota Batu	65	12	77	765	159	924	127	293	156
							53	3	89

Sumber : Kota Batu Dalam Angka, 2019

Tabel 5.4 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid MI Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2018

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah
Batu	0	8	8	0	143	143	0	284	284
Junrej	0	4	4	0	48	48	0	6	6
o								700	700
Bumiaj	0	2	2	0	25	25	0	408	408
i									
Kota	0	14	14	0	216	216	0	395	395
Batu								4	4

Sumber : Kota Batu Dalam Angka, 2019

Tabel 5.5 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid SMP Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2018

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah
Batu	3	12	15	121	241	362	197	337	535
Junrej	1	4	5	60	32	92	8	3	1
o								953	122
Bumiaj	4	3	7	90	28	118	144	125	156
i									
Kota	6	19	27	271	301	572	437	377	814
Batu							4	2	6

Sumber : Kota Batu Dalam Angka, 2019

Tabel 5.6 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid MTs Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2018

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah
Batu	0	2	2	0	59	59	0	871	871
Junrejo	1	0	1	81	0	81	924	0	924
Bumiaji	0	1	1	0	15	15	0	25	25
Kota Batu	1	3	4	81	74	155	924	896	1820

Sumber : Kota Batu Dalam Angka, 2019

Tabel 5.7 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid SMA Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2018

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah
Batu	1	7	8	79	102	181	118	126	244
							0	3	3
Junrejo	1	0	1	58	0	58	946	0	949
Bumiaji	1	1	2	24	5	29	237	192	429
Kota Batu	3	8	11	161	107	268	236	145	382
							6	5	1

Sumber : Kota Batu Dalam Angka, 2019

Tabel 5.8 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid SMK Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2018

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah
Batu	2	4	6	122	83	205	197	164	362
Junrejo	0	3	3	0	27	27	4	6	0
Bumiaji	1	1	2	46	21	67	540	178	718
Kota Batu	3	8	11	168	131	299	251	207	459
							4	6	0

Sumber : Kota Batu Dalam Angka, 2019

Tabel 5.9 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid MA Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2018

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah	Ne geri	Swa sta	Jum lah
Batu	1	1	2	59	17	76	107	97	117
Junrejo	0	1	1	0	26	26	5		2
Bumiaji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kota Batu	1	2	3	59	43	102	107	463	153
							5		8

Sumber : Kota Batu Dalam Angka, 2019

Tabel 5.10 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kota Batu, Tahun 2011, 2014 dan 2018

Kecamatan	SD			SMP			SMA			SMK			Perguruan tinggi		
	2011	2014	2018	2011	2014	2018	2011	2014	2018	2011	2014	2018	2011	2014	2018
Batu	8	8	8	7	7	7	5	6	6	3	3	3	2	2	1
Junrejo	7	7	7	4	4	4	3	2	2	0	2	2	2	2	3
Bumiayu	9	9	9	5	5	6	1	1	1	1	1	2	1	1	0
Kota Batu	24	24	24	16	16	17	9	9	9	4	6	7	5	5	4

Sumber : Kota Batu Dalam Angka, 2019

b. Persebaran Siswa

Persebaran siswa di Kota Batu secara umum dikelola oleh beberapa lembaga sesuai kewenangannya. Untuk Siswa SD sampai SMP dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota/Daerah sedangkan SMA dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Untuk MI dan MTs dikelola oleh Kementerian Agama Kota/Daerah sedangkan MA dikelola oleh Kementerian Agama Provinsi.

Tabel 5.11 Persebaran Siswa di Kota Batu Tahun 2015-2019

Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kecamatan Batu	SD	7430	7284	7378	7494	7557
	SMP	5414	5415	5396	5336	5236
	SMA	2352	2533	2510	2646	2858
	SMK	3370	3924	4169	4121	3370

Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kecamatan Bumiaji	SD	4281	4304	4246	4271	4309
	SMP	1529	1566	1548	1566	1668
	SMA	124	115	237	381	423
	SMK	633	661	707	675	633
Kecamatan Junrejo	SD	3806	3813	3824	3890	3898
	SMP	1218	1281	1251	1224	1178
	SMA	851	901	949	965	1010
	SMK	200	184	201	253	200
Kota Batu	SD	15517	15401	15448	15655	15764
	SMP	8161	8262	8195	8126	8082
	SMA	3327	3549	3696	3992	4291
	SMK	4203	4769	5077	5049	4203

Sumber : Studi Kelayakan Pembangunan SMP Negeri Kota Batu 2019

c. Analisa Kebutuhan Sekolah

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan didasarkan pada Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan SNI 03 – 1733 – 2004. Analisa ini diperlukan untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sehingga dapat diketahui ideal ketercukupan dan kekurangan yang harus dicukupi.

Tabel 5.12 Analisa kebutuhan Sarana Pendidikan Kota Batu Tahun 2019

Jenis Sarana	Kecamatan	Standar*	Kebutuhan		Eksisting	Penambahan
		Jumlah penduduk yang dilayani (jiwa)	Jumlah Penduduk	Jumah (unit)		
TK	Batu	1250	95,852	77	47	30
	Junrejo	1250	51,186	41	22	19
	Bumiaji	1250	58,750	47	29	18
	Total		205,788	165	98	67
SD	Batu	1600	95852	60	44	16
	Junrejo	1600	51186	32	21	11
	Bumiaji	1600	58750	37	26	11
	Total		205788	129	91	38
SMP	Batu	4800	95852	20	17	3
	Junrejo	4800	51186	11	6	5
	Bumiaji	4800	58750	12	8	4
	Total		205788	43	31	12
SMA	Batu	4800	95852	20	16	4
	Junrejo	4800	51186	11	5	6
	Bumiaji	4800	58750	12	4	8
	Total		205788	43	25	18

Sumber: Studi Kelayakan Pembangunan SMPN, 2019

Berdasarkan tabel di atas, di Kota Batu membutuhkan penambahan jumlah sarana Pendidikan mulai dari TK

sebanyak 67 Unit, SD sebanyak 38 Unit, SMP sebanyak 12 Unit, dan SMA sebanyak 18 Unit.

d. Angka Partisipasi

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

APK yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu

menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 5.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

No.	Kelompok Umur	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	7 - 12	100	100	100	99,6
2	13 - 15	98,11	98	98,51	98,51
3	16 - 18	76,67	87,01	83,43	77,41

Tabel 5.14 Angka Partisipasi Kasar (APK)

No.	Jenjang Sekolah	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	100	99,34	105,3	103,23
2	SMP/MTs	107,39	101,41	106,8	105,19
3	SMA/MA	88,89	92,59	0	98,44

Tabel 5.15 Angka Partisipasi Murni (APM)

No.	Jenjang Sekolah	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	90,8	102,5	94,8	91,94
2	SMP/MTs	76,96	113	82,52	85,31
3	SMA/MA	63,85	96,6	0	73,03

Penduduk Kota Batu pada tahun 2018 umumnya sudah melek huruf, yaitu sekitar 97,60 persen. Secara umum terlihat pola bahwa semakin besar pengeluaran penduduk, semakin tinggi pula angka melek hurufnya. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Batu untuk kelompok umur 7-12 sebesar 99,60 persen yang berarti untuk anak usia 7-12 tahun, hampir semuanya masih mengenyam pendidikan, hanya 0,40 persen anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Selanjutnya APS untuk usia 13-15 tahun sebesar 98,51 persen. Dan APS untuk usia 16-18 tahun sebesar 77,41 persen. Apabila diperhatikan semua usia sekolah, semakin tinggi usia sekolah Angka Partisipasi Sekolahnya semakin kecil. Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah sebesar 96,10 persen, yang berarti 96,10 persen anak usia SD sedang bersekolah di SD pada tahun 2018. Sementara APM SMP dan SMA masing-masing adalah sekitar 82,18 persen dan 73,03 persen. Artinya, ada 82,18 persen anak usia SMP di Kota Batu yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMP, dan ada 73,03 persen anak usia SMA di Kota Batu yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD adalah sekitar 97,57 persen, sedangkan APK

SMP dan SMA masing-masing adalah 105,30 persen dan 98,44 persen. Pada jenjang SMP yang menunjukkan angka 105,30 persen, artinya terdapat lebih banyak anak yang bersekolah di jenjang SMP dibandingkan anak usia 13-15 tahun di Kota Batu

5.2. Capaian Bidang Kesehatan

Kesehatan penduduk modal dan aset terpenting untuk tumbuhkembang wilayah. Akan tetapi pemerataan pembangunan dibidang kesehatan harus mampu melayani dan menjamin kesehatan penduduk di Kota Batu di tengah keterbatasan anggaran dan ongkos pembiayaan kesehatan juga terbilang sangat mahal. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Batu telah berupaya keras untuk memenuhinya sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Terkait perkembangan pengurangan jumlah penduduk miskin terhadap capaian bidang kesehatan di Kota Batu sebagai berikut ini :

1. Sarana Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan data Pendataan Desa (Podes) pada tahun 2018 fasilitas kesehatan di setiap kecamatan sudah cukup baik. Meskipun tidak semua kecamatan memiliki rumah sakit umum, namun di setiap kecamatan sudah terdapat puskesmas yang dapat melayani penduduknya. Lengkap dengan keberadaan tenaga medis di setiap kecamatan. Kemudahan pelayanan kesehatan khusus untuk kecamatan yang tidak memiliki rumah sakit umum tentunya dapat diatasi dengan puskesmas yang lengkap dan beberapa diantaranya telah memiliki fasilitas rawat

inap. Kehadiran rumah sakit swasta di Batu cukup membantu pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Batu.

Sarana pelayanan kesehatan di Kota Batu berupa UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), Puskesmas, klinik Pratama dan Utama, serta Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak.

- a. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
Kota Batu memiliki UKBM aktif terdata yang terdiri dari 189 Posyandu, 24 Poskesdes, 23 Posbindu dan 11 Polindes/Ponkesdes yang semuanya berada di bawah pembinaan Puskesmas dan Bidang Kesehatan Masyarakat, seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 5.16 Jumlah UKBM Aktif di Kota Batu Tahun 2016 - 2018

	Posyandu	Poskesdes	Polindes	Posbindu
	Aktif			
2016	182	24	12	18
2017	182	24	11	17
2018	176	24	11	23

- b. Puskesmas

Kota Batu memiliki 5 Puskesmas terdiri dari 3 Puskesmas Rawat Inap dan 2 Puskesmas Rawat Jalan. Sampai saat ini rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kota Batu adalah 40,79 yang artinya 1 Puskesmas melayani kurang lebih 40.790 penduduk. Idealnya 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk. Berikut puskesmas di wilayah Kota Batu:

- (1). Puskesmas Batu (Rawat Inap)

- (2). Puskesmas Beji (Rawat Inap)
- (3). Puskesmas Bumiaji (Rawat Inap)
- (4). Puskesmas Sisir (Rawat Jalan)
- (5). Puskesmas Junrejo (Rawat Jalan)

Jumlah kapasitas tempat tidur pada puskesmas rawat inap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.17 Jumlah Tempat Tidur di Puskesmas Rawat Inap Kota Batu

Puskesmas (Rawat Inap)	Jumlah Tempat Tidur
Puskesmas Batu	10
Puskesmas Beji	12
Puskesmas Bumiaji	6
Jumlah	28

Sumber:: Profil Puskesmas, 2018

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa jumlah total tempat tidur yang berada di Puskesmas Rawat Inap di Wilayah Kota Batu berjumlah 28 buah yang tersebar di 3 puskesmas. Berdasarkan fungsi pelayanan puskesmas, dapat diketahui bahwa ketiga puskesmas sebagai fungsi layanan perawatan (rawat inap) karena memiliki ruang tambahan dan fasilitas untuk menyelamatkan pasien gawat darurat seperti kecelakaan lalu lintas, persalinan dengan penyulit, dan lain sebagainya.

c. Klinik (Klinik Pratama dan Utama)

Terdapat beberapa klinik pratama dan utama tersebar di wilayah Kota Batu. 1(satu) klinik utama, yaitu Klinik Margi Rahayu. Terdapat 4 (empat) klinik pratama, yaitu:

- (1) Klinik Nahdlatul Ulama
- (2) Klinik Mega Health
- (3) Klinik Arhanud
- (4) Klinik Polres

d. Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit di Kota Batu sebanyak 6 (enam) Rumah Sakit terdiri dari:

- (1) Rumah Sakit Karsa Husada (milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur)
- (2) Rumah Sakit Hasta Brata (milik Polri)
- (3) Rumah Sakit Ibu dan Anak IPHI Kota Batu.
- (4) Rumah Sakit dr. Ety Asharto
- (5) Rumah Sakit Punten
- (6) Rumah Sakit Baptis Batu

2. **Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Masyarakat**

Kemudahan pelayanan kesehatan di Kota Batu juga didukung oleh jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Masyarakat yang cukup baik. Berikut disajikan jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Masyarakat:

Tabel 5.18 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Batu Tahun 2017 - 2018

No.	Tenaga Kesehatan	Satuan	2017	2018
-----	------------------	--------	------	------

1	Dokter Umum	Orang	76	64
2	Dokter Spesialis	Orang	72	98
3	Dokter Gigi	Orang	17	14
4	Bidan	Orang	112	110
5	Perawat	Orang	363	349
6	Apoteker	Orang	19	27
7	Sarjana Teknis Kefarmasian	Orang	65	56

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Tabel 5.19 Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Kota Batu
Tahun 2017 - 2018

No.	Tenaga Kesehatan	Satuan	2017	2018
1	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	10	7
2	Tenaga Teknis Sanitasi Lingkungan	Orang	8	7
3	Nutrisionis	Orang	30	21
4	Dietisien	Orang	3	3

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Pembangunan di bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui meningkatnya kesehatan penduduk. Angka Harapan Hidup Kota

Batu selama Sembilan tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan tahun 2018 mencapai 72,37 tahun. Ini memberikan arti bahwa setiap bayi yang lahir di tahun 2018 mempunyai harapan untuk tetap hidup sampai umur 72,37 tahun. Angka Harapan Hidup sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan, diantaranya pola hidup sehat, pola konsumsi makanan, dan kualitas lingkungan perumahan. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus diimbangi dengan penyediaan sarana kesehatan sebagai tempat rujukan bilamana masyarakat mengalami gangguan kesehatan. Pada tahun 2018 terdapat 6 rumah sakit, 5 puskesmas, 29 klinik/balai kesehatan, 189 posyandu, dan 11 polindes. Selain itu di Kota Batu juga terdapat 20 apotik yang tersebar di 3 kecamatan. Tenaga Kesehatan yang ada di Kota Batu antara lain dokter 20 orang, perawat 68 orang, bidan 42 orang, farmasi 15 orang, ahli gizi 53 orang. Selama tahun 2018, setidaknya sekitar 32,59 persen penduduk di Kota Batu memiliki keluhan kesehatan. Adapun 5 kasus penyakit terbanyak pada tahun 2018 antara lain adalah hipertensi, rhinitis acute, influenza, gastritis, dan diabetes militus. Dalam menangani penyakitnya, masyarakat banyak mengunjungi puskesmas untuk pengobatan rawat jalan. Sedangkan untuk pengobatan rawat inap, masyarakat lebih banyak memanfaatkan fasilitas RS pemerintah.

Peningkatan fasilitas kesehatan di Kota Batu juga dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan tenaga kesehatan sejak usia dini. Salah satunya terlihat dari persalinan di Kota Batu yang pada tahun 2018 seluruhnya dibantu oleh Tenaga Kesehatan. Dari sekitar 3.103 bayi yang lahir tahun 2018, masih terdapat 123 bayi yang terlahir dengan kondisi berat badan lahir rendah (BBLR). BBLR adalah kondisi di mana bayi memiliki berat badan kurang dari 2,5 kg

saat dilahirkan. Bayi yang mengalami BBLR rentan mengalami gangguan kesehatan, sehingga memerlukan perawatan ekstra. Selain BBLR, ditemukan juga 8 kasus gizi buruk pada bayi, yaitu 4 bayi di Kecamatan Batu, 2 bayi di Kecamatan Junrejo, dan 2 bayi di Kecamatan Bumiaji. Kondisi bayi BBLR dan gizi buruk dapat terjadi karena beragam penyebab yang harus diwaspadai sejak masa kehamilan. Karenanya, ibu hamil dianjurkan untuk melakukan beberapa kali kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kandungannya, serta mendapatkan pengarahan dari tenaga kesehatan untuk menjaga kondisi kandungannya. Selama tahun 2018, sekitar 96,05 persen ibu hamil telah melakukan kunjungan K1, dengan kata lain masih terdapat sekitar 3,95 persen ibu hamil yang belum melakukan kunjungan K1. pada kunjungan K4, persentase tersebut menurun menjadi 90,92 persen saja. Padahal dengan pemeriksaan yang baik, dapat mengidentifikasi kehamilan beresiko tinggi dan dilanjutkan dengan perawatan khusus.

Untuk melihat indikator mana yang menjadi prioritas pada bidang kesehatan, maka akan dipetakan beberapa indikator pendukung terhadap indikator utama. Analisisnya disampaikan pada bagian berikut

Tabel 5.20 Angka Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

			2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup (Tahun)			72,2	72,25	72,37
Harapan Lama Sekolah			13,62	14,03	14,04

Rata-Rata Lama Sekolah	8,45	8,46	8,77
Pengeluaran (dalam Ribu Rupiah)	11.772	12.057	12.466
IPM	73,57	74,26	75,04

5.3. Prioritas Intervensi Wilayah

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (awal 2019), 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah untuk Kota Batu sebanyak 12.917 Kepala Rumah Tangga (KRT) atau 14.251 Kepala Keluarga (KK) dan jumlah individu sebanyak 44.982 orang. Jumlah ini merupakan 22% dari total jumlah penduduk Kota Batu berdasarkan BPS.

Jumlah prosentase rumah tangga dengan jumlah prosentase terendah adalah di Kelurahan Sisir (12%) dengan jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) 2.180 orang dan tertinggi di Desa Gunungsari (39%) dengan jumlah individu 2.666 orang. Sedangkan jumlah ART terendah ada di Desa Mojorejo sebanyak 825 orang dengan jumlah tertinggi adalah Desa Pesanggrahan sebanyak 3.983 orang. Selanjutnya dapat dilihat sebagaimana tabel 5.21.

Untuk data 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah Kota Batu, terendah ada di Kelurahan Sisir, sebesar 2% atau sebanyak 445 ART. Prosentase tertinggi ada di Desa Gunungsari, sebesar 18% atau sebanyak 1.205 ART. Jumlah ini merupakan 6% dari total jumlah penduduk Kota Batu berdasarkan BPS.

Data 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dapat ditinjau per wilayah kecamatan dibandingkan jumlah

penduduk berdasarkan data BPS. Kecamatan Batu, prosentase terendah ada di Kelurahan Sisir sebesar 2% atau 445 ART, dan tertinggi ada di Desa Sumberejo sebesar 8% atau 605 ART. Sedangkan dalam satu kecamatan sebesar 5% atau 4.786 ART.

Kecamatan Junrejo, prosentase terendah ada di Kelurahan Dadaprejo sebesar 2% atau 147 ART, dan tertinggi ada di Desa Torongrejo sebesar 9% atau 499 ART. Sedangkan dalam satu kecamatan sebesar 5% atau 2.775 ART. Kecamatan Bumiaji, prosentase terendah ada di Desa Tulungrejo sebesar 3% atau 319 ART, dan tertinggi ada di Desa Gunungsari sebesar 18% atau 1.205 ART. Sedangkan dalam satu kecamatan sebesar 9% atau 5.377 ART.

Tabel 5.21 Sebaran Lokasi 40% Tingkat Kesejahteraan terendah Kota Batu Tahun 2018

KECAMATAN	DESA-KELURAHAN	STATUS ADM	Jumlah Penduduk (BPS, 2018)	Jumlah KRT	Jumlah ART	% Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah_Keluarga
BATU	TEMAS	KELURAHAN	19.795	946	3.593	18	1.088
BATU	NGAGLIK	KELURAHAN	11.384	628	2.236	20	686
BATU	SONGGOKERTO	KELURAHAN	7.291	345	1.334	18	415
BATU	SISIR	KELURAHAN	17.981	633	2.180	12	699
BATU	SUMBEREJO	DESA	7.421	617	2.214	30	734
BATU	ORO-ORO OMBO	DESA	11.059	660	2.286	21	707
BATU	SIDOMULYO	DESA	7.723	336	1.229	16	392
BATU	PESANGGRAHAN	DESA	13.198	1.036	3.983	30	1.214
BUMIAJI	PUNTEN	DESA	5.312	314	1.061	20	326
BUMIAJI	GUNUNGSARI	DESA	6.878	756	2.666	39	816
BUMIAJI	TULUNGREJO	DESA	9.665	497	1.637	17	536
BUMIAJI	SUMBERGONDO	DESA	3.924	253	855	22	283
BUMIAJI	PANDANREJO	DESA	5.861	456	1.408	24	484
BUMIAJI	BUMIAJI	DESA	6.402	689	2.351	37	782
BUMIAJI	GIRIPURNO	DESA	10.090	1.083	3.539	35	1.162
BUMIAJI	BULUKERTO	DESA	5.902	614	2.210	37	677
BUMIAJI	SUMBERBRANTAS	DESA	4.716	404	1.254	27	424
JUNREJO	DADAPREJO	KELURAHAN	6.678	281	986	15	290
JUNREJO	BEJI	DESA	8.191	357	1.201	15	382
JUNREJO	JUNREJO	DESA	9.777	508	1.747	18	519
JUNREJO	TLEKUNG	DESA	4.156	251	838	20	289
JUNREJO	MOJOREJO	DESA	5.269	233	825	16	235
JUNREJO	PENDEM	DESA	11.351	674	2.231	20	682
JUNREJO	TORONGREJO	DESA	5.764	346	1.118	19	429
JUMLAH			205.788	12.917	44.982	22	14.251

Tabel 5.22 Sebaran Lokasi 10% Tingkat Kesejahteraan terendah berdasarkan prosentase terhadap jumlah penduduk Kota Batu Tahun 2018

NO	KECAMATAN	DESA-KELURAHAN	STATUS ADM	Jumlah Penduduk (BPS, 2018)	Jumlah KRT	Jumlah ART	% Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah_Keluarga
1	BATU	SISIR	KELURAHAN	17.981	116	445	2	128
2	JUNREJO	DADAPREJO	KELURAHAN	6.678	32	147	2	35
3	BATU	SONGGOKERTO	KELURAHAN	7.291	53	235	3	68
4	BUMIAJI	TULUNGREJO	DESA	9.665	85	319	3	93
5	JUNREJO	MOJOREJO	DESA	5.269	53	220	4	53
6	BUMIAJI	PUNTEN	DESA	5.312	50	203	4	54
7	JUNREJO	BEJI	DESA	8.191	97	384	5	103
8	JUNREJO	PENDEM	DESA	11.351	157	603	5	159
9	BATU	NGAGLIK	KELURAHAN	11.384	134	543	5	147
10	BATU	PESANGGRAHAN	DESA	13.198	159	713	5	194
11	BATU	TEMAS	KELURAHAN	19.795	210	977	5	269
12	JUNREJO	TLEKUNG	DESA	4.156	58	238	6	72
13	BATU	SIDOMULYO	DESA	7.723	120	489	6	144
14	BUMIAJI	SUMBERGONDO	DESA	3.924	60	259	7	74
15	BUMIAJI	PANDANREJO	DESA	5.861	101	387	7	110
16	JUNREJO	JUNREJO	DESA	9.777	176	684	7	180
17	BATU	ORO-ORO OMBO	DESA	11.059	178	779	7	198
18	BUMIAJI	SUMBERBRANTAS	DESA	4.716	95	391	8	105
19	BUMIAJI	BULUKERTO	DESA	5.902	117	486	8	138
20	BUMIAJI	BUMIAJI	DESA	6.402	111	491	8	144
21	BATU	SUMBEREJO	DESA	7.421	132	605	8	172
22	JUNREJO	TORONGREJO	DESA	5.764	131	499	9	177
23	BUMIAJI	GIRIPURNO	DESA	10.090	396	1.636	16	445
24	BUMIAJI	GUNUNGSARI	DESA	6.878	297	1.205	18	331
JUMLAH				205.788	3.118	12.938	6	3.593

Sumber Data: BPS dan Pusdatin Kemensos (SIKS-NG), Januari 2019

Tabel 5.23 Sebaran Lokasi 10% Tingkat Kesejahteraan terendah berdasarkan prosentase terhadap jumlah penduduk Kecamatan Batu Tahun 2018

No.*	Kecamatan	Desa-Kelurahan	Status Adm	Jumlah Penduduk (BPS, 2018)	Jumlah KRT	Jumlah ART	% Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah_Keluarga
1	BATU	SISIR	KELURAHAN	17.981	116	445	2	128
3	BATU	SONGGOKERTO	KELURAHAN	7.291	53	235	3	68
9	BATU	NGAGLIK	KELURAHAN	11.384	134	543	5	147
10	BATU	PESANGGRAHAN	DESA	13.198	159	713	5	194
11	BATU	TEMAS	KELURAHAN	19.795	210	977	5	269
13	BATU	SIDOMULYO	DESA	7.723	120	489	6	144
17	BATU	ORO-ORO OMBO	DESA	11.059	178	779	7	198
21	BATU	SUMBEREJO	DESA	7.421	132	605	8	172
JUMLAH				95.852	1.102	4.786	5	1.320

Sumber Data: Pusdatin Kemensos (SIKS-NG), Januari 2019

*) Nomor urut berdasarkan % terkecil dalam satu Kota Batu

Tabel 5.24 Sebaran Lokasi 10% Tingkat Kesejahteraan terendah berdasarkan prosentase terhadap jumlah penduduk Kecamatan Junrejo Tahun 2018

No.*	Kecamatan	Desa-Kelurahan	Status Adm	Jumlah Penduduk (BPS, 2018)	Jumlah KRT	Jumlah ART	% Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah_Keluarga
2	JUNREJO	DADAPREJO	KELURAHAN	6.678	32	147	2	35
5	JUNREJO	MOJOREJO	DESA	5.269	53	220	4	53
7	JUNREJO	BEJI	DESA	8.191	97	384	5	103
8	JUNREJO	PENDEM	DESA	11.351	157	603	5	159
12	JUNREJO	TLEKUNG	DESA	4.156	58	238	6	72
16	JUNREJO	JUNREJO	DESA	9.777	176	684	7	180
22	JUNREJO	TORONGREJO	DESA	5.764	131	499	9	177
JUMLAH				51.186	704	2.775	5	779

Sumber Data: Pusdatin Kemensos (SIKS-NG), Januari 2019

*) Nomor urut berdasarkan % terkecil dalam satu Kota Batu

Tabel 5.25 Sebaran Lokasi 10% Tingkat Kesejahteraan terendah berdasarkan prosentase terhadap jumlah penduduk Kecamatan Bumiaji Tahun 2018

No.*	Kecamatan	Desa-Kelurahan	Status Adm	Jumlah Penduduk (BPS, 2018)	Jumlah KRT	Jumlah ART	% Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah_Keluarga
4	BUMIAJI	TULUNGREJO	DESA	9.665	85	319	3	93
6	BUMIAJI	PUNTEN	DESA	5.312	50	203	4	54
14	BUMIAJI	SUMBERGONDO	DESA	3.924	60	259	7	74
15	BUMIAJI	PANDANREJO	DESA	5.861	101	387	7	110
18	BUMIAJI	SUMBERBRANTAS	DESA	4.716	95	391	8	105
19	BUMIAJI	BULUKERTO	DESA	5.902	117	486	8	138
20	BUMIAJI	BUMIAJI	DESA	6.402	111	491	8	144
23	BUMIAJI	GIRIPURNO	DESA	10.090	396	1.636	16	445
24	BUMIAJI	GUNUNGSARI	DESA	6.878	297	1.205	18	331
JUMLAH				58.750	1.312	5.377	9	1.494

Sumber Data: BPS dan Pusdatin Kemensos (SIKS-NG), Januari 2019

*) Nomor urut berdasarkan % terkecil dalam satu Kota Batu

Prioritas Intervensi wilayah dapat dilakukan dengan memetakan sebaran penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dalam satu Kota Batu. Dari tabel 5.22 sampai dengan tabel 5.25 dapat diketahui desa/kelurahan yang perlu menjadi wilayah prioritas penanganan. Untuk skala kota maka prioritas pertama sampai dengan ketiga adalah Desa Gunungsari, Desa Giripurno dan Desa Torongrejo.

Untuk skala kecamatan, didapatkan prioritas penanganan pertama dan kedua. Di Kecamatan Batu, Desa Sumberejo dan Desa Oro Oro Ombo. Di Kecamatan Junrejo, Desa Torongrejo dan Desa Junrejo. Di Kecamatan Bumiaji, Desa Gunungsari dan Desa Giripurno.

BAB VI

ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH

6.1. Isu Strategis

Dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2018 – 2022 disebutkan bahwa Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau di utamakan dalam merancang pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Isu strategis ini disusun melalui permasalahan pembangunan yang ada di Kota Batu.

Isu Strategis Kota Batu menurut Dokumen RPJMD Kota Batu Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjaga stabilitas kondisi sosial politik, kerukunan antar umat beragama, pelestarian budaya dan nilai kearifan local.
- (2) Peningkatan kualitas daya saing SDM daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja.
- (3) Peningkatan daya saing perekonomian daerah berwawasan lingkungan berbasis ciri khas dan potensi unggulan daerah.
- (4) Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau.
- (5) Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

6.2. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang direncanakan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

(1) VISI Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) sebagai suatu komitmen atau janji kepada masyarakat. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berbagai isu strategis di Kota Batu diantaranya seperti pengembangan potensi unggulan untuk meningkatkan daya saing daerah, dan penguatan karakter lokal menjadi isu strategis yang mendorong terciptanya visi Kepala Daerah. Maka Visi Kota Batu untuk periode RPJMD 2018-2022 adalah sebagai berikut:

“Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera”

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi

masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Melalui visi pembangunan kota Batu selama lima tahun diharapkan seluruh *stakeholder* di Kota Batu secara bersama-sama mengoptimalkan kapasitasnya untuk terwujudnya Kota Batu sebagai sentra agro wisata internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera.

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Batu periode Tahun 2018 – 2022, pokok-pokok Visi Kota Batu adalah sebagai berikut:

a. Desa Berdaya Kota Berjaya

Kemandirian dan kemajuan desa adalah pondasi yang kokoh untuk bangunan kemakmuran dan kesejahteraan kota Batu, pembangunan Kota Batu diarahkan pada pemerataan pembangunan yang ada di desa-desa. Kota Batu memiliki 19 Desa dan 5 Kelurahan, setiap desa dan kelurahan memiliki potensi unggulan yang berkontribusi besar terhadap berjayanya Kota Batu. Oleh karena itu arah pembangunan Kota Batu selama lima tahun kedepan akan dikuatkan dan diberdayakan seluruh desa dan kelurahan yang pada muaranya akan menjadikan Kota Batu yang Berjaya.

b. Mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Agro Wisata Internasional.

Secara geografis Kota Batu memiliki karakteristik kondisi geografis yang mendukung kepariwisataan dan pertanian. Berbagai wisata yang ada di Kota Batu terbentuk secara alami menjadi potensi unggulan Kota Batu. Kota Batu juga memiliki potensi sektor

pertanian yang terdiri dari sayur mayor, tanaman hias, dan buah buahan yang dapat tumbuh dengan baik pada wilayah yang beriklim sejuk seperti di Kota Batu. Selama lima tahun pembangunan Kota Batu akan diarahkan pada sinergitas pembangunan pariwisata dengan pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan memiliki produk berstandar internasional.

- c. Mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Agro Wisata Internasional yang berkarakter.

Berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah di Kota Batu akan berkembang dan memiliki daya saing daerah yang tinggi jika dikembangkan sejalan dengan karakteristik keunggulan setiap desa. Pemerintah Kota Batu dalam lima tahun akan melakukan pembangunan berbasis sektor unggulan daerah dan tetap mempertahankan ciri khas budaya, sosial, dan pesona alam Kota Batu

- d. Mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Agro Wisata Internasional yang berdaya saing.

Pembangunan Kota Batu dengan fokus utama pada potensi unggulan daerah pada muaranya akan mewujudkan Kota Batu yang memiliki daya saing yang unggul di Bidang Sumber Daya Manusia, Pertanian, Pariwisata, dan UMKM. Keunggulan ini akan berdampak pada kemandirian dan kemajuan Kota Batu.

- e. Mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Agro Wisata Internasional yang sejahtera.

Pembangunan Kota Batu selama lima tahun diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kota Batu yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmani, tetapi juga spiritual atau rohani, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tentram, rukun dan damai.

(2) Misi Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2018-2022 berorientasi pada pembangunan sektor agro wisata yang berkarakter serta berdaya saing tingkat internasional sebagai upaya mewujudkan masyarakat Kota Batu yang sejahtera. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD yang dikembangkan telah memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi Kota Batu 2018-2022 disusun untuk memperjelas yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi periode 2018-2022. Sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan daerah

Kota Batu, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Batu 2018-2022 sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan Masyarakat yang Rukun, Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya Berbasis pada Pelestarian Nilai-Nilai dan Kearifan Budaya Lokal.
2. Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Seutuhnya Melalui Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
3. Misi 3: Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis pada Potensi Unggulan
4. Misi 4: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
5. Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang professional.

(3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah . Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam RPJMD Kota Batu periode tahun 2018 – 2022, rumusan tujuan dan sasaran dijabarkan pada tiap misi:

1. Tujuan dan Sasaran Misi 1

Tujuan Misi 1 adalah terwujudnya Batu kota nyaman dengan adanya peran pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak-hak seluruh warga batu melalui stabilitas politik, kerukunan kehidupan beragama dan jati diri daerah dengan indikatornya yaitu indeks kenyamanan kota.

Sasaran Misi 2 adalah (a) meningkatnya derajat kenyamanan masyarakat Kota Batu dengan indikator Indeks Modal Sosial. (b) Meningkatnya kedudukan Kota Batu sebagai Kota Tangguh Bencana dengan indikator Indeks Resiko Bencana.

2. Tujuan dan Sasaran Misi 2

Tujuan Misi 2 adalah terwujudnya penguatan kapasitas SDM Kota Batu melalui pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial berbasis pengarusutamaan gender untuk mewujudkan batu kota produktif dengan indikatornya indeks sumber daya manusia.

Sasaran Misi 2 adalah (a) meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Keadilan dan Kesetaraan Gender (IKKG) dan Indeks Minat Baca. (b) Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja

dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

3. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Tujuan Misi 3 adalah Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan melalui pengembangan agro wisata, dan kemandirian dan produktivitas desa untuk mewujudkan batu kota agrowisat dengan indikatornya yaitu indeks daya saing ekonomi daerah.

Sasaran Misi 3 adalah (a) Meningkatnya aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan, dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi, angka PDRB, angka kemiskinan, indeks gini dan nilai investasi. (b) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

4. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Tujuan Misi 4 adalah Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas, merata dan berkelanjutan berbasis kemandirian dan produktivitas desa/ kelurahan melalui pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran guna memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial untuk mewujudkan batu kota berkarakter dengan indikatornya yaitu indeks kepuasan layanan infrastruktur.

Sasaran Misi 4 adalah Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur kota yang terpadu dan

berkelanjutan, dengan indikator persentase kesesuaian pembangunan wilayah yang sesuai dengan RTRW, persentase kondisi infrastruktur kota dalam kondisi baik, dan indeks desa membangun.

5. Tujuan dan Sasaran Misi 5

Tujuan Misi 5 adalah Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan batu kota berintegritas dengan indikatornya yaitu indeks reformasi birokrasi.

Sasaran Misi 5 adalah (a) Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintah, dengan indikator opini BPK, predikat / nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Nilai EKPD, dan rerata indeks professional ASN. persentase kondisi infrastruktur kota dalam kondisi baik, dan indeks desa membangun. (b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dan system pemerintah berbasis elektronik (SPBE)

Dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program - program prioritas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil

Walikota Kota Batu masa bakti 2018-2022. Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Batu menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang terkait langsung dengan rencana aksi daerah (RAD) yang merupakan implementasi dari tiap Misi.

Misi 1: Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan Masyarakat yang Rukun, Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya Berbasis pada Pelestarian Nilai-Nilai dan Kearifan Budaya Lokal. Adapun SKPD terkait untuk mewujudkannya diantaranya Kantor KesbangPol, Satpol PP dan Linmas, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata.

Misi 2, Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Seutuhnya Melalui Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan. Adapun SKPD terkait untuk mewujudkannya diantaranya pertama Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB).

Misi 3: Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis pada Potensi Unggulan. Adapun SKPD terkait untuk mewujudkannya diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Misi 4: Meningkatkan Pembangunan

Infrastruktur dan Konektivitas Daerah yang Berkualitas untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Adapun SKPD terkait untuk mewujudkannya diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Penanggulangan Kebakaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB), dan Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara SKPD lainnya hanya penunjang terwujudnya visi dimaksud. Akan tetapi peran seluruh stakeholder di Kota Batu juga harus berkontribusi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan terutama LSM dan perusahaan yang berinvestasi di Kota Batu.

Sehubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan, maka sasaran utamanya adalah menurunkan angka kemiskinan. Strategi yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan cakupan layanan sosial dasar, penguatan penanggulangan kemiskinan, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.

Strategi pertama yaitu peningkatan kualitas SDM dan cakupan pelayanan sosial dasar akan mengarah pada sektor pendidikan, peran dan pelopor pemuda, kesehatan, sarana prasarana rehabilitasi sosial dan PSKS, serta kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga. Gambaran umum kebijakan didalam peningkatan kualitas SDM dan cakupan pelayanan sosial dasar berada pada misi 2 seperti bantuan operasional sekolah mulai tingkat PAUD sampai SMA, meningkatkan kompetensi pendidik, peningkatan kualitas puskesmas, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan KB,

pelatihan bagi perempuan usia produktif, dan penanganan PMKS.

Strategi yang kedua yaitu penguatan penanggulangan kemiskinan yang mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin, pengurangan beban pengeluaran, dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil. Gambaran umum kebijakannya berada pada Misi 3 dan 4. Pada misi 3 fokus pada penguatan ekonomi, dan di Misi 4 fokus pada pemenuhan sarana prasarana penunjang. Pada misi 3 akan dikembangkan kebijakan wirausaha pemuda, kelompok usaha bersama, pendampingan desa produktif, pembentukan BUMDes serta pemberdayaan gapoktan dan pokdarwis. Pengembangan ekonomi tersebut akan didukung dengan peningkatan sarana prasarana penunjang seperti akses air minum, akses sanitasi, konektivitas antar desa dan stimulan jamban.

Adapun Strategi ke tiga yaitu penguatan ketahanan pangan dan energi mengarah pada peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi perkebunan, peningkatan produksi ternak, peningkatan produksi perikanan. Gambaran umum kebijakan yang akan dilakukan untuk penguatan ketahanan pangan dan energi terdapat pada misi 3 dimana akan dilakukan intensifikasi budidaya hortikultura, intensifikasi tanaman buah unggulan, insentif pmbenihan, bantuan bibit ternak, penyediaan alat pertanian, sarana prasarana paska panen, kartu tani, asuransi petani, pemeliharaan irigasi, revitalisasi sumber mata air, pengembangan ikan mandiri, jaringan listrik perdesaan, serta listrik murah dan hemat.

6.3. Rencana Aksi Daerah

Rencana aksi daerah adalah berbagai rencana aktivitas yang dikerjakan atau dikoordinasi oleh Pemerintah Kota Batu sebagai bentuk strategi untuk menanggulangi kemiskinan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan target akhir penurunan kemiskinan adalah 2.55%. Rencana Aksi Daerah ini disajikan dalam lampiran.

BAB VII

RENCANA SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

Berbagai upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dapat dimaksimalkan bila diikuti dengan pelaksanaan monitoring secara rutin, berkala dan berkelanjutan, serta adanya upaya perbaikan pelaksanaan yang ditindaklanjuti dari hasil evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Dua kata tersebut yaitu **Monitoring** dan **Evaluasi**, merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan target kinerja yang ingin dicapai. Monitoring dan evaluasi atau pemantauan adalah kegiatan observasi berkelanjutan atas sejumlah indikator terkait status pelaksanaan dan kemajuan sebuah program, dalam kurun waktu tertentu baik regular maupun tematik untuk memberikan informasi pada pengelola serta pemangku kepentingan mengenai capaian-capaian program. Selanjutnya informasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perbaikan maupun peningkatan efektivitas proses implementasi dari program.

Aktivitas pada kegiatan pemantauan ini dapat meliputi supervisi di lapangan, pengisian instrument pemantauan, uji petik, dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh tim koordinasi pemantauan pusat dan daerah serta tim teknis daerah.

Kebijakan dan program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada prinsipnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan di Kota Batu dilakukan hal berikut ini:

- a. Pemerintah Kota Batu menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat yang telah menjalin kerjasama antara lain UNDP, Kementerian Keuangan, dan Baznas sebagai lembaga internasional, kementerian, dan institusi nasional yang beraktivitas melakukan penanggulangan kemiskinan ditingkat internasional dan nasional
- b. Pemerintah Kota Batu terus berupa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menjalin kerjasama dengan para pelaku industri ditingkat lokal dan nasional
- c. Sesuai dengan Rencana Aksi Daerah, setiap OPD mempunyai tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun integrasi dan kolaborasi antar OPD sangat dibutuhkan agar Rencana Aksi Daerah untuk penanggulangan kemiskinan terwujud sesuai persentase pengurangan kemiskinan yang ditargetkan.
- d. OPD sebagai penanggungjawab kegiatan sangat dianjurkan untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat atau penerima program penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya oleh OPD saja, melainkan harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam bentuk koordinasi

Sebagaimana dijelaskan dalam Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, program-program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik penerima manfaat dan tujuannya, sebagai berikut:

1. Kelompok program perlindungan sosial berbasis individu, keluarga atau rumah tangga, yang bertujuan melakukan

pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program nasional dalam kelompok ini antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminas Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), dan Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin (BSM).

2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat, yang bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Program nasional Kota Tanpa Kumuh.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program nasional dalam kelompok ini adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
4. Program-program lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Monitoring Monitoring atau pemantauan akan dilakukan melalui metode berikut ini:

- a. Pelaksana.

Pelaksana adalah semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.

b. Obyek

Obyek adalah semua kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Batu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Obyek monitoring dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sedang dari segi kewilayahan, obyek monitoring mulai dari tingkat dusun hingga tingkat kota.

c. Metode

Metode pemantauan adalah cara memantau kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan mekanisme kerja pemantau.

d. Pelaporan

Wakil Kepala Daerah atau Wakil Walikota berhak mengadakan pemantauan terjadwal maupun pemantauan tidak terjadwal sesuai kebutuhan agar program dapat terlaksana.